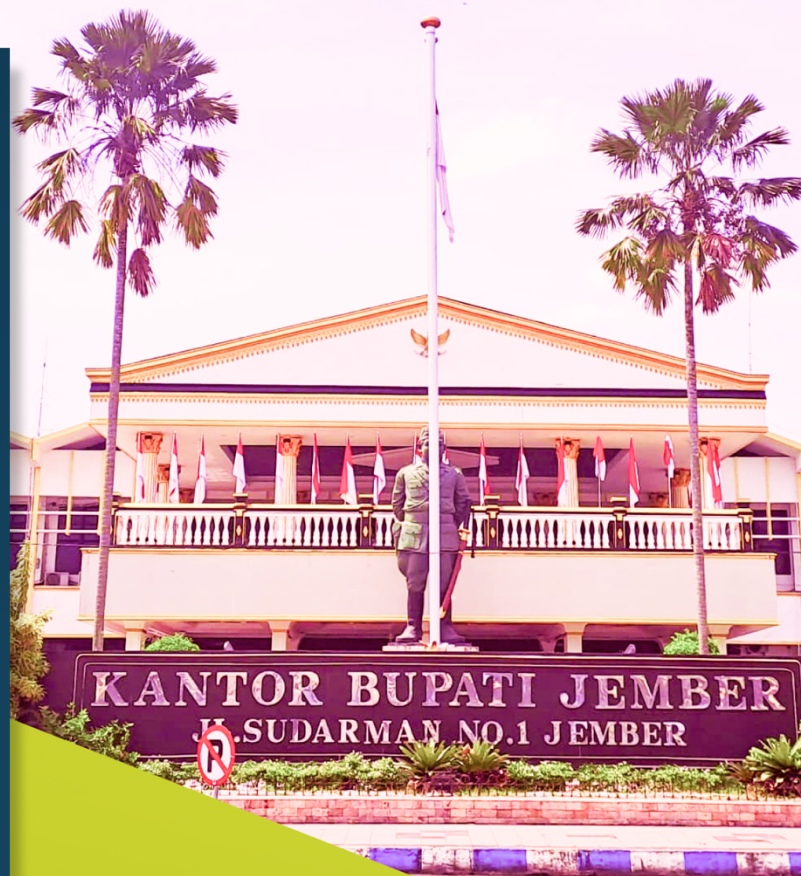




**LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
(LPPD)**

**KABUPATEN
JEMBER**



**20
24**

2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta berkat bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagai laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Jember selama kurun waktu tahun 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah kepada pemerintah pusat sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan regulasi tersebut substansi materi laporan ini menggambarkan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat indikator makro, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan. Disamping itu laporan ini juga memuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Harapan kami Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat menjadi sarana komunikasi serta perekat hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, sekaligus sebagai piranti pembinaan bagi Pemerintah khususnya dalam merumuskan kebijakan otonomi daerah lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jember, 13 Maret 2025



MUHAMMAD FAWAIT, SE, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GRAFIK	IX
DAFTAR BAGAN	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
A. Undang-undang Pembentukan Daerah	1
B. Data Geografis Wilayah.....	1
C. Informasi Umum Data Kependudukan.....	4
D. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	5
E. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah..	11
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	13
G. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	17
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	42
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	42
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	45
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	53
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	56
2.1 Capaian Kinerja Makro	56
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	57
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	59
2.1.3 Angka Pengangguran	61
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	63
2.1.5 Pendapatan per Kapita.....	64
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).....	66
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	68
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	68
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	77
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	79

A.	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024	79
B.	Pengukuran Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	84
C.	Perbandingan Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	93
D.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah	104
E.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai	108
F.	Analisis Penyebab Penurunan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi.....	116
G.	Analisis Efisiensi.....	181
H.	Program Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja	188
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.		209
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN		
	MINIMAL (SPM)	211
4.1	Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan.....	211
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	211
4.1.2	Target Pencapaian	214
4.1.3	Realisasi	218
4.1.4	Alokasi Anggaran.....	223
4.1.5	Dukungan Personil	223
4.1.6	Permasalahan dan Solusi.....	224
4.2	Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan	226
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	226
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Mutu oleh Daerah	235
4.2.3	Realisasi	249
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	268
4.2.5	Dukungan Personil	269
4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	270
4.3	Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	274
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	274
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Mutu oleh Daerah	276
4.3.3	Realisasi	279
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	283
4.3.5	Dukungan Personil	284
4.3.6	Permasalahan dan Solusi.....	284
4.4	Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	285
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	285
4.4.2	Target Pencapaian	286
4.4.3	Realisasi	287
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	288
4.4.5	Dukungan Personil	289

4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	290
4.5	Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	291
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	291
4.5.2	Target Pencapaian	292
4.5.3	Realisasi	296
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	302
4.5.5	Dukungan Personil	303
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	304
4.6	Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial.....	305
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	305
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Mutu oleh Daerah	306
4.6.3	Realisasi	312
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	319
4.6.5	Dukungan Personil	320
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	321
4.7	Program Kegiatan	322
4.7.1	Bidang Urusan Pendidikan	322
4.7.2	Bidang Urusan Kesehatan	331
4.7.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	332
4.7.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	333
4.7.5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	334
4.7.6	Bidang Urusan Sosial	335
BAB V	PENUTUP	337
LAMPIRAN		339

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1	Data Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun Menurut Kecamatan se-Kabupaten Jember Tahun 2024	2
Tabel 1.1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Tabel 1.1.3	Jumlah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jember.....	6
Tabel 1.1.4	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.....	8
Tabel 1.1.5	Rincian Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Kabupaten Jember Tahun 2024.....	11
Tabel 1.1.6	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jember Tahun 2024	14
Tabel 1.1.7	Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2024.....	15
Tabel 1.1.8	Alokasi dan Realisasi Belanja per Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan.....	17
Tabel 1.1.9	Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Jember dengan RPJPD Kabupaten Jember. RPJMD Provinsi Jawa Timur. dan RPJP Provinsi Jawa Timur	49
Tabel 2.1.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Jember Tahun 2024 ..	56
Tabel 2.1.2	Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Jember menurut Dimensi Tahun 2020-2024.....	58
Tabel 2.1.3	Profil Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 .	60
Tabel 2.1.4	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional 2020-2024.....	67
Tabel 2.2.1	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2024.....	69
Tabel 2.2.2	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	77
Tabel 2.2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024.....	80
Tabel 2.2.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 ..	85
Tabel 2.2.5	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2023.....	93
Tabel 2.2.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	105

Tabel 2.2.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional / Realisasi se-Regional Jawa Timur ..	109
Tabel 2.2.8	Laporan Kinerja Dinas Perikanan tahun 2024	125
Tabel 2.2.9	Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember LKE KEMENPANRB.....	131
Tabel 2.2.10	Penilaian Indeks Desa membangun (IDM)	155
Tabel 2.2.11	Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Tahun 2024.....	181
Tabel 4.1.1	Perkembangan Jumlah Lembaga Pendidikan Dan Jumlah Guru Tahun 2020-2024.....	212
Tabel 4.1.2	Target SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Jember	214
Tabel 4.1.3	Realisasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Jember	219
Tabel 4.1.4	Realisasi Pelayanan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Jember	219
Tabel 4.1.5	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Jember	223
Tabel 4.1.6	Dukungan Personil pada bidang Pendidikan Kabupaten Jember 2024	224
Tabel 4.1.7	Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Jember	224
Tabel 4.2.1	Target Capaian Urusan Kesehatan Kabupaten Jember ..	235
Tabel 4.2.2	Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	249
Tabel 4.2.3	Realisasi Pelayanan Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	250
Tabel 4.2.4	Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan	268
Tabel 4.2.5	Dukungan Personil pada bidang Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2024	269
Tabel 4.2.6	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	270
Tabel 4.3.1	Target pencapaian SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum	276
Tabel 4.3.2	Realisasi Anggaran SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	280
Tabel 4.3.3	Realisasi Pelayanan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	280

Tabel 4.3.4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Jember Tahun 2024.....	284
Tabel 4.3.5	Dukungan Personil pada Bidang Pekerjaan Umum dalam SPM Kabupaten Jember Tahun 2024.....	284
Tabel 4.3.6	Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	285
Tabel 4.4.1	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jember Tahun 2024.....	286
Tabel 4.4.2	Realisasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jember Tahun 2024.....	287
Tabel 4.4.3	Realisasi Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jember Tahun 2024.....	288
Tabel 4.4.4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jember Tahun 2024.....	289
Tabel 4.4.5	Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jember Tahun 2024	289
Tabel 4.4.6	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jember Tahun 2024	290
Tabel 4.5.1	Target Pencapaian Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jember Tahun 2024.....	292
Tabel 4.5.2	Realisasi Anggaran Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jember Tahun 2024	296
Tabel 4.5.3	Realisasi Pelayanan Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jember Tahun 2024.....	297
Tabel 4.5.4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jember Tahun 2024.....	303
Tabel 4.5.5	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jember Tahun 2024.....	303
Tabel 4.5.6	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jember Tahun 2024.....	304
Tabel 4.6.1	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024.....	306
Tabel 4.6.2	Realisasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024.....	312
Tabel 4.6.3	Realisasi Pelayanan Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	313
Tabel 4.6.4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024	320

Tabel 4.6.5	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024.....	320
Tabel 4.6.6	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024.....	321
Tabel 4.7.1	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2024	322
Tabel 4.7.2	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2024	331
Tabel 4.7.3	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Jember Tahun 2024	332
Tabel 4.7.4	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Jember Tahun 2024	333
Tabel 4.7.5	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jember Tahun 2024	334
Tabel 4.7.6	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024	335

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.1	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2010-2024.....	59
Grafik 2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024.....	62
Grafik 2.1.3	PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember ADHK dan ADHB Tahun 2018-2023 (dalam Miliar Rupiah)	64
Grafik 2.1.4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Ribu Rp)	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1.1 Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2022 – 2026	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

A. Undang-undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Jember diresmikan berdasar pada Saatsbald Nomor 322 pada tanggal 9 Agustus 1928, dengan tanggal efektif peraturan tersebut adalah 1 Januari 1929. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 mengenai Pemerintahan Daerah Kabupaten di Wilayah Jawa Timur, terdapat pengesahan pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah (Perda), dimana salah satunya adalah penetapan Daerah Kabupaten Jember menjadi Kabupaten Jember.

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Jember secara administratif merupakan bagian timur dari Provinsi Jawa Timur dan terletak $\pm$ 200 km dari arah timur Kota Surabaya. Secara administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu:

Batas Utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo

Batas Barat : Kabupaten Lumajang

Batas Timur : Kabupaten Banyuwangi

Batas Selatan : Samudera Indonesia

Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro membentang ke arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Jember dahulu merupakan kota administratif, namun sejak tahun 2001 istilah kota administratif dihapus, sehingga Kota Administratif Jember kembali menjadi bagian



dari Kabupaten Jember. Kabupaten Jember secara astronomis terletak 113°30' – 113°45' Bujur Timur dan 8°00' – 8°30' Lintang Selatan. Jember merupakan pusat regional di kawasan timur daerah tapal kuda.

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada 7059'6"—8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28"—114003'42" Bujur Timur. Meliputi wilayah seluas 3.293,34 km², Kabupaten Jember memiliki karakter topografi berupa dataran ngarai yang subur di bagian tengah dan selatan yang dikelilingi oleh pegunungan yang memanjang sepanjang batas barat dan timur. Ada sekitar 82 pulau di Kabupaten Jember dan pulau terbesar adalah Nusa Barong. Kabupaten Jember berada pada ketinggian berkisar antara 0 – 3.300 meter di atas permukaan laut. Bagian terbesar dari daerah ini berada antara 100 sampai 500 m di atas permukaan laut (37,75%), sisanya 17,95% antara 0 sampai 25m, 20,70% antara 25 sampai 100m, 15,80% antara 500 sampai 1000 m di atas permukaan laut dan 7,80 % lebih dari 1000 m. Di wilayah barat daya terdapat dataran dengan ketinggian 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Jember memiliki luar wilayah 3.293,34 km² atau 329.333,94 Ha dengan luar wilayah yang telah bersertifikat HGB 149,80 km² dan HPL 0,01 km². Secara administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, 226 desa dan 22 kelurahan. Adapun perincian luas wilayah menurut kecamatan beserta jumlah desa/kelurahan dan jumlah dusun/lingkungan di setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.1
Data Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Dusun Menurut Kecamatan se-Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah	
		(Km ²)	Desa/Kelurahan	Dusun/Lingkungan
1	Jombang	54,30	6	17
2	Kencong	65,92	5	24
3	Sumberbaru	166,37	10	36
4	Gumukmas	82,98	8	24

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah	
		(Km ²)	Desa/Kelurahan	Dusun/Lingkungan
5	Umbulsari	70,51	10	28
6	Tanggul	199,99	8	24
7	Semboro	45,43	6	14
8	Puger	148,99	12	37
9	Bangsalsari	175,28	11	41
10	Balung	47,12	8	27
11	Wuluhan	137,18	7	25
12	Ambulu	104,56	7	27
13	Rambipuji	52,80	8	42
14	Panti	160,71	7	29
15	Sukorambi	60,63	5	16
16	Jenggawah	51,02	8	36
17	Ajung	56,61	7	35
18	Tempurejo	524,46	8	29
19	Arjasa	43,75	6	26
20	Mumbulsari	95,13	7	26
21	Pakusari	29,11	7	26
22	Jelbuk	65,06	6	42
23	Mayang	63,78	7	24
24	Kalisat	53,48	12	53
25	Ledokombo	146,92	10	39
26	Sukowono	44,04	12	27
27	Silo	309,98	9	41
28	Sumberjambe	138,24	9	58
29	Sumbersari	37,05	7	32
30	Kaliwates	24,94	7	33
31	Patrang	36,99	8	38
JUMLAH		3293,34	248	976

Sumber: BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2024)

Beberapa wilayah di Kabupaten Jember, seperti Kencong, Ajung, Balung, Umbulsari, Jombang, dan Sumbersari, memiliki topografi yang cenderung rata dengan kemiringan antara 0 hingga 2 derajat. Sementara itu, sekitar 70% area Kecamatan Tempurejo, yang mencakup 365,48 km², merupakan kawasan pegunungan dengan kemiringan yang rata-rata melebihi 40 derajat. Selain itu, terdapat juga beberapa kecamatan lain dengan ketinggian wilayah yang beragam.

Kabupaten Jember memiliki variasi ketinggian dari 0 hingga 3.300 meter di atas permukaan laut. Mayoritas daerahnya,



yakni 37,75%, terletak pada ketinggian 100 sampai 500 meter. Sedangkan 17,95% dari wilayahnya berada pada ketinggian 0 hingga 25 meter, 20,70% antara 25 hingga 100 meter, 15,80% pada rentang 500 hingga 1.000 meter, dan 7,80% berada di atas ketinggian 1.000 meter. Bagian barat daya Kabupaten Jember menampilkan dataran rendah dengan ketinggian 0-25 meter, sementara bagian timur laut yang berdekatan dengan Bondowoso dan bagian tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki daerah-daerah yang ketinggiannya melebihi 1.000 meter di atas permukaan laut.

C. Informasi Umum Data Kependudukan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2024 adalah sebesar 2.615.874 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,74%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Jember lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan yaitu sebesar 1.306.216 jiwa penduduk laki-laki dan 1.309.658 jiwa penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Jember pada tahun 2024 mencapai 794.29 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kaliwates sebesar 5,120.33 jiwa/km² dan terendah berada di Kecamatan Tempurejosebesar 156.59 jiwa/km². Pada Tahun 2024 Penduduk Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan sebesar 0.58% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jombang	28,249	27,992	56,241
2	Kencong	35,478	35,677	71,155
3	Sumberbaru	57,925	58,434	116,359
4	Gumukmas	45,601	44,654	90,255
5	Umbulsari	39,763	39,648	79,411
6	Tanggul	46,856	47,313	94,169
7	Semboro	24,956	25,055	50,011
8	Puger	64,004	62,656	126,660



No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
9	Bangsalsari	64,318	64,430	128,748
10	Balung	42,489	42,260	84,749
11	Wuluhan	65,815	63,599	129,414
12	Ambulu	61,304	60,178	121,482
13	Rambipuji	44,486	44,198	88,684
14	Panti	33,472	34,182	67,654
15	Sukorambi	21,272	21,657	42,929
16	Jenggawah	46,293	45,535	91,828
17	Ajung	43,312	42,721	86,033
18	Tempurejo	41,268	40,858	82,126
19	Arjasa	62,994	64,707	127,701
20	Mumbulsari	51,459	52,463	103,922
21	Pakusari	68,174	69,618	137,792
22	Jelbuk	21,435	21,851	43,286
23	Mayang	35,235	35,238	70,473
24	Kalisat	23,237	23,894	47,131
25	Ledokombo	16,918	17,020	33,938
26	Sukowono	26,155	26,685	52,840
27	Silo	39,833	40,838	80,671
28	Sumberjambe	34,874	35,685	70,559
29	Sumbersari	30,759	31,739	62,498
30	Kaliwates	56,096	55,947	112,043
31	Patrang	32,186	32,926	65,112
JUMLAH		1,306,216	1,309,658	2,615,874

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember, 2025

D. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Struktur dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, terdapat total 69 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jember ditambah dengan 3 Rumah Sakit Daerah yang terdiri atas:

- a. 8 (delapan) Bagian Sekretariat Daerah;
- b. 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. 1 (satu) Inspektorat;
- d. 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. 21 (dua puluh satu) Dinas;



- f. 6 (enam) Badan; dan
- g. 31 (tiga puluh satu) Kecamatan yang terdiri dari 248 desa/kelurahan yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kelurahan dan 226 (dua ratus dua puluh enam) desa.

Selengkapnya persebaran desa dan kelurahan pada 31 (tiga puluh satu) kecamatan terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1.3
Jumlah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jember

1	AJUNG (7)	9	JOMBANG (6)	17	PANTI (7)	184	Sukerejo	246	Tamansari
1	Ajung	62	Wringinagung	123	Panti	185	Pocangan	247	Lojejer
2	Klompangan	63	Jombang	124	Glagahwero	186	Mojogemi	248	Tanjungrejo
3	Mangaran	64	Keting	125	Kemuningsarilor	187	Dawuhanmangli		
4	Pancakarya	65	Ngampelrejo	126	Pakis	188	Baletbaru		
5	Rowo Indah	66	Padomasan	127	Serut	189	Arjasa		
6	Sukamakmur	67	Sarimulyo	128	Suci	25	SUMBERBARU (10)		
7	Wirowongso	10	KALISAT (12)	129	Kemiri	190	Sumberagung		
2	AMBULU (7)	68	Sebanen	18	PATRANG (8)	191	Gelang		
8	Ambulu	69	Sumberketempa	130	Kel. Banjar Sengon	192	Jamintoro		
9	Andongsari	70	Gambiran	131	Kel. Baratan	193	Karangbayat		
10	Karanganyar	71	Plalangan	132	Kel. Bintoro	194	Pringgowirawan		
11	Pontang	72	Ajung	133	Kel. Gebang	195	Rowotengah		
12	Sabrang	73	Kalisat	134	Kel. Jember Lor	196	Yosorati		
13	Sumberejo	74	Glagahwero	135	Kel. Jumerto	197	Jambesari		
14	Tegalsari	75	Sumberjeruk	136	Kel. Patrang	198	Jatiroto		
3	ARJASA	76	Sumberkalong	137	Kel. Slawu	199	Kaliglagah		
15	Arjasa	77	Patempuran	19	PUGER (12)	26	SUMBERJAMBE (9)		
16	Biting	78	Sukoreno	138	Pugerwetan	200	Rowosari		
17	Candijati	79	Gumuksari	139	Grenden	201	Jambearum		
18	Darsono	11	KALIWATES (7)	140	Jambearum	202	Gunungmalang		
19	Kamal	80	Kel. Jember Kidul	141	Wonosari	203	sumberjambe		
20	Kemuninglor	81	Kel. Kaliwates	142	Kasiyan Timur	204	Cumedak		
4	BALUNG (8)	82	Kel. Kebon Agung	143	Bagon	205	Randuagung		
21	Balung Kidul	83	Kel. Kepatihan	144	Kasyan	206	Pringgondani		
22	Balung Kulon	84	Kel. Mangli	145	Wringintelu	207	Sumberpakem		
23	Balung Lor	85	Kel. Sempusari	146	Pugerkulon	208	Plerean		
24	Curahlele	86	Kel. Tegal Besar	147	Mojosari	27	SUMBERSARI (7)		
25	Gumelar	12	KENCONG (5)	148	Mojomulyo	209	Kel. Antirogo		
26	Karangduren	87	Cakru	149	Mlokorejo	210	Kel. Karangrejo		
27	Karangasem	88	Kraton	20	RAMBIPUJI (8)	211	Kel. Kebonsari		
28	Tutul	89	Paseban	150	Curahmalang	212	Kel. Kranjingan		

5	BANGSALSARI (11)	90	Wonorejo	151	Nogosari	213	Kel. Sumpersari		
29	Badean	91	Kencong	152	Pecoro	214	Kel. Tegal Gede		
30	Bangsalsari	13	LEDOKOMBO (10)	153	Rambigundam	215	Kel. Wirolegi		
31	Banjarsari	92	Sumberbulus	154	Gugut	28	TANGGUL (8)		
32	Curahkalong	93	Slateng	155	Kaliwining	216	Manggisan		
33	Gambirono	94	Sumberlesung	156	Rambipuji	217	Darungan		
34	Karangsono	95	Ledokombo	157	Rowotamtu	218	Klatakan		
35	Langkap	96	Sukogidri	21	SEMBORO (6)	219	Krama Sukoharjo		
36	Petung	97	Sumberanget	158	Pondokjoyo	220	Selodakon		
37	Sukorejo	98	Karangpaiton	159	Rejoagung	221	Tanggulkulon		
38	Tisnogambar	99	Suren	160	Sidomekar	222	Tanggulwetan		
39	Tugusari	100	Lembengan	161	Sidomulyo	223	Patemon		
6	GUMUKMAS	101	Sumbersalak	162	Pondokdalem	29	TEMPUREJO (8)		
40	Bagorejo	14	MAYANG (7)	163	Semboro	224	Sanenrejo		
41	Gumukmas	102	Sidomukti	22	SILO (9)	225	Curahakir		
42	Karangrejo	103	Sumberkejayan	164	Harjomulyo	226	Curahnongko		
43	Kepanjen	104	Mrawan	165	Karangharjo	227	Wonosari		
44	Mayangan	105	Seputih	166	Pace	228	Pondokrejo		
45	Menampu	106	Tegalrejo	167	Sempolan	229	Andongrejo		
46	Purwoasri	107	Tegalwaru	168	Garahan	230	Tempurejo		
47	Tembokrejo	108	Mayang	169	Mulyorejo	231	Sidodadi		
7	JELBUK (6)	15	MUMBULSARI (7)	170	Sidomulyo	30	UMBULSARI (10)		
48	Jelbuk	109	Kawangrejo	171	Silo	232	Gadingrejo		
49	Panduman	110	Lengkong	172	Sumberjati	233	Mundurejo		
50	Sucopangepok	111	Suco	23	SUKORAMBI (5)	234	Paleran		
51	Sugerkidul	112	Karang Kedawung	173	Dukuhmencek	235	Tegalwangi		
52	Sukojember	113	Lampeji	174	Jubung	236	Umbulsari		
53	Sukowiryo	114	Mumbulsari	175	Karangpring	237	Gunungsari		
8	JENGGAH (8)	115	Tamansari	176	Klungkung	238	Sidorejo		
54	Wonojati	16	PAKUSARI (7)	177	Sukorambi	239	Sukoreno		
55	Sruni	116	Pakusari	24	SUKOWONO (12)	240	Tanjungsari		
56	Kertonegoro	117	Jatian	178	Sumberwringin	241	Umbulrejo		
57	Jenggawah	118	Kertosari	179	Sumberwaru	31	WULUHAN (7)		
58	Jatisari	119	Subo	180	Sumberdanti	242	Ampel		
59	Jatimulyo	120	Sumberpinang	181	Sukowono	243	Dukumdempok		
60	Cangkring	121	Bedadung	182	Sukosari	244	Glundengan		
61	Kemuningsari Kidul	122	Patemon	183	Sukorerto	245	Kesilir		

Adapun rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember beserta dasar hukum pembentukannya adalah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.1.4
Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Inspektorat	Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Peraturan Bupati Jember Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
5	Badan Pendapatan Daerah	Peraturan Bupati Jember Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB	Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
10	Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air	Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
12	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
13	Dinas Sosial	Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember
14	Dinas Pendidikan	Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
15	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember
21	Dinas Perikanan	Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Peraturan Bupati Jember Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember
23	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
24	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember



No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
25	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember
28	Sekretariat DPRD	Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jember
29	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember
30	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
31	RSD Balung	Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Balung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
32	RSD Kalisat	Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Kalisat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
33	RSD Dr. Soebandi	Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
34	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
35	Kecamatan	Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember
36	Kelurahan	Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Jember

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, 2025



E. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas utama dan fungsi perangkat daerah, diperlukan adanya dukungan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan public, kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan tertentu. Total jumlah pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Jember mencapai 12.474 orang dengan rincian per urusan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1.5
Rincian Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja	Urusan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Dinas Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	11	7462	206	7679
2	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	11	1447	81	1539
3	RSD Balung		13	140	15	168
4	RSD Dr. Soebandi		9	356	147	512
5	RSD Kalisat		10	111	5	126
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9	21	311	341
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	8	11	66	85
		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	18	19	86	123
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta	7	3	10	20

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja	Urusan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
		Perlindungan Masyarakat				
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	6	9	20
11	Dinas Sosial	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	8	10	6	24
12	Dinas Tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	7	5	11	23
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	11	11	27
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	9	19	14	42
15	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	9	9	195	213
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	3	7	6	16
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	8	10	25
18	Dinas Perhubungan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	20	8	31	59
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	9	9	8	26
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	10	7	25
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	3	5	4	12
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	6	6	6	18
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	7	9	16	32
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	4	5	5	14
		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				



No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja	Urusan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
25	Dinas Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	4	6	23	33
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	8	164	38	210
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	8	9	64	81
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
28	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Bidang Sekretariat Daerah	15	29	95	139
29	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Sekretariat DPRD	5	7	19	31
30	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Bidang Perencanaan	8	10	13	31
		Unsur Penunjang Bidang Penelitian Dan Pengembangan				
31	Badan Pendapatan Daerah	Unsur Penunjang Bidang Keuangan	14	6	75	95
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Unsur Penunjang Bidang Keuangan	12	6	20	38
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sdm	Unsur Penunjang Bidang Kepegawaian	8	9	30	47
		Unsur Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan				
34	Inspektorat	Unsur Penunjang Bidang Inspektorat Daerah	6	26	11	43
35	Kecamatan	Unsur Kewilayahan Kecamatan	280		277	557

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Jember, 2025

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 teralokasikan anggaran belanja sebesar Rp4.372.730.733.767,00 dengan proporsi belanja sebesar 78,68% merupakan Belanja Operasi atau sebesar Rp3.440.620.529.517,98. Belanja Tidak Terduga sebesar 0,39% atau Rp16.884.125.188,02, Belanja Modal sebesar 8,68% atau sebesar Rp379.707.511.752,00 dan Belanja Transfer dengan proporsi sebesar



12,25% atau sebesar Rp535.518.567.309,00. Realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.780.631.341.460,14 atau 87,56% dari pagu anggaran. Realisasi Belanja Barang Tidak Terduga sebesar Rp1.262.026.421,00 atau 7,47% dari pagu anggaran. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp270.520.643.532,00 atau 71,26% dari pagu dan Belanja Transfer sebesar 99.76% atau Rp534.229.222.509,00 dari pagu.

Tabel 1.1.6
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Jember
Tahun 2024

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
I	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Asli Daerah	928.680.252.910,00	774.166.239.209,47
2	Pendapatan Transfer	3.289.862.338.821,00	3.354.927.679.786,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	4.218.542.591.731,00	4.129.093.918.995,47
II	BELANJA DAERAH		
1	Belanja Operasi	3.440.620.529.517,98	3.022.638.246.071,57
2	Belanja Modal	379.707.511.752,00	270.584.046.196,00
3	Belanja Tidak Terduga	16.884.125.188,02	1.262.026.421,00
4	Belanja Transfer	535.518.567.309,00	534.229.222.509,00
	Jumlah Belanja	4.372.730.733.767,00	3.828.713.541.197,57
III	PEMBIAYAAN		
1	Penerimaan Pembiayaan	169.188.142.036,00	276.618.929.576,86
	Pembiayaan Netto	154.188.142.036,00	15.000.000.000,00

Sumber: *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jember, periode 31 Desember 2024 (unaudited), 2025*

Selanjutnya untuk realisasi anggaran Kabupaten Jember Tahun 2024 per urusan dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 1.1.7
Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten
Jember Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.818.347.016.751,00	2.513.597.773.752,89
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.418.064.718.066,00	1.281.226.044.913,86
3	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	910.815.303.231,00	821.124.969.919,03
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	273.881.332.911,00	227.486.363.460,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	109.818.182.816,00	97.482.626.745,00
6	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	47.843.868.613,00	35.582.212.436,00
7	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	57.923.611.114,00	50.695.556.279,00
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	212.768.802.133,00	182.284.708.949,68
9	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	15.090.048.490,00	11.829.366.687,00
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.652.743.213,00	6.886.248.667,00
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.149.160.125,00	142.443.250,00
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	86.929.230,00	85.976.084,00
13	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	34.256.351.894,00	33.188.091.556,00
14	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.834.222.823,00	8.594.655.924,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi
15	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15.673.409.467,00	13.283.391.809,00
16	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	24.220.619.889,00	22.845.627.065,00
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	26.704.551.555,00	23.963.479.390,00
18	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	24.189.602.990,00	20.672.124.575,00
19	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	10.124.418.541,00	8.163.384.097,00
20	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6.960.136.593,00	4.696.237.868,00
21	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	29.145.295.285,00	21.688.016.490,68
22	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	63.400.000,00	61.748.000,00
23	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	55.718.300,00	45.597.940,00
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.509.543.000,00	2.260.852.813,00
25	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	4.918.194.538,00	3.814.586.734,00
26	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	134.456.200,00	62.880.000,00
C	Urusan Pemerintahan Pilihan	125.129.151.167,00	86.625.511.499,00
28	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	9.866.537.304,00	8.477.267.467,00
29	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	15.972.407.593,00	15.129.358.357,00
30	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	75.477.617.039,00	42.708.966.751,00
31	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	19.809.001.949,00	17.778.394.839,00
32	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	4.003.587.282,00	2.531.524.085,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi
C	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	213.037.457.742,00	165.511.325.998,00
D	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	160.544.657.200,00	89.124.334.155,00
E	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	15.966.816.537,00	12.833.468.097,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jember, periode 31 Desember 2024 (unaudited), 2025

G. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan diimplementasikan melalui pembiayaan program dengan anggaran dan realisasi yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.1.8
Alokasi dan Realisasi Belanja per Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.818.347.016.751,00	2.513.597.773.752,89
A	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.418.064.718.066,00	1.281.226.044.913,86
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	880.173.720.219,00	789.417.951.565,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	444.018.972.747,00	414.625.007.478,86
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	93.872.025.100,00	77.183.085.870,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
B	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	910.815.303.231,00	821.124.969.919,03
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	159.990.038.308,00	152.333.743.325,00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	224.493.739.543,00	198.637.193.542,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.247.897.990,00	9.884.133.225,00
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	405.198.200,00	306.042.500,00
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	51.237.473.600,00	48.795.298.951,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.794.674.541,00	1.718.839.187,00
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	580.184.016,00	1.091.864.444,00
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.397.652.979,00	1.120.928.916,00
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	882.631.542,00	1.154.514.410,00
	Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.913.201.454,00	2.355.917.821,00
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.312.370.627,00	1.386.974.638,00
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.641.360.989,00	2.640.568.446,00
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.402.233.364,00	1.402.221.590,00
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.469.051.682,00	2.408.838.300,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	912.474.343,00	912.314.537,20
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	720.042.261,00	711.032.746,00
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.430.802.360,00	2.430.253.078,00
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.162.024.283,00	1.159.359.783,00
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.776.773.043,00	2.065.464.354,00
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.149.204.571,00	2.128.427.393,00
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.309.806.760,00	2.309.500.776,00
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.273.191.237,00	3.056.005.329,00
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.735.398.642,00	1.884.877.379,00
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	937.134.646,00	887.791.584,00
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.776.961.936,00	2.979.173.821,00
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	891.963.143,00	1.215.573.672,00
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.981.810.758,00	1.928.508.335,00
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.799.900.440,00	1.796.417.107,00
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	612.014.391,00	728.462.813,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.880.603.725,00	2.109.753.852,00
31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.091.373.188,00	1.279.911.842,00
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.613.601.665,00	1.584.985.844,00
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.279.654.847,00	1.283.852.746,00
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.337.948.379,00	3.017.551.262,00
35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.525.303.455,00	1.596.664.567,00
36	Program Penunjang Urusan	2.946.701.332,00	2.678.461.524,00
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.001.657.963,00	1.583.103.196,00
38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.405.299.355,00	3.287.675.728,00
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.178.814.120,00	1.426.211.473,00
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.040.036.818,00	2.927.803.245,00
41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.696.956.129,00	1.696.938.473,00
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.116.482.416,00	2.116.305.596,00
43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.990.158.491,00	1.725.531.380,00
44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.123.163.377,00	3.808.290.703,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.770.402.483,00	3.691.572.859,00
46	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.339.225.821,00	3.480.179.818,00
47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.879.603.205,00	3.644.332.541,00
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.609.243.504,00	1.780.534.746,00
49	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.385.856.658,00	1.529.280.817,00
	Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	815.543.122,00	1.179.433.633,00
51	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	882.481.509,00	871.567.188,00
52	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.225.542.482,00	2.223.788.690,00
53	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	690.112.902,00	633.450.090,00
54	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.026.947.518,00	1.967.862.629,00
55	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.402.670.118,00	1.240.177.334,00
56	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79.490.880.000,00	61.484.732.663,01
57	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	246.600.000.000,00	222.291.985.703,82
58	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.231.827.000,00	31.552.787.774,00
C	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	273.881.332.911,00	227.486.363.460,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.508.243.038,00	41.128.046.418,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	10.143.004.700,00	8.696.342.057,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	14.883.843.276,00	12.896.246.321,00
4	Program Penyelenggaraan Jalan	105.206.720.029,00	80.626.321.300,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.580.347.272,00	59.903.566.512,00
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.880.323.656,00	7.566.484.586,00
7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.566.928.170,00	7.976.440.025,00
8	Program Penataan Bangunan Gedung	12.150.302.000,00	7.806.060.645,00
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	961.620.770,00	886.855.596,00
D	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	109.818.182.816,00	97.482.626.745,00
1	Program Pengembangan Perumahan	500.000.000,00	56.480.000,00
2	Program Kawasan Permukiman	5.470.407.000,00	5.167.320.153,00
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	103.847.775.816,00	92.258.826.592,00
E	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	47.843.868.613,00	35.582.212.436,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.201.727.492,00	17.448.648.665,00
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	13.159.964.050,00	7.048.619.770,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
3	Program Penanggulangan Bencana	56.556.000,00	45.000.000,00
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	456.045.800,00	448.032.124,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.484.896.267,00	6.831.048.163,00
6	Program Penanggulangan Bencana	4.484.679.004,00	3.760.863.714,00
F	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	57.923.611.114,00	50.695.556.279,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.029.033.414,00	7.435.856.526,00
2	Program Pemberdayaan Sosial	820.205.000,00	749.503.800,00
3	Program Rehabilitasi Sosial	2.755.653.000,00	2.355.480.070,00
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	33.101.881.700,00	30.406.874.104,00
5	Program Penanganan Bencana	12.000.000.000,00	9.554.787.779,00
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	216.838.000,00	193.054.000,00
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	212.768.802.133,00	182.284.708.949,68
A	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	15.090.048.490,00	11.829.366.687,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.943.916.291,00	4.660.024.751,00
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	150.000.000,00	99.850.000,00
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.765.494.000,00	3.541.247.600,00
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.869.125.199,00	1.473.738.696,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
5	Program Hubungan Industrial	2.361.513.000,00	2.054.505.640,00
B	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.652.743.213,00	6.886.248.667,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.949.951.513,00	6.305.765.481,00
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	130.051.100,00	124.278.190,00
3	Program Perlindungan Perempuan	220.190.800,00	148.201.481,00
4	Program Perlindungan Khusus Anak	352.549.800,00	308.003.515,00
C	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.149.160.125,00	142.443.250,00
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.090.591.625,00	87.002.750,00
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	49.404.100,00	46.489.000,00
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	9.164.400,00	8.951.500,00
D	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	86.929.230,00	85.976.084,00
1	Program Penatagunaan Tanah	86.929.230,00	85.976.084,00
E	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	34.256.351.894,00	33.188.091.556,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.137.587.594,00	21.387.994.869,00
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	170.603.700,00	88.759.000,00
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	777.821.500,00	715.686.866,00
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya	20.000.000,00	20.000.000,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	203.712.800,00	149.524.200,00
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	225.683.500,00	121.261.800,00
7	Program Pengelolaan Persampahan	10.720.942.800,00	10.704.864.821,00
F	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.834.222.823,00	8.594.655.924,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.931.865.323,00	7.859.977.524,00
2	Program Pendaftaran Penduduk	172.600.000,00	122.392.500,00
3	Program Pencatatan Sipil	135.420.000,00	126.365.000,00
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	336.537.500,00	251.802.500,00
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	257.800.000,00	234.118.400,00
G	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15.673.409.467,00	13.283.391.809,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.076.885.870,00	5.314.986.247,00
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.397.346.077,00	4.842.271.500,00
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	4.199.177.520,00	3.126.134.062,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		
H	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	24.220.619.889,00	22.845.627.065,00
1	Program Pengendalian Penduduk	727.197.500,00	668.928.000,00
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	11.887.419.389,00	10.651.224.274,00
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	11.606.003.000,00	11.525.474.791,00
I	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	26.704.551.555,00	23.963.479.390,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.305.326.355,00	15.353.922.850,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	9.085.342.600,00	8.377.714.440,00
3	Program Pengelolaan Penerbangan	218.882.600,00	140.422.600,00
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	95.000.000,00	91.419.500,00
J	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	24.189.602.990,00	20.672.124.575,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.131.490.690,00	6.278.855.600,00
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	11.616.233.900,00	9.254.829.100,00
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.441.878.400,00	5.138.439.875,00
K	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	10.124.418.541,00	8.163.384.097,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.558.642.141,00	5.811.172.804,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	84.261.000,00	80.196.728,00
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	391.996.000,00	374.923.972,00
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	161.643.500,00	159.791.150,00
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1.875.329.900,00	897.258.277,00
6	Program Pengembangan Umkm	1.052.546.000,00	840.041.166,00
L	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6.960.136.593,00	4.696.237.868,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.498.862.543,00	4.074.545.718,00
2	Program Promosi Penanaman Modal	420.325.550,00	132.900.929,00
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	847.755.500,00	429.007.621,00
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	193.193.000,00	59.783.600,00
M	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	29.145.295.285,00	21.688.016.490,68
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.966.445.844,00	9.534.575.392,68
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.228.050.000,00	6.105.481.700,00
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.849.070.100,00	5.947.928.145,00
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	101.729.341,00	100.031.253,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
N	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	63.400.000,00	61.748.000,00
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	63.400.000,00	61.748.000,00
O	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	55.718.300,00	45.597.940,00
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	55.718.300,00	45.597.940,00
P	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.509.543.000,00	2.260.852.813,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	23.694.550,00
2	Program Pengembangan Kebudayaan	2.079.734.000,00	1.909.149.100,00
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	404.809.000,00	328.009.163,00
Q	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	4.918.194.538,00	3.814.586.734,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.636.795.738,00	3.755.546.734,00
2	Program Pembinaan Perpustakaan	281.398.800,00	59.040.000,00
R	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	134.456.200,00	62.880.000,00
1	Program Pengelolaan Arsip	134.456.200,00	62.880.000,00
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	125.129.151.167,00	86.625.511.499,00
A	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	9.866.537.304,00	8.477.267.467,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.615.994.704,00	6.287.757.267,00
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	157.721.796,00	140.577.200,00
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	292.820.804,00	279.945.000,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.800.000.000,00	1.768.988.000,00
B	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	15.972.407.593,00	15.129.358.357,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.014.482.593,00	8.516.714.747,00
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.176.625.000,00	2.883.446.330,00
3	Program Pemasaran Pariwisata	1.114.940.000,00	1.088.284.190,00
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.666.360.000,00	2.640.913.090,00
C	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	75.477.617.039,00	42.708.966.751,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.460.328.709,00	7.109.992.151,00
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.449.580.000,00	446.524.960,00
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.694.981.800,00	5.554.225.600,00
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.330.973.000,00	2.222.492.681,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.629.283.030,00	25.066.581.725,00
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.970.552.600,00	3.350.000,00
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.371.955.200,00	1.687.114.834,00
8	Program Penyuluhan Pertanian	2.569.962.700,00	618.684.800,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
D	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	19.809.001.949,00	17.778.394.839,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.102.648.349,00	15.381.898.239,00
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.628.413.600,00	1.336.999.100,00
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.030.000.000,00	1.029.097.500,00
4	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	47.940.000,00	30.400.000,00
E	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	4.003.587.282,00	2.531.524.085,00
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4.003.587.282,00	2.531.524.085,00
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	213.037.457.742,00	165.511.325.998,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	9.443.881.094,00
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	1.868.391.792,00
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	0,00	73.486.199,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.531.557.000,00	769.632.618,00
5	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.401.088.000,00	1.752.274.000,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.680.170.000,00	1.526.067.197,00
	Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
7	Program Perekonomian Dan Pembangunan	459.380.000,00	330.333.050,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.444.829.400,00	546.472.116,00
9	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	55.650.070.600,00	38.705.367.400,00
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.636.500.000,00	1.003.876.120,00
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.503.411.000,00	3.141.245.235,00
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.490.984.083,00	32.041.810.666,00
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	941.484.800,00	376.702.677,00
15	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.584.515.500,00	519.143.425,00
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.460.546.640,00	684.603.820,00
17	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	3.225.453.360,00	1.053.368.571,00
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.004.729.000,00	854.942.972,00
19	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.495.271.000,00	1.337.659.130,00
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.566.553.339,00	47.738.354.981,00
21	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	23.960.914.020,00	21.743.712.935,00
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	160.544.657.200,00	89.124.334.155,00
1	Program Penunjang Urusan	8.841.949.954,00	7.122.391.680,00
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.464.209.200,00	2.127.896.063,00
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.438.390.180,00	2.527.591.823,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64.119.629.111,00	25.813.050.852,00
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	6.125.961.383,00	3.902.328.001,00
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.540.942.646,00	3.718.128.908,00
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.229.827.989,00	21.783.121.361,00
8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	160.620.000,00	123.501.000,00
9	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.328.250.420,00	4.972.128.190,00
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.287.164.177,00	13.758.681.651,00
11	Program Kepegawaian Daerah	3.687.102.140,00	2.223.657.065,00
12	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.429.000,00	156.480.877,00
13	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.142.181.000,00	895.376.684,00
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	15.966.816.537,00	12.833.468.097,00
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.514.938.963,00	10.284.148.782,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.397.620.000,00	717.613.406,00
3	Program Perumusan Kebijakan,	1.506.400.000,00	1.301.091.816,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Pendampingan Dan Asistensi		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	547.857.574,00	530.614.093,00
VII	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.659.668.171,00	2.439.865.475,00
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	724.800.000,00	724.800.000,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	82.400.000,00	77.500.000,00
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	248.900.000,00	209.300.000,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.941.063.617,00	2.653.011.709,00
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.041.115.000,00	1.032.500.000,00
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	236.227.800,00	194.582.000,00
7	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	273.664.376,00	244.304.640,00
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.922.682.605,00	2.303.884.022,00
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	388.800.000,00	388.800.000,00
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	84.597.800,00	70.553.000,00
11	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	297.750.000,00	293.150.000,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.912.131.188,00	2.528.526.669,00
13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	624.314.100,00	617.475.000,00
14	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	180.383.100,00	157.590.000,00
15	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	308.025.200,00	275.560.000,00
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.824.572.622,00	2.472.383.469,00
	Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.047.945.000,00	1.033.444.000,00
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	69.481.800,00	63.704.100,00
19	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	356.120.000,00	332.487.990,00
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.941.849.254,00	2.453.399.218,00
21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	751.725.800,00	745.100.000,00
22	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	92.899.400,00	89.862.000,00
23	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	358.562.200,00	347.579.000,00
24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.887.200,00	14.678.400,00
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.865.892.474,00	2.225.892.423,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
26	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	375.104.000,00	367.935.224,00
27	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	227.346.000,00	163.989.100,00
28	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	246.026.000,00	219.230.000,00
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.551.638.544,00	2.207.111.108,00
30	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	819.087.200,00	803.774.000,00
31	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	135.445.000,00	106.307.000,00
32	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	455.544.000,00	380.465.880,00
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.438.236.070,00	2.109.920.586,00
34	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	647.648.800,00	646.745.000,00
35	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	92.533.000,00	75.419.980,00
36	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	418.470.500,00	404.070.000,00
37	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.067.600,00	8.920.000,00
38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.116.155.160,00	2.454.746.326,00
39	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	785.738.000,00	783.752.200,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
40	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	128.269.000,00	70.673.800,00
41	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	386.530.064,00	351.754.428,00
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.859.707.415,00	8.565.259.966,00
43	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.198.659.500,00	3.176.149.155,00
44	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.347.708.550,00	1.309.171.500,00
45	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	525.739.376,00	244.862.728,00
46	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.708.758.498,00	2.064.992.713,00
47	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	778.800.000,00	777.600.000,00
48	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	90.731.200,00	84.909.000,00
49	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	375.177.200,00	319.780.000,00
50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.640.620.771,00	1.910.768.149,00
51	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	705.550.000,00	700.355.000,00
52	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	189.487.800,00	169.940.000,00
53	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	253.860.000,00	246.700.000,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
54	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.690.947.142,00	2.210.823.953,00
55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	560.837.500,00	555.240.000,00
56	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	83.740.000,00	64.820.000,00
57	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	381.537.400,00	352.435.506,00
58	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.350.714.316,00	2.066.264.050,00
59	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	133.427.200,00	124.793.000,00
60	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	349.200.000,00	334.780.000,00
61	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	750.141.600,00	728.761.000,00
62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.306.393.730,00	1.991.924.492,00
63	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	487.440.000,00	482.902.200,00
64	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	206.787.000,00	197.618.600,00
65	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	424.291.700,00	392.144.800,00
66	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.102.229.372,00	11.197.404.791,00
67	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.209.547.000,00	2.185.179.122,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
68	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.246.070.000,00	1.165.752.000,00
69	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	322.811.988,00	190.065.390,00
70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.773.473.128,00	3.200.264.684,00
71	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	49.100.000,00	30.050.000,00
72	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	121.492.000,00	96.348.000,00
73	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	486.277.300,00	444.765.000,00
74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.102.641.963,00	2.954.081.841,00
75	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	856.419.000,00	845.419.000,00
76	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	118.221.300,00	103.595.000,00
77	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	336.130.000,00	292.017.193,00
78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.700.414.981,00	2.407.846.274,00
79	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	609.079.200,00	607.098.480,00
80	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.010.960.000,00	995.650.000,00
81	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	117.500.000,00	100.460.000,00
	Masyarakat Desa Dan Kelurahan	0,00	0,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
82	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	398.182.500,00	360.912.624,00
83	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.696.811.209,00	2.638.716.962,00
84	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	690.664.900,00	685.761.200,00
85	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.998.400,00	8.798.400,00
86	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	70.465.600,00	65.065.600,00
87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.502.204.708,00	2.679.506.019,00
88	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	677.462.000,00	659.100.000,00
89	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	93.903.600,00	32.615.000,00
90	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	92.048.000,00	42.938.000,00
91	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.942.800,00	9.475.000,00
92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.735.450.727,00	2.259.947.592,00
93	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	954.560.000,00	928.420.000,00
94	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	121.050.000,00	100.520.000,00
95	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	391.312.000,00	374.040.000,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
96	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.671.348.455,00	2.352.768.275,00
97	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	728.700.000,00	723.600.000,00
98	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	123.970.100,00	117.550.000,00
99	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	313.337.000,00	282.980.000,00
100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.957.247.054,00	9.909.586.007,00
101	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.900.120.000,00	2.792.350.200,00
102	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.131.302.940,00	51.773.180,00
103	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	271.500.000,00	0,00
104	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.687.296.635,00	3.041.697.095,00
105	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	810.600.000,00	775.000.000,00
106	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	51.639.000,00	48.230.000,00
107	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	129.506.000,00	95.743.000,00
108	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.251.849.751,00	1.836.005.560,00
109	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.274.819.400,00	1.210.833.608,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
110	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	175.640.000,00	147.900.500,00
111	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.175.228.333,00	3.531.608.247,00
112	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	129.364.000,00	77.270.000,00
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	108.886.800,00	32.950.000,00
114	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	192.467.980,00	129.545.769,00
115	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.644.451.972,00	2.371.280.464,00
116	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.055.739.500,00	1.054.300.890,00
117	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	195.022.400,00	155.677.800,00
118	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	319.839.000,00	295.919.000,00
119	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.784.258.531,00	3.334.267.521,00
120	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.600.000,00	3.300.000,00
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	175.450.000,00	161.600.000,00
122	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	349.906.000,00	331.735.000,00
VIII	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.999.216.885,00	4.361.913.066,00



No	Urusan Pemerintahan Daerah/Program Pemerintahan	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.683.370.800,00	1.569.867.900,00
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	91.183.809.853,00	87.314.499.200,00
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	89.741.700,00	0,00
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	568.286.100,00	471.255.250,00
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	14.781.286.400,00	11.396.912.500,00

Sumber: *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jember, periode 31 Desember 2024 (unaudited), 2025*

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Bagian ini menjelaskan permasalahan pembangunan daerah yang berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi OPD. Beberapa permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pemerintah daerah yaitu:

1. Pada Kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan kabupaten terdapat kendala dalam pembebasan tanah yang dimiliki masyarakat, karena harga tanah yang tidak berubah-ubah. pada kegiatan pembangunan/peningkatan jembatan terdapat kendala

dalam pembebasan tanah yang dimiliki masyarakat, karena harga tanah yang tidak berubah-ubah;

2. Terdapat Permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian target program. minimnya OPD yang menyusun SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember disebabkan masih kurangnya pemahaman dan komitmen aparatur terhadap kewajiban penyusunan SOP dan standar pelayanan serta urgensinya dalam pemenuhan tuntutan kualitas pelayanan. namun demikian jumlah SOP dan sp yang dilaporkan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) meningkat cukup signifikan;
3. Permodalan yang belum kondusif bagi pelaku usaha penangkapan ikan di Kabupaten Jember;
4. Untuk Program peningkatan produksi, produktivitas. dan mutu hasil tanaman pangan kegiatan baru bisa dilaksanakan Bulan Juli, perlu pengendalian wereng dan sejenisnya dimulai pada Bulan Januari;
5. Untuk Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura, butuh banyak penyedia bibit karena varietas berbeda jadi tidak bisa di satu penyedia;
6. Kegiatan sekolah lapang pertama tidak terlaksana karena CPCL lokasi sekolah lapang menunggu hasil verval sehingga lewat musim tidak dapat dilaksanakan;
7. Untuk Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan), kendala yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal;
8. Kesadaran masyarakat untuk melakukan budidaya masih kurang dan masih belum optimalnya dukungan sumber daya manusia dalam mengelola program budidaya pada Dinas Perikanan;
9. Untuk Program pengembangan perikanan tangkap permodalan yang belum kondusif bagi pelaku usaha penangkapan ikan di Kabupaten Jember;
10. Untuk Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan kurangnya kesiapan administrasi pendukung temu usaha perikanan;



11. Kesadaran masyarakat nelayan untuk mengasuransikan diri masih rendah;
12. Untuk Program pembinaan lingkungan sosial, kegiatan terhambat karena keterlambatan penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis;
13. Minimnya dana untuk melakukan redesain dan renovasi sarana prasarana pariwisata milik Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Kabupaten Jember belum memiliki taman budaya maupun panggung/gedung kesenian;
15. Terdapat pengurangan frekuensi penerbangan karena kebijakan maskapai;
16. Untuk Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga lokasi beberapa kegiatan yang kurang memenuhi syarat dan tidak sesuai standard nasional;
17. Untuk program pengembangan prestasi olahraga dan pemuda terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan/ dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
18. Untuk Program peningkatan peran serta kepemudaan, pelaksanaan beberapa kegiatan berbenturan waktu dan tempatnya dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember lainnya;
19. Untuk Program pengelolaan keragaman budaya Jember belum memiliki taman budaya maupun panggung/gedung kesenian;
20. Pendanaan untuk lembaga kemasyarakatan islam (BAZNAS, DMI, MUI) berupa kegiatan dengan belanja langsung, sehingga penyerapan tidak optimal. bahwasanya kinerja program telah melebihi target sejumlah 21 kegiatan dan 13 kegiatan dengan total 34 kegiatan;
21. Untuk Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial kegiatan tidak bisa maksimal dilaksanakan dikarenakan adanya kendala teknis;
22. Untuk Program pembinaan penyandang cacat dan trauma, pada kegiatan hdi dan pelatihan ketrampilan terdapat permasalahan pada teknis pelaksanaan kegiatan;



23. Untuk Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak realisasi anggaran kurang maksimal dan kurangnya SDM;
24. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) pelatihan ketrampilan yang kurang maksimal dikarenakan terkendala anggaran yang dibutuhkan; dan
25. Program pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung (pembentukan kota layak anak) sebagian kegiatan menunggu petunjuk pelaksanaan.

Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan langkah optimalisasi Pelayanan Kesehatan dalam rangka mendukung penurunan AKI, AKB dan Penanganan Stunting. Hal ini diperlukan pembinaan dan penguatan kelembagaan serta Posyandu ditingkat desa, kelurahan meliputi penguatan kapasitas kader dalam rangka penurunan AKI AKB.

Dalam penanganan Penurunan stunting telah dilakukan Langkah-langkah :

- Integrasi posyandu aktif dengan PAUD sebagai upaya penguatan pelayanan kesehatan dan bertujuan menjadi garda utama terdepan serta dukungan alat kesehatan dasar.
- Adanya regulasi Program Penanggulangan Stunting
- Melakukan intervensi pada balita stunting usia 0-24 bulan
- Memperbaiki status gizi pada balita stunting usia 24-59 bulan
- Menetapkan Fokus dan lokus Stunting

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan Jember yang ingin diwujudkan pada periode 2022 – 2026 sebagaimana tertuang dalam perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2022 – 2026 adalah:

“Wes Wayahe Mbenahi Jember Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi. Sinergi dan Akselerasi dalam Membangun Jember”

dengan penjelasan sebagai berikut:



a. Wis Wayahe Mbenahi Jember

Wis Wayahe mbenahi Jember dalam bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik, Pertumbuhan ekonomi negatif kenaikan tingkat kemiskinan. rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. wis wayahe!

b. Kolaborasi

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (no-one left behind) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan.

Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren. adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

c. Sinergi

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana pemerintah



Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah. mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan. secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan. semua harus bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan kebersamaan tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih besar.

d. Akselerasi

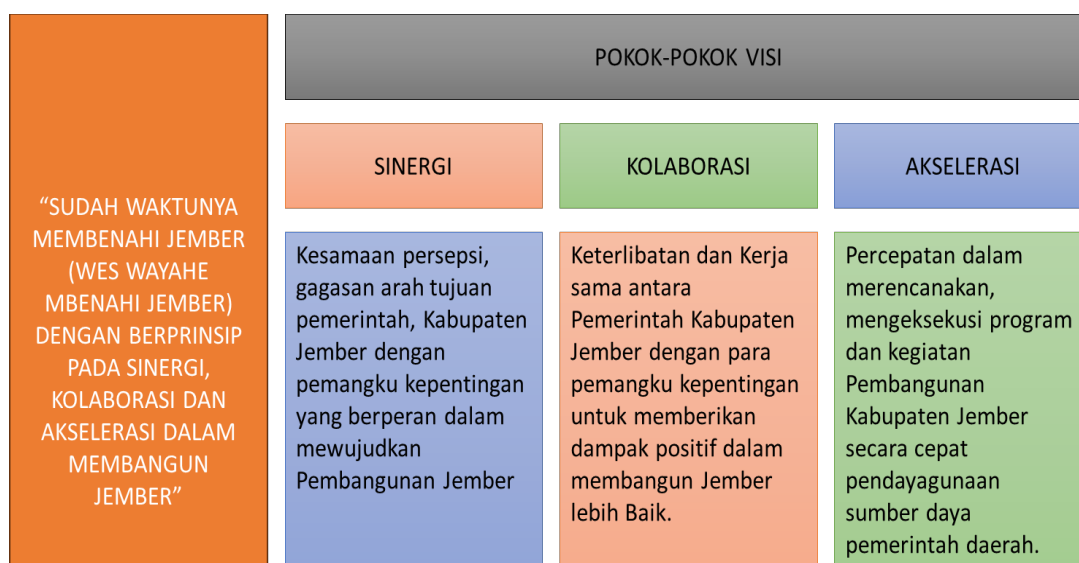
Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat. tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2022 – 2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten



Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perusabahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur. tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemakan pengertiannya. sebagaimana Gambar 1.1.

Bagan 1.1.1
Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2022 – 2026



Rumusan visi RPJMD Kabupaten Jember 2022 – 2026 memiliki keterkaitan dengan visi RPJMD Kabupaten Jember 2005 – 2025. visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024. dan visi RPJP Provinsi Jawa Timur 2000 – 2025. Dalam upaya menjamin konsistensi. sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN dan RPJPD. penjelasan visi harus menggambarkan keterkaitan visi Kabupaten Jember dengan RPJPD Kabupaten Jember 2005 – 2025. RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.9
Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Jember dengan RPJPD
Kabupaten Jember. RPJMD Provinsi Jawa Timur. dan
RPJP Provinsi Jawa Timur

Visi RPJP Jawa Timur 2005 - 2025	Visi RPJMD Jawa Timur 2019 - 2024	Visi RPJPD Kabupaten Jember 2005 - 2025	Visi RPJMD Kabupaten Jember 2022 - 2026
Terwujudnya Jawa Timur sebagai pusat agribisnis terkemuka. berdaya saing global dan berkelanjutan	Terwujudnya Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan gotong royong	Terwujudnya Kabupaten Jember sebagai Daerah Unggulan Agrobisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis Potensi Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Bermartabat	Sudah waktunya membenahi jember (<i>wes wayahe mbenahi jember</i>) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi dan akselerasi dalam membangun jember

Dari tabel 1 di atas dapat dipaparkan bahwa visi RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 memiliki keterkaitan dengan visi RPJP Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024, dan RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025. Keterkaitan di dalamnya adalah membenahi Kabupaten Jember dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka percepatan pembangunan daerah dengan mengedepankan potensi dan sumber daya daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Jember.

Berdasarkan visi pembangunan di atas, dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun ke depan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Misi 1** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua

elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

2. **Misi 2** : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.
3. **Misi 3** : Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.
4. **Misi 4** : Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.
5. **Misi 5** : Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.
6. **Misi 6** : Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.
7. **Misi 7** : Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Mengacu pada visi pembangunan yang telah ditetapkan. untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Jember dalam periode lima tahun mendatang, telah dirumuskan tujuh visi pembangunan yang akan dijadikan pedoman dalam merencanakan program dan aktivitas. Khususnya, misi ketiga dan kelima terkait langsung dengan inisiatif untuk implementasi dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jember. adalah sebagai berikut:

Misi Ketiga : Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi ke-3 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Jember. memastikan tidak ada yang tertinggal. Ini mencakup upaya mengatasi kemiskinan, yang disebabkan oleh faktor struktural dan kultural. melalui strategi yang berfokus pada keluarga atau rumah tangga. Kepala keluarga dengan pendapatan rendah atau



yang hidup di bawah garis kemiskinan akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja. sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ibu rumah tangga dan perempuan yang menjadi kepala keluarga akan menerima pelatihan. akses ke modal dan pasar. serta pendampingan dalam mengelola usaha untuk menunjang ekonomi keluarga. Pemuda yang menganggur atau yang telah di-PHK akan dilatih dan diberi informasi tentang kesempatan kerja. diikutsertakan dalam program kerja intensif. atau dibantu untuk menjadi wirausaha. Anak-anak dari keluarga miskin yang masih bersekolah akan diberikan beasiswa.

Masyarakat yang terpinggirkan secara kultural di dunia kerja. termasuk perempuan dan orang dengan kebutuhan khusus. harus mendapatkan kesempatan kerja yang sama dan adil. Kerja sama dengan lembaga-lembaga komunitas. seperti pondok pesantren dan majelis taklim. diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

Penanganan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2022-2026. dengan tujuan memajukan kesejahteraan secara merata di seluruh area hingga ke level desa. Oleh karena itu. rencana pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. harus selaras dengan perencanaan di tingkat kabupaten. dengan data yang akurat mengenai penduduk miskin. Selain itu. akses masyarakat terhadap sumber makanan bergizi dan terjangkau perlu diperluas. diatur melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Dengan demikian. Misi ke-3 ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs). khususnya dalam aspek penghapusan kemiskinan. penghilangan kelaparan. kesehatan yang baik. pendidikan berkualitas. dan kesetaraan gender. Tujuan utamanya adalah mewujudkan pemenuhan hak dasar manusia secara merata dan adil



untuk semua warga. meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Misi kelima : Meningkatkan pelayanan dasar berupa Kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan mendesak dalam pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Jember sebagaimana tercatat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024. Fokus ini penting untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama pada kelompok usia 5-18 tahun, yang akan menjadi kunci untuk memanfaatkan bonus demografi dan mengurangi rasio ketergantungan di masa depan.

Dalam sektor pendidikan, upaya ditingkatkan untuk memfasilitasi akses bagi anak usia sekolah ke pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar 9 tahun serta pendidikan nonformal. Ini bertujuan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Tantangan belajar secara online selama pandemi COVID-19 dijadikan peluang untuk meningkatkan partisipasi sekolah dengan mengatasi keterbatasan infrastruktur pendidikan. Pentingnya pendidikan madrasah diniyah juga diakui dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Dalam bidang kesehatan, tujuan utamanya adalah meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) dengan mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi stunting di kalangan anak, serta mengatasi penyakit penyebab kematian. Upaya ini melibatkan pembinaan keluarga, pencegahan perkawinan dini, peningkatan akses ke pemeriksaan kesehatan maternal dan dukungan kesehatan untuk anak-anak.

Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat, peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan seperti posyandu dan bidan desa, serta vaksinasi massal untuk mencapai kekebalan



komunitas (*herd immunity*) merupakan langkah-langkah penting untuk mengatasi tantangan pandemi COVID-19 dan memungkinkan pelaksanaan program pembangunan lainnya.

e. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Bagian ini menguraikan program-program utama yang dirancang untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember periode 2021-2026. sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, serta untuk memastikan penyediaan layanan publik dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2024. Rincian nama-nama program dapat dilihat pada lampiran 1.1 yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026.

f. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Aktivitas pembangunan daerah yang dijelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.2. adalah detail dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mencakup rencana kerangka ekonomi lokal, fokus pembangunan daerah, serta agenda kerja dan pembiayaan untuk periode satu tahun. Ini dilakukan dengan menyelaraskan tujuan dan prioritas pembangunan daerah bersama dengan program dari berbagai perangkat daerah sesuai dengan tujuan, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), ada enam bidang urusan pemerintahan yang sebagian besar layanan dasarnya telah diidentifikasi sebagai SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan pengembangan permukiman, keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan



masyarakat, dan bidang sosial. Regulasi ini secara spesifik menetapkan jenis layanan yang termasuk dalam SPM, sementara standar kualitas layanan dasar diatur lebih lanjut oleh menteri terkait di setiap bidang. SPM bertujuan sebagai standar dalam penyelenggaraan layanan dan sebagai alat bagi masyarakat untuk mengontrol performa pemerintah daerah.

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jember merupakan langkah untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melaporkan realisasi SPM setelah penutupan tahun anggaran. Penetapan SPM ditujukan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam konteks globalisasi, dengan menekankan pada prinsip pemerataan dan keadilan dalam pembangunan. Kegiatan pembangunan di tahun 2024 diarahkan sesuai dengan kebijakan strategis, tujuan utama yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, dan mengacu pada visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Untuk mendukung implementasi dan pencapaian SPM, diperlukan anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2024 total anggaran yang dialokasikan oleh Kabupaten Jember untuk SPM adalah Rp480.918.871.527,00 dengan rincian alokasi untuk urusan pendidikan melalui Dinas Pendidikan sebesar Rp444.018.972.747,00, urusan kesehatan melalui Dinas Kesehatan sebesar Rp11.001.100.600,00, urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya masing-masing sebesar Rp11.806.349.026,00 dan Rp500.000.000, urusan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar



Rp8.656.698.154,00 dan urusan sosial melalui Dinas Sosial sebesar Rp4.935.751.000,00.

Fokus pembangunan daerah di Kabupaten Jember untuk tahun 2024 dirancang tidak hanya untuk merealisasikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember, namun juga bertujuan untuk berkontribusi pada pencapaian prioritas nasional, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018. Agenda pembangunan di Kabupaten Jember tahun 2024 ditujukan untuk mendukung empat dari lima agenda prioritas nasional untuk tahun yang sama. meliputi:

1. Pengembangan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar;
2. Pengurangan disparitas antar daerah dengan memperkuat konektivitas dan sektor kemaritiman;
3. Meningkatkan nilai ekonomi dalam sektor pertanian, industri, dan jasa yang produktif;
4. Mengokohkan ketahanan nasional di bidang energi, pangan, dan air sebagai kebutuhan dasar masyarakat untuk mendukung semua kegiatan sehari-hari.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan.

Indikator kinerja makro sangat penting untuk mengukur efisiensi, efektivitas dan dampak dari kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi terhadap indikator kinerja makro digunakan untuk memahami keberhasilan atau kegagalan strategi pembangunan, menetapkan prioritas, dan membuat kebijakan yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Capaian indikator kinerja makro Kabupaten Jember Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Jember Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,42	70,93	0,72	-
2	Angka Kemiskinan	9,51	9,01	-5,25	-
3	Angka Pengangguran	4,01	3,23	-19,45	-
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,93	4,86	-1,41	-
5	Pendapatan per Kapita	36.836.810	39.464.300	7,13	-



No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)	Ket
1	2	3	4	5	6
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,344	0,321	-6,68	-

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember*

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator statistik yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 sebagai alat untuk menilai pembangunan manusia dengan cara yang lebih holistik daripada sekadar menggunakan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran tunggal.

IPM menggabungkan tiga dimensi utama pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH), hal ini mencerminkan kualitas dan harapan hidup penduduk suatu wilayah. Dimensi pengetahuan diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), hal ini mencerminkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Sedangkan dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Semakin tinggi pengeluaran per kapita berarti semakin banyak sumber daya yang tersedia bagi individu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Tabel 2.1.2
Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Jember menurut
Dimensi Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,44	73,53	73,79	74,02	74,17
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,42	13,43	13,44	13,49	13,50
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,48	6,49	6,50	6,52	6,54
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	9294	9410	9840	10.277	10.700
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		69,01	69,20	69,80	70,42	70,93

Melihat pada tabel di atas bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember menurut Dimensi/Indikatornya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pembangunan manusia di Jember terus mengalami kemajuan. Mulai tahun 2023, status pembangunan manusia Jember sudah berada di level "tinggi". Selama 2020-2024, IPM Jember rata-rata meningkat sebesar 0,48 persen per tahun, dari 69,01 pada tahun 2020 menjadi 70,93 pada tahun 2024.

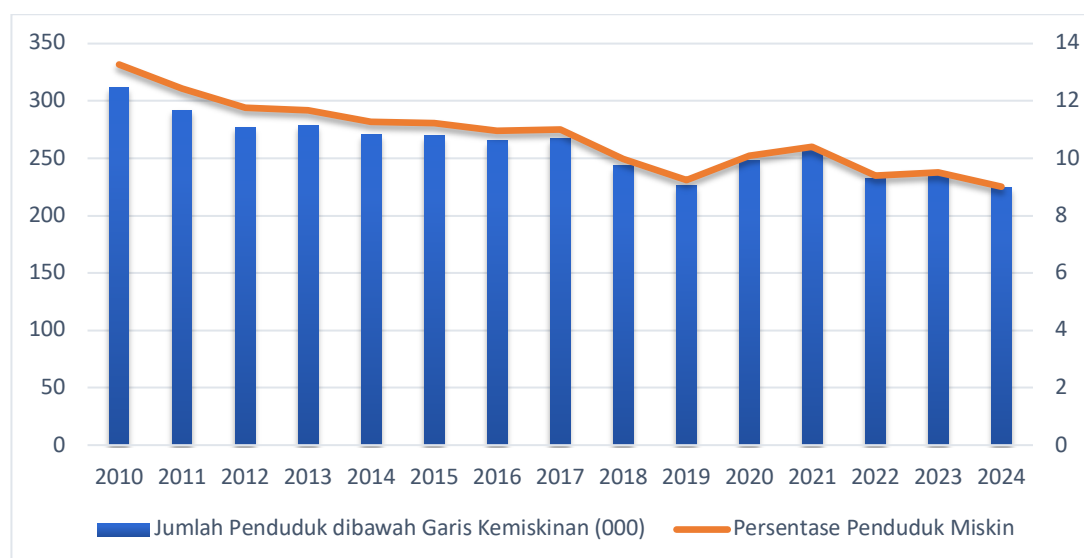
Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Pengeluaran per Kapita yaitu meningkat sebesar 4,23 persen dibandingkan tahun 2023. Harapan Lama Sekolah (HLS) hanya meningkat sebesar 0,01 persen dibanding tahun sebelumnya, demikian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) hanya tumbuh sebesar 0,02 persen di tahun 2024. Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2024 sebesar 74,17 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 74,02 persen.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan sendiri merupakan nilai yang harus dipenuhi oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, serta kebutuhan non pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek lainnya

Angka kemiskinan Kabupaten Jember menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, namun secara umum pada periode 2010-2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember cenderung menunjukkan penurunan.

Grafik 2.1.1
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2010-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Sebagai dampak pandemi Covid 19 yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, terjadi peningkatan jumlah dan

persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember pada tahun 2020-2021 dan pada tahun 2022 terjadi penurunan. Namun demikian pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Secara detail gambaran angka kemiskinan di Kabupaten Jember dapat dilihat pada profil kemiskinan dibawah ini:

Tabel 2.1.3
Profil Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2020	365.295,-	247.990	10,09
2021	380.397,-	257.090	10,41
2022	400.961,-	232.730	9,39
2023	441.171,-	236.460	9,51
2024	459.043,-	224.770	9,01

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Jember 2024

Penurunan angka kemiskinan selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 tidak selaras dengan nilai garis kemiskinan yang mengalami tren peningkatan hingga tahun 2024. Namun perlu dicatat bahwa nilai garis kemiskinan tidak statis dari tahun ke tahun, melainkan dapat berubah seiring dengan evolusi tren kebutuhan hidup dan peningkatan harga barang yang terkait dengan inflasi. Nilai garis kemiskinan tahun 2024 adalah sebesar Rp 459,043,- per kapita perbulan. Dibandingkan tahun 2023 Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp 17.872,00 per kapita per bulan.

Masalah kemiskinan, sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja. Namun ukuran lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman serta keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Upaya kebijakan pembangunan terutama yang bertujuan memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode 2023-2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Jember mengalami penurunan nilai di



sebesar 0,16 poin menjadi 1,01 pada tahun 2024. Untuk Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2) di tahun 2024 juga mengalami penurunan 0,04 poin yaitu menjadi 0,18.

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember telah menjadi fokus perhatian pemerintah dan berbagai instansi terkait. Dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem, pemerintah Kabupaten Jember telah mengadakan berbagai kegiatan koordinasi dan strategi untuk mengurangi tingkat kemiskinan, diantaranya adalah Rapat Koordinasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

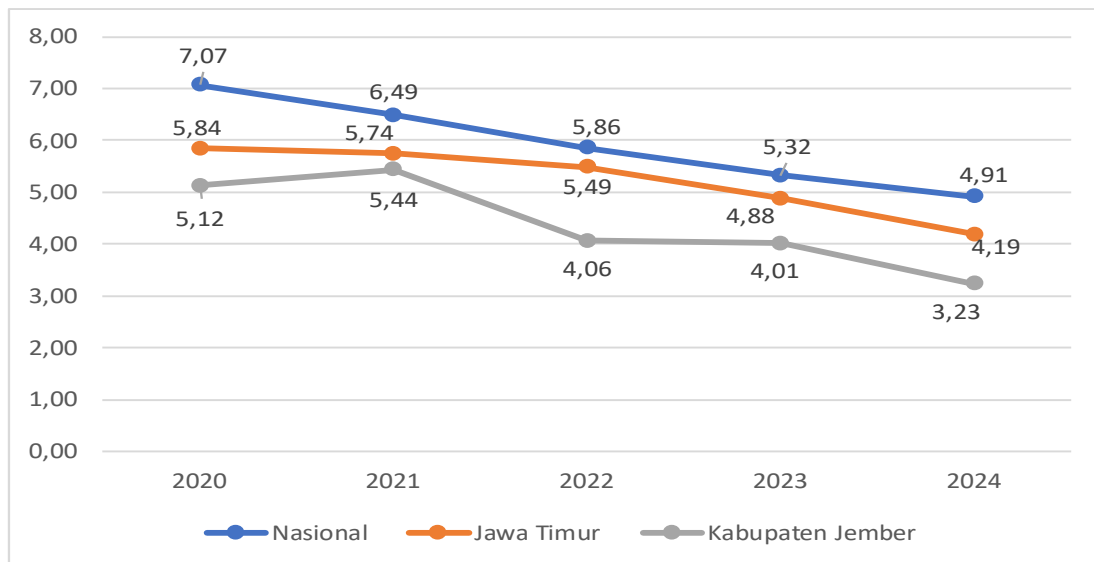
2.1.3 Angka Pengangguran

Partisipasi tenaga kerja merupakan salah satu indikator krusial yang memiliki korelasi erat dengan kesejahteraan penduduk dan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah dapat berperan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah, termasuk di Kabupaten Jember.

Kontribusi yang signifikan dari sektor ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan penduduk membuatnya menjadi fokus penting dalam konteks pembangunan regional. Peningkatan partisipasi angkatan kerja tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat memperbaiki kondisi sosial dan mengurangi tingkat ketidaksetaraan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemantauan yang efektif terhadap aspek-aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Jember menjadi hal yang sangat diperlukan. Terkait dengan hal ini, penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan partisipasi angkatan kerja perlu menjadi fokus strategis pemerintah daerah. Kebijakan yang mendukung peluang pekerjaan, pelatihan keterampilan, dan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi dapat menjadi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan dan, pada gilirannya, mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, implementasi strategi yang terarah dan terukur dapat menjadi kunci untuk

mencapai kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal di Kabupaten Jember.

Grafik 2.1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan analisis data oleh Badan Pusat Statistik, tergambar bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Jember mengalami penurunan pada tahun 2024 secara signifikan jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada tahun 2023. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran di Kabupaten Jember mencapai 3,23 persen, mengindikasikan penurunan signifikan dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada tahun 2023 yang mencapai nilai 4,01.

Meskipun mengalami fluktuasi, angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jember secara konsisten berada di bawah tingkat pengangguran di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional hingga tahun 2024. Analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember berhasil mempertahankan posisi relatif yang lebih baik dalam mengelola tantangan ketenagakerjaan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Dengan demikian, penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan adaptif di tingkat lokal dapat menjadi faktor yang mendukung peningkatan kondisi

ketenagakerjaan dan pengurangan tingkat pengangguran di masa mendatang.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengindikasikan peningkatan pembangunan ekonomi pada daerah tersebut.

Nilai pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Penyusunan PDRB menggunakan 2 pendekatan yaitu produksi dan penggunaan yang menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

PDRB disajikan dalam dua versi penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Adapun untuk mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan data PDRB atas harga konstan tahun dasar 2010.



Berikut grafik PDRB dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember 2018-2024 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan:

Grafik 2.1.3
PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember ADHK dan ADHB Tahun 2019-2024 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2025) (data diolah)

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember dari 2019 hingga 2024 mengalami penurunan drastis pada 2020 akibat pandemi Covid-19 di berbagai sektor, lalu meningkat kembali dari 2021 hingga 2024. Pada 2019, pertumbuhan PDRB sebesar 5,31 persen, naik 0,08 persen dari 2018. Tahun 2020 mengalami penurunan tajam hingga -2,98 persen, tetapi kembali meningkat pada 2021 mencapai 4,00 persen. Tahun 2022, pertumbuhan sebesar 4,53 persen atau naik 0,53 persen dari 2021. Pada 2023, pertumbuhan mencapai 4,93 persen, naik 0,40 persen dari 2022. Sedangkan tahun 2024, pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember sebesar 4,86 persen, menunjukkan tren pemulihan ekonomi setelah pandemi.

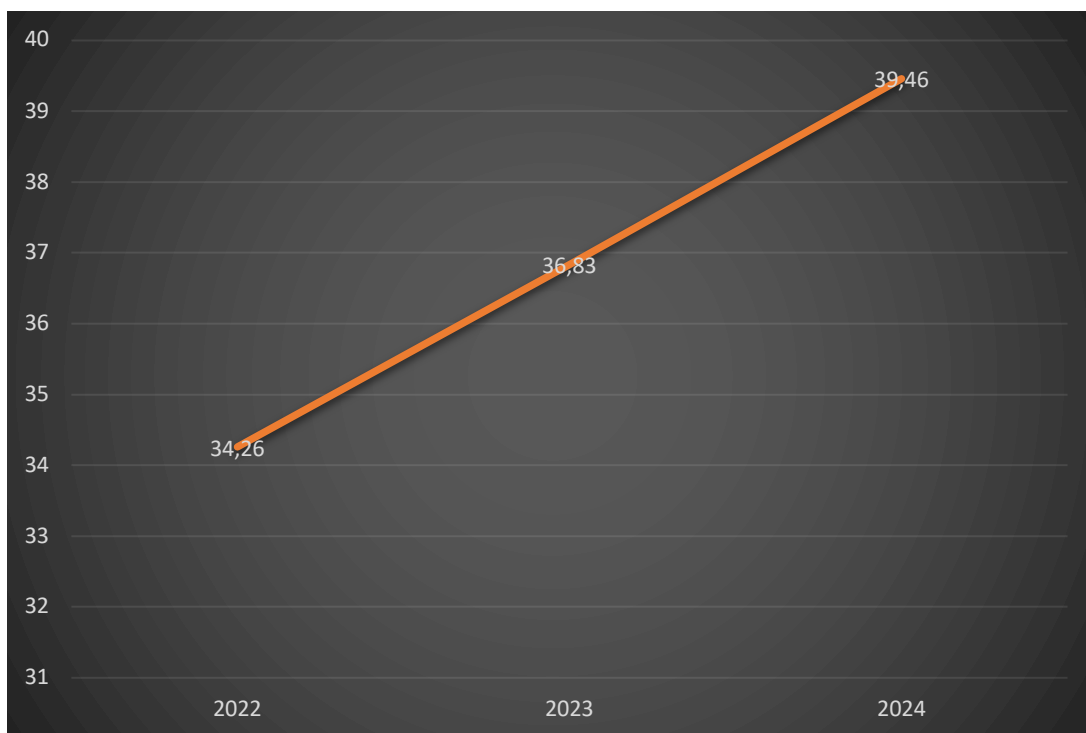
2.1.5 Pendapatan per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merujuk pada nilai PDRB suatu daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang berdomisili di daerah tersebut. Indikator ini, berdasarkan harga berlaku, mencerminkan nilai tambah

ekonomi yang dihasilkan per individu atau per kepala penduduk. PDRB per kapita menjadi salah satu tolok ukur signifikan untuk mengevaluasi tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah, menggambarkan perbandingan antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi dengan jumlah penduduk setempat.

Melalui data yang diberikan oleh BPS Kabupaten Jember, terlihat bahwa PDRB per kapita di Kabupaten Jember tahun 2022-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2022, pendapatan per kapita mencapai Rp 34,26 juta per tahun, kemudian meningkat pada 2023 menjadi Rp 36,83 juta per tahun. Selanjutnya, pada 2024, PDRB per kapita Kabupaten Jember meningkat kembali menjadi Rp 39,46 juta per tahun. Data ini menunjukkan tren kenaikan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan catatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Grafik 2.1.4
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019-2024 (Ribu Rp)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten, 2024 (data diolah)

Analisis data PDRB Kabupaten Jember tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita mengalami kenaikan

yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, pendapatan per kapita tercatat sebesar Rp 34,26 juta, lalu meningkat menjadi Rp 36,83 juta pada tahun 2023. Peningkatan berlanjut pada tahun 2024 dengan pendapatan per kapita mencapai Rp 39,46 juta. Tren kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di Kabupaten Jember. Faktor-faktor seperti peningkatan sektor ekonomi, kebijakan pemerintah, serta investasi yang masuk dapat menjadi pendorong utama atas tren positif ini.

PDRB per kapita memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami secara umum tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jember. Peningkatan PDRB per kapita dapat diartikan sebagai indikasi bahwa terjadi peningkatan rata-rata penghasilan per individu di wilayah tersebut. Ini berpotensi berdampak positif pada kesejahteraan penduduk Kabupaten Jember. Penggunaan beragam indikator ekonomi dan sosial seperti PDRB per kapita, indeks rasio Gini, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi data dari beberapa indikator tersebut dapat memfasilitasi pengambilan keputusan kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Jember.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini, atau sering disebut sebagai Gini Ratio, merupakan salah satu metrik yang sering dipergunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan secara holistik. Koefisien Gini ini mendasarkan pengukuran pada kurva Lorenz, yang merupakan suatu grafik dari pengeluaran kumulatif, yang membandingkan distribusi suatu variabel tertentu (seperti pendapatan) dengan distribusi seragam yang merepresentasikan persentase kumulatif penduduk. Kurva *Lorenz* digunakan untuk menggambarkan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat mendekati distribusi seragam yang ideal. Koefisien Gini, yang dihasilkan dari analisis kurva *Lorenz*, memberikan gambaran

angka yang mencerminkan derajat ketidaksetaraan atau kesetaraan dalam distribusi pendapatan tersebut. Semakin rendah nilai Gini Ratio, semakin mendekati distribusi seragam dan tingkat kesetaraan yang diinginkan.

Sehingga, dalam konteks ini, Koefisien Gini menjadi instrumen penting untuk memahami tingkat ketidaksetaraan ekonomi dalam suatu masyarakat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,3$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0,3 < GR < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang
- $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Perbandingan capaian gini ratio Kabupaten Jember dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.4
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional 2020-2024

Koefisien Gini	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	0,385 (September)	0,381 (September)	0,381 (September)	0,388 (Maret)	0,379 (Maret)
Provinsi Jawa Timur	0,364 (September)	0,364 (September)	0,365 (September)	0,387 (Maret)	0,372 (Maret)
Kabupaten Jember	0,318 (Maret)	0,336 (Maret)	0,301 (Maret)	0,344 (Maret)	0,321 (Maret)

Sumber: Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, 2025



Data indeks gini yang disajikan pada tabel di atas menyesuaikan waktu rilis data BPS Kabupaten Jember yang dilaksanakan pada bulan Maret. Indeks Gini di Kabupaten Jember sepanjang periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, indeks Gini Kabupaten Jember mencapai 0,318 dan meningkat menjadi 0,336 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, indeks Gini di Kabupaten Jember mengalami penurunan menjadi 0,301 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,344. Pada tahun 2024 kembali menurun hingga mencapai 0,321. Fenomena serupa tercatat pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional, menunjukkan adanya tren fluktuatif ekonomi selama beberapa tahun terakhir.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja dalam pengelolaan urusan pemerintahan mencerminkan keberhasilan sebuah daerah dalam menjalankan dan mengelola berbagai urusan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Laporan tentang kinerja ini menyediakan data atau informasi terkait kinerja dari setiap bidang urusan pemerintahan. berlandaskan pada indikator yang spesifik untuk setiap urusan pemerintahan serta urusan pendukungnya.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah ditentukan sejumlah 107 indikator kinerja kunci hasil yang mencakup 32 bidang urusan. Capaian indikator kinerja hasil Kabupaten Jember tahun 2024 dapat dirinci pada tabel berikut:



Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2024

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	103,49%	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,93%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	87,72%		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	16,61%		
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,08	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	59,04%		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	73,32%		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	75,82%		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,69%		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	87,29%		
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87,19%		

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85,27%		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,11%		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,74%		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	70,35%		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	103,31%		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92,19%		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	0%	Dinas Perum. Rakyat, Kawasan Permukiman & CK	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0%		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%		
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%		
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh	84,19%		

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		layanan pengolahan air limbah domestik			
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100%		
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	85,78%		
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	88.25 %	- Dinas Perum. Rakyat, Kawasan Permukiman & CK - Dinas PU Bina Marga & SDA	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PU Bina Marga & SDA	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0%	Dinas Perum. Rakyat, Kawasan Permukiman & CK	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0		
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	50,06%		
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,42%		
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	18,80%		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	50%		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	86.11%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.26%		

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%		
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	16,46 menit		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan luar panti (indikator SPM)	85,56%	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%		
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	50%	Dinas Tenaga Kerja	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,02%		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,04%		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS, Ketenagakerjaan)	0.32%		
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)	81,15%		
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7,85%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100%		

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0075		
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Perum. Rakyat, Kawasan Permukiman & CK	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0		
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%		
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0		
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0		
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	63,89	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	40.07 %		
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	30%		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	99,15%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	49,01%		
		Kepemilikan akta kelahiran	91,53%		
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data	13.69%		

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan Desa Tertinggal	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Persentase peningkatan status Desa Mandiri	100%		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,02	Dinas Perum. Rakyat, Kawasan Permukiman & CK	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,44%		
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,31%		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	2,89	Dinas Perhubungan	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,81		
16	Informasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	36,99%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	66,67%		
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	113.61%	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Badan Penguasaan Keuangan dan Aset Daerah	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	39,02%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100%		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	1,12%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,16%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi	21,21%		

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
		Peningkatan Prestasi Olahraga	34		
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	91,78%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase OPD yang menggunakan data dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah	91,78%		
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	22,66%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	65,69%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	Nilai 75public75 kegemaran membaca masyarakat	62,7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	55,45		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	63,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan 75public dan kesejahteraan rakyat	0		
C.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	114,94%	Dinas Perikanan	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	170,78%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	31,12%		
		Tingkat Hunian Akomodasi	44,23%		



NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,67%		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	16,67%		
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	632,33%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	348,94%	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	
28	Kehutanan	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota	0		
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase 76 perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
4	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	69,78%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	45,44%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	82,80%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri dikeluarkan oleh instansi terkait Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0		
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	80%		
6	Transmigrasi	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	0	Dinas Tenaga Kerja	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator kinerja untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan mengampu sebanyak 5 bidang urusan antara lain: perencanaan keuangan, pengadaan, kepegawaian, manajemen keuangan serta transparansi dan partisipasi publik. Indikator kinerja kunci yang diselenggarakan sebanyak 19 indikator terinci sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	27,98%	- Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio PAD	18,82%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	70,48%		
		Opini Laporan Keuangan	4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Inspektorat	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	89,57%		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	10,66%		
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-22,29%		
3	Kepagawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	

NO	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10,12%		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	42,52%		
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-12,27%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-16,64%		
		Manajemen Aset	4		
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	6,38%		
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	109,37%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	83,33%	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan Janji untuk mewujudkan Kinerja yang



jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2024 berisi 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama dan 38 (tiga puluh delapan) Indikator Kinerja Sasaran. Penentuan indikator dalam perjanjian kinerja berpedoman pada ketentuan pada PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, dimana Perjanjian Kinerja berisi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Jember telah menyusun 2 (dua) Perjanjian Kinerja, yaitu Perjanjian Kinerja yang disusun 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja yang disusun karena adanya perubahan anggaran, dan dilakukan setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

Berdasarkan capaian pada Laporan Kinerja tahun 2023, khususnya pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), IPP Kabupaten Jember tahun 2023 sebesar 4,51 (Kategori A) dimana realisasi tersebut telah melebihi target IPP sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Jember yaitu 4,01 (A-) pada tahun 2026. Maka sebagai bentuk komitmen untuk terus mengoptimalkan kinerja pelayanan publik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dilakukan **penyesuaian target** IPP dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu sebesar 4,52 (kategori A).

Tabel 2.2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember
Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berbasis Potensi Wilayah	Pertumbuhan PDRB/LPE	5,30 %

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	21,51 %
	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	15,51 %
2.	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak	Indeks Gini	0,317
	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	24,38 %
	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	2,25 %
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,00 (B)
	Terjaganya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Keindahan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100 %
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	100 %
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,40 (Cukup)
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,52 (A)
	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah (SOTK, Proses Bisnis, Anjab/ABK, Evaluasi Jabatan dan SOP)	100%
	Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi	2,50 %
	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	100 %
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat	130 Kegiatan
	Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	100 %



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100 %
	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (Terdefinisi)
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan/Atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu	Ketersediaan Dokumen Peencanaan Pembangunan Daerah	100 %
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Kabupaten Jember	70,47 (BB)
	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	100 %
	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Oleh SDM Aparatur yang Kompeten	ASN Yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	94 %
4.	Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya	Angka Kemiskinan	8,80 %
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya	Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3,0 %
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	55,00
5.	Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	3,80
	Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/PMA Berskala Nasional	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	Rp.1.221.73 5.000.000
	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Usaha Mikro	Cakupan Pembinaan Usaha Mikro	7.073 UM
6.	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,54 %
	Meningkatnya Angkatan Kerja yang Berhasil Ditempatkan	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1.000 pencaker
7.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,55
	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,69
	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	77,39



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	54,87
8.	Meningkatkan Kesenjangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,40
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	71,20
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	15,20
	Meningkatnya Kualitas Kesenjangan Gender Dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,80
	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	87.693 orang
9.	Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas dan Merata Serta Berperspektif Kebencanaan	Indeks Infrastruktur	85,33
	Meningkatnya Prasarana Jalan Kabupaten yang Berkualitas dan Merata	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	86 %
	Meningkatnya Sarana Pemukiman Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Bersantitas Aman	86 %
	Meningkatnya Utilitas Permukiman Masyarakat Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Berakses Air Minum	84 %
	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	20 %
	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	157,00
10.	Mengembangkan Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal	PAD Bidang Pariwisata	4,50 %
	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	118.380 orang
	Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah dan Pelestarian Kearifan Lokal	Organisasi Kepemudaan yang Aktif	75 %

Sumber: LKJIP Pemerintah Kabupaten Jember



B. Pengukuran Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Potret kinerja daerah diperoleh dari hasil analisis capaian kinerja tujuan yang terdiri dari 10 indikator utama makro dan capaian kinerja sasaran yang terdiri dari 38 indikator kinerja non makro dengan cara :

1. Membandingkan realisasi dan target kinerja tahun 2024
2. Membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021 , 2022, dan 2023)
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja jangka menengah tahun 2026
4. Membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian anggaran tahun 2024 untuk mengetahui tingkat efisiensi capaian kinerja sasaran
5. Menguraikan factor penyebab keberhasilan / kegagalan
6. Menguraikan program / kegiatan pendukung kinerja sasaran

Salah satu analisis capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja adalah dengan membandingkan target dan realisasi pada tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja , sebagaimana tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.2.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berbasis Potensi Wilayah	Pertumbuhan PDRB/LPE	5,30 %	4,86%	91,70%
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	21,51 %	21,01%	97,68%
3	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	15,51 %	14,82%	95,55%
Rata Rata Capaian Tujuan 1					94,98%
4	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah	Indeks Gini	0,317	0,321	98,74%

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
	dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak				
5	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	24,38 %	25,71%	105,46%
6	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	2,25 %	2,16%**	96%**
Rata Rata Capaian Tujuan 2					100,07%
7	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	68,00 (B)	85,47 (A)	125,69%
8	Terjaganya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Keindahan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100 %	100%	100%
9	Meningkatnya Kualitas Administrasi Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	100 %	99,14%	99,14%
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,40 (Cukup)	3,54 (Sangat Baik)	147,50%
11	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,52 (A-)	4,62 (A)	102,21%
12	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah (SOTK, Proses Bisnis, Anjab/ABK, Evaluasi Jabatan dan SOP)	100 %	100%	100%
13	Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi	2,50	1,74	130,40%
14	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	100 %	100%	100%
15	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat	130 Kegiatan	130 Kegiatan	100%
16	Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	100 %	100%	100%



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
17	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100 %	100 %	100 %
18	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	100%
19	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan/Atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100%	100%
20	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Kabupaten Jember	77,26 (BB)	62,50 (B)	80,89%
21	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	100 %	87,38%	87,38%
22	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Oleh SDM Aparatur yang Kompeten	ASN Yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya	94 %	95%	101,06%
Rata Rata Capaian Tujuan 3					104,64%
23	Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya	Angka Kemiskinan	8,80 %	9,01%	97,61%
24	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya	Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3,0 %	1,09%	36,33%
25	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	55,00	100	181,82%
Rata Rata Capaian Tujuan 4					105,25%
26	Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	3,80	4,04	93,68%
27	Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/PMA Berskala Nasional	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	Rp.1.221.735.000.000	Rp.1.514.963.617.660	124%
28	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Usaha Mikro	Cakupan Pembinaan Usaha Mikro	7.073 UM	110.875 UM	1.567%
Rata Rata Capaian Tujuan 5					594,89%
29	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,54 %	3,23%	128,85%



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
30	Meningkatnya Angkatan Kerja yang Berhasil Ditempatkan	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1.000 pencaker	6.162 pencaker	616%
Rata Rata Capaian Tujuan 6					372,43%
31	Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,55	63,89	100,54%
32	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,69	39,66	73,87%
33	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	77,39	92,37	119,36%
34	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	54,87	52,82	96,26%
Rata Rata Capaian Tujuan 7					97,51%
35	Meningkatkan Kesenjangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,40	70,93	102,20%
36	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	71,20	74,17	104,17%
37	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah /HRL)	15,20	13,50	88,82%
38	Meningkatnya Kualitas Kesenjangan Gender Dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,80	85,31**	99,43%**
39	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	87.693 orang	88.733 orang	101,19%
Rata Rata Capaian Tujuan 8					99,16%
40	Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas dan Merata Serta Berperspektif Kebencanaan	Indeks Infrastruktur	85,33	69,49	81,44%
41	Meningkatnya Prasarana Jalan Kabupaten yang Berkualitas dan Merata	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	86 %	85,78%	99,74%
42	Meningkatnya Sarana Pemukiman Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Bersantitas Aman	86 %	84,19%	97,89%
43	Meningkatnya Utilitas Permukiman Masyarakat Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Berakses Air Minum	84 %	97,3%	115,83%
44	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	20%	11,72%	58,6%
45	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	157,00	148,78**	105,24%*
Rata Rata Capaian Tujuan 9					102,52%



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
46	Mengembangkan Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal	PAD Bidang Pariwisata	4,50 %	0,037%	8%
47	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	118.380 orang	707.504 orang	597%
48	Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah dan Pelestarian Kearifan Lokal	Organisasi Kepemudaan yang Aktif	75 %	75%	100%
Rata Rata Capaian Tujuan 10					235%

Sumber: LKJIP Pemerintah Kabupaten Jember

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.1 capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2024 diukur dengan menggunakan 48 indikator. Sebanyak 5 indikator merupakan Indikator yang mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, antara lain adalah : Indeks GINI, Tingkat Pengangguran terbuka / TPT, Angka Kemiskinan, ICOR, dan Indeks Resiko Bencana. Dan dihitung persentase capaiannya dengan formulasi sebagaimana tersebut diatas.

Selanjutnya sebanyak 3 (tiga) indikator tidak tersedia datanya sampai dengan bulan Februari 2024, sehingga digunakan angka realisasi tahun 2023 yang dirilis di tahun 2024, antara lain :

- Pertumbuhan PDRB/LPE , dengan capaian 96,67%
- Kontribusi PDRB Kategori Perikanan (Instansi Pengukur : BPS. Hal ini dikarenakan BPS tidak lagi melakukan pengukuran kontribusi PDRB pada kategori sub sektor, termasuk Sub sektor perikanan, yang berlaku di seluruh Kabupaten Kota)
- Indeks Pembangunan Gender (Instansi Pengukur : Kementerian PPA)
- Indeks Resiko Bencana (Instansi Pengukur : BNPB)

Kinerja Tujuan 1: “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berbasis Potensi Wilayah”, diukur dengan 1 indikator tujuan (Pertumbuhan PDRB/ Laju Pertumbuhan Ekonomi) dan 2 indikator sasaran (Kontribusi PDRB Kategori industri pengolahan dan Kategori PDRB Industri Perdagangan Besar dan Eceran), menunjukkan rata-rata capaian kinerja 94,98% atau termasuk kategori capaian Sangat Tinggi. Dengan masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran telah mencapai kategori capaian sangat tinggi. **Kinerja Tujuan 2 :** “Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak”, diukur 1 indikator tujuan (Indeks GINI) dan 2 indikator sasaran (kontribusi PDRB Kategori Pertanian dan Kategori PDRB Kategori Perikanan) yang sumber datanya berdasarkan data BPS tahun berkenaan (tahun 2023). Menunjukkan rata rata capaian kinerja 95,19% atau termasuk kategori capaian Sangat Memuaskan.

Kinerja Tujuan 2 : “Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak”, pada tujuan ini diukur 1 indikator tujuan (Indeks GINI) yang sumber datanya berasal dari data tahun 2024 yang dirilis BPS tahun 2025 dan 2 indikator sasaran (kontribusi PDRB Kategori Pertanian dan Kategori PDRB Kategori Perikanan) . Untuk kontribusi PDRB kategori perikanan sumber datanya berdasarkan data BPS tahun 2023 yang dirilis pada tahun 2024. Tujuan 2 menunjukkan rata-rata capaian kinerja 100,07% atau termasuk kategori capaian Sangat Tinggi, dengan seluruh indikatornya masing-masing mencapai kategori sangat tinggi.

Kinerja Tujuan 3 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, diukur dengan 1 indikator tujuan (Indeks RB) dan 15 indikator sasaran. Rata-rata capaian kinerja 104,64% atau termasuk kategori capaian Sangat Tinggi dari 16 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja



tujuan ke 3, sebanyak 14 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, dan sebanyak 2 indikator termasuk kategori capaian Tinggi.

Kinerja Tujuan 4 : “Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya”. Diukur dengan 1 indikator tujuan (angka kemiskinan) dan 2 indikator sasaran (Penurunan PMKS dan IDM), dengan rata-rata capaian kinerja 105,25% atau termasuk kategori capaian Sangat Tinggi. Namun pada tujuan ini masih terdapat indikator sasaran dengan capaian kurang optimal, dan termasuk kategori capaian Sangat Rendah yaitu Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang pada tahun 2024 capaian kinerjanya berada pada angka 36,33%, sementara indikator angka kemiskinan dan Indeks Desa Membangun (IDM) termasuk dalam kategori capaian kinerja Sangat Tinggi.

Kinerja tujuan 5 : “Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja”. Kinerja ini diukur dengan 1 indikator tujuan (ICOR) dan 2 indikator sasaran (Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional dan Cakupan Pembinaan Usaha Mikro). Dengan rata-rata capaian kinerja 594,89% atau termasuk kategori capaian Sangat Tinggi.

Kinerja tujuan 6 : “Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja”, diukur dengan 1 indikator tujuan (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan 1 indikator sasaran (Pencari Kerja Yang Ditempatkan) yang masing-masing indikator tersebut masuk dalam kategori capaian kinerja sangat tinggi, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan 6 berada pada angka 372,43% atau termasuk kategori capaian Sangat Tinggi.

Kinerja tujuan 7 : “Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Berkelanjutan” diukur dengan 1 indikator tujuan (IKLH) dan 3 indikator sasaran (IKA, IKU, IKL), dengan rata-rata capaian 97,51% termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Namun pada tujuan ini masih terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kurang optimal (termasuk dalam kategori Sedang) yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dengan persentase capaian 73,87%.



Kinerja tujuan 8 : "Meningkatkan Kesenjangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia" diukur dengan 1 indikator tujuan (IPM) dan 4 indikator sasaran (Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, IPG, Jumlah Pengunjung Perpustakaan), dengan rata-rata capaian kinerja 99,16% atau termasuk kategori capaian Sangat Tinggi

Kinerja tujuan 9 : "Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas dan Merata Serta Berperspektif Kebencanaan" diukur dengan 1 indikator tujuan (Indeks Infrastruktur) dan 5 indikator sasaran. Rata-rata capaian kinerja 102,52% atau termasuk kategori capaian Sangat Tinggi.

Sebanyak 4 indikator sasaran capainnya di atas 90% atau kategori Sangat tinggi, yaitu Jalan Kabupaten Kondisi Baik, Rumah Tangga Bersanitasi Aman, rumah tangga berakses air minum, dan indeks resiko bencana. Sedangkan 1 indikator sasaran yaitu Indeks infrastruktur dengan persentase capaian 81,44% , termasuk kategori baik.

Namun pada tujuan ini masih terdapat indikator sasaran dengan capaian kurang optimal atau termasuk kategori capaian Rendah yaitu peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik.

Kinerja tujuan 10 : "Mengembangkan Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal" diukur dengan 1 indikator tujuan (PAD Bidang Pariwisata) dan 2 indikator sasaran (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata dan Organisasi Kepemudaan Yang Aktif), dengan rata-rata capaian kinerja 235% atau termasuk kategori capaian Sangat Tinggi. Namun pada tujuan ini masih terdapat indikator sasaran dengan capaian kurang optimal, termasuk dalam kategori Sangat Rendah dan perlu dioptimalkan pada tahun berikutnya yaitu PAD Bidang Pariwisata yang pada tahun 2024 hanya memperoleh persentase capaian kinerja 8%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Salah satu analisis capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja sasaran dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya, untuk mengukur tren dan progres capaian setiap tahun.

Perbandingan relisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dilakukan dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berbasis Potensi Wilayah	Pertumbuhan PDRB/LPE	4%	4,53%	4,93%	4,86%	-	92,45%	96,67%	91,70%
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	21,13%	20,82%	20,89%	21,01%	-	100,73 %	99,05%	97,68%
3	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	14,26%	14,76%	14,89%	14,82%	-	100,96 %	98,87%	95,55%
4	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak	Indeks Gini	0,336	0,301	0,344	0,321	-	105,35 %	91,48%	98,74 %
5	Meningkatnya Kontribusi	Kontribusi PDRB		23,81%	23,59%	25,71%	-	98,63%	97,24%	105,46 %

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PDRB Kategori Pertanian	Kategori Pertanian								
6	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	Kontribusi PDRB Kategori Perikanan		2,18%	2,16%	2,16%**	-	98,19%	96,86%	96%**
7	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (55,87)	B (62,28)	B (66,61)	A (85,47)	-	94,36%	99,42%	125,69 %
8	Terjaganya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Keindahan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	67,52%	92,83%	81%	100%	-	92,83%	81%	100%
9	Meningkatnya Kualitas Administrasi Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	99,53%	98,50%	98%	99,14%	-	98,50%	98%	99,14%
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,96 (kurang)	1,99 (kurang)	2,56 (cukup)	3,54 (Sangat Baik)	-	90,45%	111,30 %	147,50 %
11	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,19 (B-)	3,88 (B)	4,51 (A)	4,62 (A)	-	129%	138,77 %	102,21 %
12	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah (SOTK, Proses Bisnis, Anjab/ABK, Evaluasi Jabatan dan SOP)	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi	2,09	7,39	2,29	1,74	-	46,330 %	108,40 %	130,40 %
14	Tersedianya Laporan Penyelenggara n Pemerintah Daerah (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggara n Pemerintah Daerah (LPPD)	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
15	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat	n/a	189 kegiatan	184 kegiatan	130 kegiatan	-	145,38 %	141,54 %	100%
16	Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%
17	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	93,2%	98,1%	93,77%	100%	-	98,10%	93,77%	100%
18	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggara n Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku	Tingkat Maturitas SPIP	Level 1 (2,4)	Level 2 (2,9)	Level 3 (3,06)	Level 3 (3,13)	-	66,67%	100%	100%
19	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan/Atau Tahunan yang	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Akurat dan Tepat Waktu									
20	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Kabupaten Jember	62,06 (B)	63,15 (B)	62,14 (B)	62,50 (B)	-	89,61%	84,58%	80,89%
21	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	92,7%	99,7%	89,32%	87,38%	-	99,70%	89,32%	87,38%
22	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Oleh SDM Aparatur yang Kompeten	ASN Yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	92%	93,19%	94%	95%	-	101,29 %	101,08 %	101,06 %
23	Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya	Angka kemiskinan	10,41%	9,39%	9,51 %	9,01%	-	95,6%	93,15%	97,61%
24	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya	Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	12,86%	2,83%	4,38%	1,09%	-	70,75%	74,86%	36,33%
25	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	53,54	98,23	100	100	-	196,46 %	192,31 %	181,82 %
26	Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	4,72	4,22	3,94	4,04	-	92,35%	98,45%	93,68%
27	Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/PMA Berskala Nasional	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	Rp. 516.989. (juta)	Rp. 2.597.995 (juta)	Rp. 1.616.777 (juta)	Rp.1.514.963.617.660	-	223,41 %	136,30 %	124%
28	Meningkatnya Jumlah dan	Cakupan Pembinaan Usaha Mikro	482 UM	6.117 UM	25.903 UM	110.875 UM	-	89%	371,52 %	1.567%



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kualitas Usaha Mikro									
29	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,44	4,06%	4,01%	3,23%	-	118,80 %	114,68 %	128,85 %
30	Meningkatnya Angkatan Kerja yang Berhasil Ditempatkan	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	929	1.915	3.898	6.162	-	191,50 %	389,80 %	616%
31	Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,12	69,35	67,70	63,89	-	110,03 %	106,97 %	100,54 %
32	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	65,65	56,67	39,66	-	122,73 %	105,75 %	73,87%
33	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,21	82,89	85,96	92,37	-	107,37 %	111,22 %	119,36 %
34	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	50,33	50,67	52,87	52,82	-	95,23%	97,83%	96,26%
35	Meningkatkan Kesetaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,32	67,97	70,42	70,93	-	99,37%	102,21 %	102,21 %
36	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	69,28	69,68	74,02	74,17	-	99,40%	104,84 %	104,17
37	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah /HRL)	n/a	13,44	13,49	13,50	-	95,32%	93,03%	88,82%
38	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,66	84,82	85,31	85,31**	-	99,49%	99,72%	99,43% **
39	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	12.085	23.893 orang	80.313 orang	88.733 orang	-	32,96%	100,74 %	101,19 %
40	Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas dan Merata Serta	Indeks Infrastruktur	83	87	79,24	69,49	-	110,59 %	97,43%	81,44%



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Berperspektif Kebencanaan									
41	Meningkatnya Prasarana Jalan Kabupaten yang Berkualitas dan Merata	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	69,11%	79%	82%	85,78%	-	103,94 %	103,80 %	99,74%
42	Meningkatnya Sarana Pemukiman Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Bersanitasi Aman	77,20%	81,93%	89,93%	84,19%	-	99,92%	107,06 %	97,89%
43	Meningkatnya Utilitas Permukiman Masyarakat Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Berakses Air Minum	83,43%	90,20%	92,16%	97,3%	-	115,64 %	113,78 %	115,83 %
44	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	7,62%	8,235%	(13,84 %)	11,72%	-	82,35%	(92,27 %)	58,6%
45	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	152,63	137,23*	148,78	148,78* *	-	112,59 %-	105,54 %	105,24 %
46	Mengembangkan Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal	PAD Bidang Pariwisata		5,33%	6,53%	0,037%	-	144,44 %	152,21 %	8%
47	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	320.189	102.589	858.890	707.504	-	103,15 %	788,55 %	597%
48	Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah dan Pelestarian Kearifan Lokal	Organisasi Kepemudaan yang Aktif	70%	69,4%	69,4%	75%	-	99,14%	95,07%	100%



Berdasarkan data yang disajikan pada tabel c.1 diatas, sebagian besar realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

Dikarenakan terdapat perbedaan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2021 dengan indikator dalam perjanjian kinerja tahun 2022, maka tidak seluruh realisasi kinerja dapat dilakukan perbandingan dengan target untuk dihitung capaian kinerjanya,. Hal ini disebabkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 memuat indikator tujuan dan sasaran pada RPJMD 2016-2021. Sedangkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 memuat indikator sasaran pada RPJMD 2021-2026.

Berikut analisis perbandingan kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun 2021 s.d. 2023 :

Kinerja Tujuan 1: “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berbasis Potensi Wilayah”, diukur dengan 1 indikator tujuan (Pertumbuhan PDRB/ Laju Pertumbuhan Ekonomi) dan 2 indikator sasaran (Kontribusi PDRB Kategori industri pengolahan dan Kategori PDRB Industri Perdagangan Besar dan Eceran). Persentase capaian tahun 2024 untuk 3 (tiga) indikator pada tujuan 1 lebih rendah dibandingkan persentase capaian tahun sebelumnya

Kinerja Tujuan 2 : “Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak”, diukur 1 indikator tujuan (Indeks GINI) dan 2 indikator sasaran (kontribusi PDRB Kategori Pertanian dan Kategori PDRB Kategori Perikanan) dengan rincian sebagai berikut:

- Angka Indeks GINI tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023. Hal ini merupakan kinerja yang positif, sehingga persentase capaian kinerjanya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
- Persentase capaian tahun 2024 untuk 2 indikator sasaran pada tujuan 2, yaitu kontribusi PDRB Kategori Pertanian dan Perikanan lebih rendah dibandingkan persentase capaian tahun sebelumnya, dikarenakan pada saat pengukuran kinerja, data realisasi tahun



2024 belum dirilis oleh BPS, sehingga pengukuran dilakukan dengan menggunakan target tahun 2024 dan data realisasi tahun 2023.

Kinerja Tujuan 3 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, diukur dengan 1 indikator tujuan (Indeks RB) dan 15 indikator sasaran.

- Realisasi dan persentase capaian tahun 2024 untuk 14 Indikator pada Tujuan 3 cukup optimal dan cenderung meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
- Persentase capaian tahun 2024 untuk indikator Indeks RB lebih tinggi dibandingkan persentase capaian tahun sebelumnya, dengan lompatan nilai yang signifikan, dengan IRB 66,61 (kategori B) pada tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 85,47 (kategori A) pada tahun 2024 dengan capaian 125,69% menunjukkan peningkatan pada hampir seluruh aspek tata kelola pemerintahan yang menjadi unsur pembentuk IRB
- Persentase capaian tahun 2024 untuk 2 indikator pada tujuan 3, yaitu Nilai SAKIP dan Realisasi Pajak Daerah cenderung menurun dibandingkan persentase capaian tahun sebelumnya. Nilai SAKIP Kabupaten Jember, ditargetkan naik setiap tahunnya. Hasil evaluasi AKIP bertahan pada kategori Baik selama periode 2021-2024. Pada tahun 2024, nilai evaluasi AKIP Kabupaten Jember berada pada angka 62,50 (kategori B) mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 namun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang berada pada angka 62,15 (B). Sehingga persentase capaian untuk indikator SAKIP Kabupaten Jember terus menurun pada periode 2022-2024. Dan untuk persentase capaian Realisasi Pajak Daerah, capaian kinerja tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dengan penurunan persentase capaian kinerja sebesar 1,94% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja Tujuan 4 : “Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya”. Diukur dengan 1 indikator tujuan (angka kemiskinan) dan 2 indikator sasaran (Penurunan PMKS dan Indeks Desa Membangun), dengan rata rata capaian kinerja 105,25% atau termasuk kategori capaian Sangat Tinggi. Namun pada tujuan ini masih terdapat indikator sasaran dengan capaian kurang optimal, dan termasuk kategori capaian Sangat Rendah yaitu Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut:

- Angka kemiskinan tahun 2024 menurun dibandingkan angka kemiskinan tahun 2021-2023. Hal ini merupakan kinerja yang positif. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
- Persentase capaian tahun 2024 untuk indikator Penurunan PMKS lebih rendah dibandingkan persentase capaian tahun tahun sebelumnya
- Untuk Indikator Indeks Desa Mandiri tahun 2024 realisasi sama dengan tahun 2023 dimana seluruh desa di Kabupaten Jember seluruhnya sudah berstatus Desa Mandiri dan Desa Maju. Sementara persentase capaian IDM tahun 2024 lebih rendah, namun capaian cukup optimal dan telah melampaui target (>100%).

Kinerja tujuan 5: “Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja”. Kinerja ini diukur dengan 1 indikator tujuan (ICOR) dan 2 indikator sasaran (Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional dan Cakupan Pembinaan Usaha Mikro) dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase capaian tahun 2024 untuk indikator ICOR, lebih rendah dibandingkan persentase capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi ICOR merupakan kinerja yang negatif, karena hal itu berarti semakin tidak efisien investasi yang masuk ke kabupaten Jember.

- Realisasi dan persentase capaian tahun 2024 untuk 2 indikator pada tujuan 5, yaitu indikator Cakupan Pembinaan UM meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya namun indikator Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Kinerja tujuan 6 : “Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja”, diukur dengan 1 indikator tujuan (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan 1 indikator sasaran (Pencari Kerja Yang ditempatkan). Realisasi dan persentase capaian tahun 2024 untuk 2 indikator pada tujuan 6, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pencari Kerja Yang ditempatkan mengalami peningkatan capaian kinerja yang signifikan dibandingkan realisasi maupun persentase capaian tahun sebelumnya, terutama indikator pencari kerja yang ditempatkan yang mengalami kenaikan hampir dua kali lipat.

Kinerja tujuan 7 : “Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Berkelanjutan” diukur dengan 1 indikator tujuan (IKLH) dan 3 indikator sasaran (Indeks Kualitas Air/IKA, Indeks kualitas Udara/IKU, Indeks Kualitas Tutupan lahan/IKL):

- Realisasi dan persentase capaian tahun 2024 untuk indikator IKU cukup optimal dan cenderung meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
- Realisasi dan persentase capaian tahun 2024 untuk 3 indikator pada tujuan 7, yaitu IKLH, IKA, dan IKL cenderung menurun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Namun persentase capaian untuk IKLH telah cukup optimal karena telah melampaui 100%. Khususnya pada indikator IKA perlu mendapat perhatian serius terkait faktor-faktor penyebab penurunan kualitas air, karena capaian IKA yang masih di kategori sedang.

Kinerja tujuan 8 : ”Meningkatkan Kesenjangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia” diukur dengan 1 indikator tujuan (IPM) dan 4 indikator sasaran (Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Pembangunan Gender/IPG, Jumlah Pengunjung Perpustakaan):



- Realisasi dan persentase capaian tahun 2024 untuk indikator IPM dan Jumlah pengunjung perpustakaan cukup optimal dan cenderung meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
- Realisasi dan persentase capaian tahun 2024 untuk indikator Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan relatif stabil, sedangkan untuk ,
- Persentase capaian tahun 2024 untuk indikator IPG, lebih rendah dibandingkan persentase capaian tahun sebelumnya, dikarenakan pada saat pengukuran kinerja, belum tersedianya data IPG tahun 2024 dari Kementerian PPA, sehingga pengukuran dilakukan dengan menggunakan data realisasi tahun 2023

Kinerja tujuan 9 : “Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas dan Merata Serta Berperspektif Kebencanaan” diukur dengan 1 indikator tujuan (Indeks Infrastruktur) dan 5 indikator sasaran (Indeks Infrastruktur, Jalan dalam Kondisi Baik, Rumah Tangga Bersanitasi Aman, Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dan Indeks Resiko Bencana)

- Realisasi dan persentase capaian tahun 2024 untuk indikator Rumah Tangga Berakses Air Minum cukup optimal dan cenderung meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
- Persentase capaian tahun 2024 untuk indikator IRB, lebih rendah dibandingkan persentase capaian tahun sebelumnya, dikarenakan pada saat pengukuran kinerja, belum tersedianya data IRB tahun 2024 dari BNPB, sehingga pengukuran dilakukan dengan menggunakan data realisasi tahun 2023
- Persentase capaian tahun 2024 untuk 4 indikator pada tujuan 9, yaitu Indeks Infrastruktur, Jalan dalam Kondisi Baik, Rumah Tangga Bersanitasi Aman, Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Khususnya pada indikator Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan perlu mendapat perhatian serius terkait faktor faktor penyebab penurunannya, karena capaian yang masih di kategori rendah.



Kinerja tujuan 10 : “Mengembangkan Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal” diukur dengan 1 indikator tujuan (PAD Bidang Pariwisata) dan 2 indikator sasaran (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata dan Organisasi Kepemudaan Yang Aktif).

- Realisasi dan persentase capaian tahun 2024 untuk indikator Organisasi Kepemudaan Yang Aktif cukup optimal dan cenderung meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
- Realisasi dan persentase capaian tahun 2024 untuk 2 indikator pada tujuan 10, yaitu PAD Bidang Pariwisata dan Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata cenderung menurun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Namun persentase capaian untuk Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata telah cukup optimal karena telah melampaui target. Khususnya pada indikator PAD Bidang Pariwisata perlu mendapat perhatian serius terkait faktor faktor penyebab penurunan PAD Bidang Pariwisata, karena capaian kinerjanya yang masih di kategori Sangat Kurang.

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. yang mencakup instruksi tentang Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Prosedur Review terhadap Laporan Kinerja lembaga-lembaga pemerintah. evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja termasuk perbandingan terhadap target Pembangunan Jangka Menengah. Metode analisis selanjutnya untuk menilai capaian sasaran kinerja melibatkan perbandingan antara hasil kinerja yang dicapai hingga tahun 2023 dengan target pembangunan jangka menengah. sebagaimana ditampilkan dalam tabel yang akan dijelaskan:

Tabel 2.2.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target
Jangka Menengah

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2024	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berbasis Potensi Wilayah	Pertumbuhan PDRB/LPE	5,50%	4,86%	88,36%
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	22,38%	21,01%	93,88%
3	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	16,45%	14,82%	90,09%
4	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak	Indeks Gini	0,316	0,321	98,42%
5	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian dan Perikanan	24,63%	25,71%	104,38%
6	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	2,27%	2,16%**	95,15%**
7	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	70 (BB)	85,47 (A)	122,10%
8	Terjaganya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Keindahan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100%	100%	100%
9	Meningkatnya Kualitas Administrasi Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	100%	99,14%	99,14%
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,60 (Baik)	3,54 (Sangat Baik)	136,15%
11	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,01 (A-)	4,62 (A)	115,21%
12	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah (SOTK, Proses Bisnis, Anjab/ABK, Evaluasi Jabatan dan SOP)	100%	100%	100%
13	Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi	2,50	1,74	130,4%
14	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	100%	100%	100%

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2024	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat	130 kegiatan	130 kegiatan	100%
16	Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%
17	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%
18	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	100%
19	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan/Atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
20	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Kabupaten Jember	80,56 (A)	62,50 (B)	77,58%
21	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	100%	87,38%	87,38%
22	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Oleh SDM Aparatur yang Kompeten	ASN Yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya	96%	95%	98,96%
23	Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya	Angka Kemiskinan	8,60%	9,01%	95,23%
24	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya	Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2,00	1,09%	54,5%
25	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	60	100	166,67%
26	Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	3,65	4,04	89,32%
27	Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/PMA Berskala Nasional	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	1.296.139.000.000	Rp.1.514.963.617.660	116,88%
28	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Usaha Mikro	Cakupan Pembinaan Usaha Mikro	7.279,18 UM	110.875 UM	1.523%%
29	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,3%	3,23%	124,88%
30	Meningkatnya Angkatan Kerja yang Berhasil Ditempatkan	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1.000 orang	6.162	616%



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi 2024	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,07	63,89	99,72%
32	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,89	39,66	73,59%
33	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	77,59	92,37	119,05%
34	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	56,53	52,82	93,44%
35	Meningkatkan Kesenjangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,40	70,93	97,97%
36	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	72,10	74,17	102,87%
37	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah /HRL)	15,70	13,50	85,99%
38	Meningkatnya Kualitas Kesenjangan Gender Dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,45	85,31**	98,68%**
39	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	106.110 orang	88.733 orang	83,73%
40	Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas dan Merata Serta Berperspektif Kebencanaan	Indeks Infrastruktur	93,33	69,49	74,46%
41	Meningkatnya Prasarana Jalan Kabupaten yang Berkualitas dan Merata	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	100%	85,78%	85,78%
42	Meningkatnya Sarana Pemukiman Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Bersantasi Aman	90%	84,19%	93,54%
43	Meningkatnya Utilitas Permukiman Masyarakat Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Berakses Air Minum	90%	97,3%	108,11%
44	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	30%	11,72%	39,06%
45	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	155	148,78**	104,01%
46	Mengembangkan Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal	PAD Bidang Pariwisata	5,50%	0,037%	0,67%
47	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	137.300 orang	707.504 orang	515%
48	Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah dan Pelestarian Kearifan Lokal	Organisasi Kepemudaan yang Aktif	80%	75%	93,75%

Sumber: LKJIP Pemerintah Kabupaten Jember



Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.3 diatas, sebagian besar realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah, sudah cukup optimal. Dari 48 Indikator kinerja, terdapat 37 indikator yang capaian kinerjanya mencapai kategori capaian Sangat Tinggi pada tahun ke-4 periode RPJMD, 6 (enam) indikator capaian kinerjanya kategori Tinggi, 2 (dua) indikator capaian kinerjanya kategori sedang, 1 (satu indikator) kategori Rendah dan 2 (dua) indikator kategori Sangat Rendah

Sampai dengan tahun ke-4 periode RPJMD, terdapat 5 (lima) indikator dengan capaian kinerja kurang optimal yaitu:

- Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Indeks Infrastruktur
- Indeks Kualitas Air (IKA)
- PAD Bidang Pariwisata
- Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik

Dimana capaian kinerja yang kurang optimal perlu lebih dielaborasi kedepan terkait strategi pencapaian kinerja lebih baik di tahun depan.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Salah satu pengukuran kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja adalah dengan melakukan perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan (tahun ke-n) standar nasional/ realisasi nasional/ realisasi regional Provinsi Jawa Timur untuk indikator yang serupa, yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai dengan capaian di tingkat nasional / regional.



Analisis ini merupakan bentuk benchmark dengan ukuran tingkat kemajuan yang telah dicapai daerah lain, berdasarkan data yang dirilis Kementerian / lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap bidang tersebut berdasar perundang undangan, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional / Realisasi se-Regional Jawa Timur

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi Nasional /Regional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berbasis Potensi Wilayah	Pertumbuhan PDRB/LPE	4,86%	4,93% (Jawa Timur)
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	21,01%	Data tidak tersedia
3	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	14,82%	Data tidak tersedia
4	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak	Indeks Gini	0,317	0,381 (nasional), 0,372 (Prov. Jawa Timur)
5	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian dan Perikanan	25,71%	Data tidak tersedia
6	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	2,16%**	Data tidak tersedia
7	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	A (85,47)	Data tidak tersedia
8	Terjaganya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Keindahan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100%	Data tidak tersedia
9	Meningkatnya Kualitas Administrasi Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	99,14%	Data tidak tersedia
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,54 (Sangat Baik)	3,12 (nasional) 4,43 (Jawa Timur)
11	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 (A)	Data tidak tersedia
12	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah	100%	Data tidak tersedia

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi Nasional /Regional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	(SOTK, Proses Bisnis, Anjab/ABK, Evaluasi Jabatan dan SOP)		
13	Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi	1,74	1,57 (nasional)
14	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	100%	Data tidak tersedia
15	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat	130 kegiatan	Data tidak tersedia
16	Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	100%	Data tidak tersedia
17	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100%	Data tidak tersedia
18	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Data tidak tersedia
19	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan/Atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Data tidak tersedia
20	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Kabupaten Jember	62,50 (B)	64,23 (B)
21	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	87,38%	Data tidak tersedia
22	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Oleh SDM Aparatur yang Kompeten	ASN Yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya	95%	Data tidak tersedia
23	Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya	Angka Kemiskinan	9,01%	9,79% (Jatim) 9,03% (nasional)
24	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya	Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1,09%	Data tidak tersedia
25	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	100	Data tidak tersedia
26	Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	0,20	6,23 (nasional)
27	Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/PMA Berskala Nasional	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	Rp.1.514.963.617.660	Data tidak tersedia



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi Nasional /Regional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Usaha Mikro	Cakupan Pembinaan Usaha Mikro	110.875 UM	Data tidak tersedia
29	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,23%	4,91% (nasional), 4,19% (Prov. Jawa Timur)
30	Meningkatnya Angkatan Kerja yang Berhasil Ditempatkan	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	6.162	Data tidak tersedia
31	Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,89	73,57
32	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	39,66	54,76
33	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,37	90,17
34	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	52,82	62,25
35	Meningkatkan Kesenjangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,93	75,35 (Jatim) 75,02 (Nasional)
36	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (UHH)	74,17	72,35 (Jatim) 72,39 (Nasional)
37	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah/ HLS)	13,50	13,43 (Jatim) 13,21 (nasional)
38	Meningkatnya Kualitas Kesenjangan Gender Dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,31**	Data tidak tersedia
39	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	88.733 orang	Data tidak tersedia
40	Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas dan Merata Serta Berperspektif Kebencanaan	Indeks Infrastruktur	69,49	Data tidak tersedia
41	Meningkatnya Prasarana Jalan Kabupaten yang Berkualitas dan Merata	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	85,78%	Data tidak tersedia
42	Meningkatnya Sarana Pemukiman Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Bersanitasi Aman	84,19%	Data tidak tersedia
43	Meningkatnya Utilitas Permukiman Masyarakat Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Berakses Air Minum	97,3%	Data tidak tersedia
44	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	11,72 %	Data tidak tersedia
45	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	148,78**	Data tidak tersedia

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi Nasional /Regional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	Mengembangkan Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal	PAD Bidang Pariwisata	0,037%	Data tidak tersedia
47	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	707.504	Data tidak tersedia
48	Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah dan Pelestarian Kearifan Lokal	Organisasi Kepemudaan yang Aktif	75%	Data tidak tersedia

Sumber: LKJIP Pemerintah Kabupaten Jember

Dari 48 Indikator, terdapat 14 indikator yang dapat diperbandingkan realisasinya dengan angka rata rata nasional, atau dengan realisasi Kabupaten/ Kota se- Jawa Timur, yaitu :

1. Pertumbuhan PDRB / Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan PDRB / LPE Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 4,86% atau 0,07 poin lebih rendah dibandingkan Pertumbuhan PDRB/LPE Jawa Timur . Pertumbuhan PDRB/LPE Jawa Timur sebesar 4,93% berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2024 Pers Release BPS tanggal 03 Maret 2025. Pertumbuhan PDRB/LPE Kabupaten Jember cenderung menurun dimana hal ini menunjukkan kinerja kurang optimal dalam bidang perekonomian.

2. Indeks GINI / GINI Ratio

Indeks GINI Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 0,317 atau 0,064 poin lebih rendah dibandingkan Indeks GINI Nasional . Indeks GINI nasional sebesar 0,381 berdasarkan data Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, 2024 yang dirilis dalam web resmi BPS tanggal 15 Januari 2025. GINI Ratio Kabupaten Jember cenderung menurun dimana hal ini menunjukkan kinerja positif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Jember.



3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)

Berdasarkan Indeks SPBE Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 3,54 atau sebanyak 0,42 poin diatas Indeks SPBE Nasional. Namun Indeks SPBE Kabupaten Jember 0,89 poin dibawah Indeks SPBE Jawa Timur yaitu sebesar 4,43.

Dibandingkan dengan capaian nasional dan di provinsi Jawa Timur, Dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Jember cukup optimal namun perlu dilakukan percepatan dalam rangka pelayanan publik yang lebih baik

4. Laju Inflasi

Laju Inflasi Kabupaten Jember (y.oy) tahun 2024 sebesar 1,74 atau 0,17 poin lebih tinggi dibandingkan Laju Inflasi Nasional . Laju inflasi nasional sebesar 1,57 berdasarkan data inflasi yang dirilis dalam web resmi Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>). Laju inflasi Kabupaten Jember yang stabil menunjukkan pengendalian inflasi Pemerintah Kabupaten Jember cukup optimal dan diharapkan dapat menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian, Terjaganya biaya produksi, mendorong peningkatan investasi dan produksi.

5. Nilai SAKIP

Berdasarkan rilis berita tanggal September 2024 pada web resmi Kementerian PANRB pada <https://www.menpan.go.id> menunjukkan rata rata Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten secara Nasional sebesar 64,23. Dimana Nilai SAKIP Kabupaten Jember tahun 2024 (62,50/B) dibawah nilai SAKIP nasional untuk Pemerintah Kabupaten. Sedangkan dibandingkan dengan data yang dirilis Pemerintah Prov. Jawa Timur, nilai SAKIP Kabupaten Jember berada di bawah nilai SAKIP rata rata Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur (<https://ro-organisasi.jatimprov.go.id/dashboard/sakip>)

Hal ini menunjukkan kurangnya kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember, dan diperlukan percepatan serta perbaikan seluruh aspek SAKIP.



6. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 9,01%, realisasi Angka Kemiskinan Nasional sebesar 9,03% dan Angka Kemiskinan Jawa Timur sebesar 9,79%. Angka kemiskinan di Kabupaten Jember lebih kecil 0,2 poin dibawah angka kemiskinan nasional dan lebih kecil 0,78 poin dibanding angka kemiskinan Jawa Timur.

7. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Jember tahun 2024 sangat optimal. Hal ini diperoleh dari perbandingan IPP Kabupaten Jember dan Provinsi Jawa Timur, dimana berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB no.659 tahun 2024, IPP Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 4,62 (A) dimana angka ini 0,01 poin lebih rendah dibandingkan dengan IPP Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebesar 4,63(A).

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Berdasarkan Data Ketenagakerjaan Kabupaten Jember yang dirilis BPS tanggal 5 Desember 2024 capaian TPT Kabupaten Jember cukup optimal dimana mencapai 3,23%, atau 0,68 poin lebih rendah dibandingkan TPT Nasional sebesar 4,91% sebagaimana data yang dirilis BPS tanggal 5 November 2024.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Dibanding dengan IKLH nasional 73,57, IKLH Kabupaten Jember 63,89 poin lebih rendah dibanding IKLH nasional tahun 2024 atau sebesar 63,89. Dimana hal ini menunjukkan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jember kurang optimal.

10. Indeks Kualitas Air (IKA)

Dibanding dengan IKA nasional 54,76, IKA Kabupaten Jember 39,66 . angka ini lebih rendah dibanding rata rata IKA nasional tahun 2024 sebesar 63,89. Perbedaan sebesar 15,1 poin cukup signifikan



dan menunjukkan pengelolaan lingkungan hidup khususnya kualitas air di Kabupaten Jember kurang optimal.

11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)

IKL Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 52,82, Sedangkan IKL Nasional sebesar 62,25. IKL Kabupaten Jember lebih rendah dibandingkan dengan IKL rata rata Nasional sebesar 9,43 poin. Disparitas yang signifikan, menunjukkan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Jember khususnya pada Kualitas Tutupan Lahan kurang optimal.

12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 70,93 dibawah realisasi IPM Jawa Timur sebesar 75,35 dan IPM Nasional sebesar 75,02.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Jember relatif kurang optimal dibanding daerah lain se-jawa Timur maupun secara nasional, dimana IPM di Kabupaten Jember mencapai 4,42 poin lebih rendah dibanding IPM Jawa Timur dan 4,09 poin lebih rendah dibanding IPM Nasional.

13. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan menggunakan angka Usia Harapan Hidup (UHH) . Indeks Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 74,17 atau lebih tinggi sebesar 1,82 poin dibanding Indeks Kesehatan Jawa Timur . Angka Indeks Kesehatan Kabupaten Jember lebih tinggi 1,78 poin diatas Indeks Kesehatan Nasional tahun 2024.

14. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan menggunakan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) . Indeks Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 13,50 atau lebih tinggi sebesar 0,07 poin dibanding Indeks



Pendidikan Jawa Timur . Angka Indeks Pendidikan Kabupaten Jember lebih tinggi 0,29 poin diatas Indeks Pendidikan Nasional tahun 2024.

F. Analisis Penyebab Penurunan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternative Solusi

Salah satu analisis capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah dengan melakukan analisis penyebab penurunan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang akan dilaksanakan,

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan Predikat nilai realisasi kinerja yang dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

Adapun predikat keber hasilan atas realisasi kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Predikat Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berbasis Potensi Wilayah	Pertumbuhan PDRB / Laju Pertumbuhan Ekonomi	91,70%					
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	97,68%					
3	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	95,55%					
4	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak	Indeks GINI	98,74%					
5	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	105,46%					
6	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	96%**					
7	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	125,69%					
8	Terjaganya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Keindahan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100%					
9	Meningkatnya Kualitas Administrasi Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	99,14%					
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	147,50%					
11	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	102,21%					
12	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana	100%					



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Predikat Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah (SOTK, Proses Bisnis, Anjab/ ABK, Evaluasi Jabatan dan SOP)						
13	Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi	130,40%					
14	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	100%					
15	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat	100%					
16	Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	100%					
17	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100%					
18	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan Perundang – undangan yang Berlaku	Tingkat Maturitas SPIP	100%					
19	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan/Atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%					
20	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Kabupaten Jember	80,89%					
21	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	87,38%					
22	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Oleh SDM Aparatur yang Kompeten	ASN Yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	101,06%					
23	Mengentaskan Kemiskinan Dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial	Angka Kemiskinan	97,61%					



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Predikat Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
	Dasar Lainnya.							
24	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya	Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	36,33%					
25	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	181,82%					
26	Meningkatkan Investasi Dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal Yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	93,68%					
27	Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/PMA Berskala Nasional	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	124%					
28	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Usaha Mikro	Cakupan Pembinaan Usaha Mikro	1.567%					
29	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	128,85%					
30	Meningkatnya Angkatan Kerja yang Berhasil Ditempatkan	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	616%					
31	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lestari Dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100,54%					
32	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	73,87%					
33	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	119,36%					
34	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	96,26%					
35	Meningkatkan Kesenjangan Dan Kualitas SDM.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	102,20%					
36	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (UHH)	104,17					
37	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan (HLS)	88,82%					
38	Meningkatnya Kualitas Kesenjangan Gender Dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,43%**					
39	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	101,19%					
40	Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Serta Berperspektif Kebencanaan.	Indeks Infrastruktur	81,44%					



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Predikat Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja				
				ST	T	S	R	SR
41	Meningkatnya Prasarana Jalan Kabupaten yang Berkualitas dan Merata	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	99,74%					
42	Meningkatnya Sarana Pemukiman Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Bersanitasi Aman	97,89%					
43	Meningkatnya Utilitas Permukiman Masyarakat Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Berakses Air Minum	115,83%					
44	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	58,6%					
45	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	105,24%**					
46	Mengembangkan Pariwisata daerah Yang Terintegrasi Dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.	PAD Bidang Pariwisata	8%					
47	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	597%					
48	Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah dan Pelestarian Kearifan Lokal	Organisasi Kepemudaan yang Aktif	100%					

Keterangan :

- ST = Sangat Tinggi, T=Tinggi, S=Sedang, R=Rendah, SR= Sangat Rendah

- (**) = pengukuran capaian menggunakan data tahun 2023 yang dirilis pada tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa 40 capaian indikator (83%) termasuk kategori Sangat Tinggi, 4 capaian indikator (4,3%) termasuk kategori capaian Tinggi, 1 capaian indikator (2,1%) dalam kategori sedang, 1 capaian indikator dalam kategori rendah, dan 2 capaian indikator (4,2%) dalam kategori sangat rendah.

Secara keseluruhan faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan /sasaran adalah sebagai berikut :



Kinerja Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berbasis potensi wilayah

Pada Tujuan 1 dengan indikator Pertumbuhan PDRB/LPE, menunjukkan capaian 91,70% dan termasuk kategori capaian Sangat Tinggi. Data PDRB tahun 2024, yang dirilis oleh BPS pada tanggal 3 Maret 2025, menunjukkan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,86 persen, menurun dibanding tahun 2023 sebesar 4,93%. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 10,41%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang tumbuh sebesar 10,58%.

LPE Kabupaten Jember lebih rendah dibandingkan dengan LPE Jawa Timur pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,93 persen dimana pertumbuhan ekonomi ini mengalami penurunan dibanding LPE Jawa timur tahun 2023 sebesar 4,95 persen.

Berdasarkan cascade kinerja pada RPJMD 2021-2026, Keberhasilan capaian kinerja tujuan tersebut didukung capaian kinerja 2 (dua) sasaran yaitu :

- Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; dan
- Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan

Sasaran “Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan” dengan indikator Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan, menunjukkan persentase capaian 97,68% dan termasuk kategori Capaian Sangat Tinggi. Pengukuran kinerja menggunakan data PDRB yang tercantum dalam “Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2025”, Peranan/ kontribusi masing masing lapangan usaha relatif stabil dan terus meningkat untuk PDRB Industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran selama 4 tahun terakhir. Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan sebesar 20,89% pada tahun 2023, 20,83% pada tahun 2022 dan 21,13% pada tahun 2021.



Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan PDRB Industri pengolahan dengan mengoptimalkan perencanaan dan pembangunan industri, peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Rencana perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan kontribusi PDRB kategori Industri Pengolahan adalah mengoptimalkan terhadap apa yang sudah dilaksanakan, antara lain dengan :

- Memperbanyak jumlah dan jenis pelatihan dalam rangka pembinaan industri;
- Meningkatkan pembinaan kepada IKM agar terdaftar dalam SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) yang bermanfaat untuk membangun basis data untuk pembangunan industri , dan sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola data; dan
- Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Instansi yang terkait.

Sasaran “Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran” dengan indikator Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, menunjukkan persentase capaian 95,55% dan termasuk kategori Capaian Sangat Tinggi. Pengukuran kinerja menggunakan data PDRB yang tercantum dalam “Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2025”. Peranan/ kontribusi masing masing lapangan usaha relatif stabil dan terus meningkat untuk PDRB Industri pengolahan selama 3 tahun terakhir. Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 14,89% pada tahun 2023, 14,77% pada tahun 2022 dan 14,26% pada tahun 2021, namun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024 sebesar 14,82%

Perkembangan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Jember antara lain didukung tingginya aktivitas perdagangan di Kabupaten Jember pada kurang lebih sebanyak 30 Pasar Rakyat , tingkat konsumsi domestik yang kuat dikarenakan



jumlah penduduk dan tingkat daya beli dari masyarakat Jember yang meningkat , serta Peningkatan Jumlah toko modern berjangkauan yang ada.

Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran antara lain dengan penyediaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan yang layak, meningkatkan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam pengendalian inflasi, melaksanakan operasi pasar untuk Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, serta melaksanakan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan meningkatkan UTP Bertanda Tera.

Upaya perbaikan kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kontribusi PDRB kategori Perdagangan besar dan eceran adalah mengoptimalkan seluruh program dengan melibatkan lebih banyak stake holder.

Kinerja Tujuan 2 : “Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak”

Tujuan 2 diukur menggunakan indikator tujuan Indeks GINI. Target Indeks GINI tahun 2024 sebesar 0,317 tercapai 100%. Indeks GINI tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023 (0,344), dimana hal ini merupakan kinerja pembangunan yang positif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Indeks GINI 2024 lebih rendah dibandingkan dengan angka indeks GINI nasional.

Berdasarkan cascade kinerja pada RPJMD 2021-2026, Keberhasilan capaian kinerja tujuan tersebut didukung capaian kinerja 2 (dua) sasaran yaitu :

- Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Pertanian; dan
- Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perikanan.

Sasaran “Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Pertanian” dengan indikator Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, menunjukkan persentase capaian 105,46% dan termasuk kategori



Capaian Sangat Tinggi. Berdasarkan data PDRB pada Laporan “Kabupaten Jember Dalam Angka tahun 2025” yang dirilis BPS Bulan Maret 2025, Kontribusi PDRB pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan / Agriculture Forestry and Fishing tahun 2024 tercatat sebesar 25,71%. Peranan/ kontribusi masing masing lapangan usaha relatif stabil dan terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Namun pada lapangan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan menunjukkan penurunan pada tahun 2023. Kontribusi PDRB Kategori / subsektor Pertanian sebesar 23,59% pada tahun 2023, dan 23,81% pada tahun 2022. Kontribusi PDRB Kategori / subsektor Perikanan sebesar 2,16% pada tahun 2023, dan 2,18 % pada tahun 2022.

Merujuk pada hasil sensus pertanian tahap I tahun 2023 yang dilaksanakan BPS hal ini disebabkan tren penyusutan usaha pertanian di Indonesia, yang disebabkan menurunnya luasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, produktivitas lahan yang rendah, minimnya regenerasi pekerja sektor pertanian serta rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar pekerja sektor pertanian.

Untuk itu program peningkatan kontribusi PDRB diarahkan pada program program pertanian yang bersifat intensifikasi (pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan pengairan atau irigasi yang baik) untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta perbaikan sarana prasarana pertanian (jalan usaha tani, jaringan usaha tani, sarana prasarana bagi penyuluh serta peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian. Program sekolah lapang untuk menambah pengetahuan kelompok tani , antara lain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola tanaman tembakau. Pelatihan yang diberikan diantaranya pemilihan bibit, cara penanaman, cara pengairan, pemberian pupuk dan pestisida dalam meningkatkan hasil produksi, dan penggunaan alat mesin pertanian juga dilaksanakan oleh Balai Penyuluh Pertanian.

Sasaran ‘Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perikanan’ dengan indikator Kontribusi PDRB Kategori Perikanan, menunjukkan persentase capaian 96% dan termasuk kategori Capaian Sangat Tinggi. Pengukuran kinerja menggunakan data BPS no. 08/03/3509/th.VII tanggal 1 Maret 2024, tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2023. Berdasarkan surat Kepala BPS Kabupaten Jember nomor B-126/35095/HM.310/2024 bahwasanya BPS hanya merilis data sampai dengan kategori / sektor lapangan usaha dengan total 17 sektor / kategori, PDRB subsektor perikanan telah menjadi satu dengan kategori pertanian .

Namun demikian untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan di sektor perikanan, dapat ditinjau melalui indikator produksi perikanan dan sertifikasi produk olahan perikanan sebagaimana terdapat pada Laporan Kinerja Dinas Perikanan tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.2.8 Laporan Kinerja Dinas Perikanan tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% capaian
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,7%	1,6%	94%
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2%	2%	100%
3	Persentase Produk Olahan Perikanan Yang bersertifikat	88%	87%	98,86%

Sumber data: Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kab. Jember th.2024

Capaian kinerja tersebut, didorong efektivitas pelaksanaan beberapa program utama, yaitu : pemberian asuransi nelayan melalui Program pengelolaan perikanan tangkap, pendampingan, pembinaan teknis budi daya serta penyediaan sarpras pembudidayaan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya.

Kedepan, kontribusi sektor perikanan diharapkan terus meningkat dengan memperluas cakupan jumlah penerima program, sinergitas program dan pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan

masyarakat nelayan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tukar petani/nelayan.

Kinerja Tujuan 3 : “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”,

Kinerja Tujuan 3 diukur menggunakan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Indeks RB tahun 2024 sebesar 85,47 (Kategori A) meningkat tajam dibanding Indeks RB tahun 2023 yaitu 66,61 (Kategori B) dan Indeks RB tahun 2022, yaitu 62,28. Angka ini telah melampaui nilai rata rata RB Pemerintah Kabupaten / Kota tahun 2023 yaitu 59,32 / kategori CC, dimana hal ini merupakan kinerja pembangunan yang positif dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Indeks RB tahun 2024 telah melampaui target jangka menengah dalam RPJMD yaitu nilai indeks 70 (kategori BB) serta realisasi Indeks RB Nasional

Indeks RB tahun 2024 merupakan hasil evaluasi Kementerian PANRB yang berpedoman pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Secara garis besar, komponen / aspek tata kelola pemerintahan dalam evaluasi RB tahun 2024 mencakup dua aspek yaitu :

- Kualitas RB General , berhubungan dengan penerapan tata kelola internal pemerintahan, yang mencakup penerapan sistem merit, penyelenggaraan pelayanan publik, maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, penerapan Zona Integritas, tingkat digitalisasi arsip, akuntabilitas kinerja, Indeks SPBE, kualitas kebijakan, reformasi hukum, opini BPK, tata kelola pengadaan, penyederhanaan birokrasi, tingkat penerapan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi , tata kelola pengadaan;
- Kualitas penerapan RB Tematik, berhubungan dengan kualitas penerapan RB general dalam upaya penanganan permasalahan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, antara lain ‘Penurunan Kemiskinan, PPPDN/ Peningkatan



Penggunaan produk Dalam Negeri, Peningkatan Investasi, Pengendalian Inflasi, dan Digitalisasi Penanganan Stunting).

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indeks komposit dari berbagai indikator tata kelola pemerintahan. Rencana aksi perbaikan kedepan lebih difokuskan pada area atau aspek dari Reformasi Birokrasi yang saat ini kurang optimal pencapaiannya, antara lain:

- Pembinaan terkait penancangan dan pembentukan Zona Integritas, dimana tahun 2024 belum ada unit kerja yang mendapatkan predikat Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi;
- Percepatan penerapan digitalisasi arsip dengan penerapan aplikasi kearsipan dinamis nasional-SRIKANDI, dengan melanjutkan tahapan operasionalisasi aplikasi SRIKANDI;
- Pembinaan tata kelola penyusunan kebijakan di Lingkup Pemkab Jember agar memenuhi kaidah penyusunan kebijakan yang baik
- Perbaikan tata kelola pengadaan barang dan Jasa pemerintah;
- Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024; dan
- Memperbaiki proses bisnis pada isu-isu strategis sesuai fokus RB tematik Kabupaten Jember, seperti penanggulangan kemiskinan, digitalisasi penanganan stunting, peningkatan investasi, PPPDN dan pengendalian inflasi, sehingga strategi yang disusun dapat menghasilkan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan cascade kinerja pada RPJMD 2021-2026, Keberhasilan capaian kinerja tujuan tersebut didukung capaian kinerja 15 (lima belas) sasaran, yaitu :

Sasaran ‘Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas’, dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP). IPP merupakan salah satu indikator sasaran pendukung capaian IRB, dengan kategori capaian Sangat Tinggi, yaitu dengan capaian 102,21%.

Indeks Pelayanan Publik adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik/PEKPP pada unit kerja dalam



jangka waktu tertentu. Pelaksanaan PEKPP berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2022.

IPP dapat menjadi bahan perumusan kebijakan pelayanan publik karena di dalamnya merekomendasikan aspek pelayanan publik yang perlu diperbaiki, baik dari komponen kebijakan pelayanan, komponen profesionalisme SDM, komponen sarana prasarana, komponen sistem informasi pelayanan publik, komponen konsultasi dan pengaduan, dan komponen inovasi pelayanan. IPP Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 4,62 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 659 tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah tahun 2024. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Jember terus meningkat selama tahun 2021 s.d. 2024. Nilai ini meningkat dibandingkan IPP sebesar 3,88 pada tahun 2022 dan 3,19 pada tahun 2021 serta 4,51 tahun 2023. Capaian IPP tahun 2024 secara nasional termasuk dalam peringkat 4 terbaik kategori Pemerintah Kabupaten dan lebih tinggi dari IPP nasional serta IPP Provinsi Jawa Timur.

Hasil ini selaras dengan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI sebagaimana Keputusan Ketua Ombudsman RI nomor 252 tahun 2024 tentang hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Jember (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dengan nilai 98,15, Zona Hijau, Kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi, Hasil penilaian Kabupaten Jember berada dalam peringkat 12 terbaik Nasional di tingkat Pemerintah Kabupaten.

Keberhasilan perbaikan kualitas pelayanan publik tahun 2024, antara lain dengan dukungan kebijakan penganggaran, dan dukungan kebijakan terkait keterbukaan informasi, inovasi dan penerapan standar pelayanan lainnya, antara lain:



- Pada aspek keterbukaan informasi telah disediakan sistem Informasi pelayanan publik (SIPP), serta mengintegrasikan SIPP dalam layanan mobile superapps J-KOPI yang memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat memperoleh informasi Pelayanan Publik. Publikasi informasi pelayanan juga didorong melalui banyak kanal atau media offline maupun online;
- Pembinaan, pemantauan, pendampingan kepada UPP terkait kepatuhan penerapan standar pelayanan;
- Kebijakan memberikan apresiasi kepada unit pelayanan publik melalui penyelenggaraan event tahunan penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, yang diharapkan mendorong pemahaman yang lebih terkait kewajiban penerapan standar pelayanan.

Sasaran ‘Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik’, dengan Indikator Indeks SPBE . Indeks SPBE merupakan salah satu indikator sasaran pendukung capaian IRB, dengan kategori capaian Sangat Tinggi, yaitu dengan capaian 147,50%.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Evaluasi SPBE dilaksanakan dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Peningkatan nilai evaluasi Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2024, karena Pemerintah Kabupaten Jember dinilai telah menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Beberapa aspek yang dinilai kategori memuaskan adalah aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, dan kategori sangat baik pada aspek



Penyelenggara SPBE dan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rencana perbaikan pada beberapa aspek sebagaimana rekomendasi perbaikan hasil evaluasi adalah :

- Meningkatkan Layanan kearsipan dinamis kedepan akan segera dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi umum SRIKANDI. Karena PemKab Jember belum menggunakan Aplikasi SRIKANDI yang dibangun oleh ANRI, dan sampai saat ini masih dalam tahap uji coba pemanfaatan aplikasi tersebut;
- Meningkatkan aspek Penerapan Manajemen SPBE, kelemahan terdapat pada indikator Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE, karena dilaksanakan tidak didasarkan pada peta rencana. Sehingga Penyusunan dokumen peta rencana yang komprehensif sangat membantu agar pelaksanaan program lebih terarah dan terencana;
- Selain itu, dalam Pembangunan Aplikasi SPBE, Aktivitas-Aktivitas Siklus Hidup Pembangunan Aplikasi perlu dilakukan secara lengkap;
- Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, dan Pelaksanaan Audit TIK akan ditingkatkan lagi, dengan adanya review serta tindak lanjut hasil review.

Sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku” dengan indikator Level Maturitas SPIP merupakan salah satu indikator sasaran pendukung capaian IRB, dengan kategori capaian Sangat Tinggi, yaitu dengan capaian 100%, meningkat dari level 2 pada tahun 2022 ke level 3 dengan nilai 3,059 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 Level maturitas SPIP mencapai level 3 dengan kenaikan nilai menjadi 3,13. Pengukuran capaian kinerja menggunakan data maturitas SPIP yang terdapat didalam rincian IRB pada portal RB pada Bulan Maret 2025



Tabel 2.2.9
Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
LKE KEMENPANRB

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.33	2.33	Terdapat Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional belum ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi, yaitu Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional, yaitu target tingkat keberhasilan Zona Integritas ditargetkan 1, sedangkan berdasarkan Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024 seharusnya target minimal adalah 2,5. Terdapat Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dengan Rencana Aksi secara relevan. Terdapat indikator output atas rencana aksi yang belum relevan dan cukup menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan..	Memastikan Kegiatan Utama Mandatory yang ada dalam Permenpanrb nomor 3 Tahun 2023 sebagai mandat nasional telah ditetapkan sebagai Kegiatan Utama di dalam Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Terdapat target Kegiatan Utama yang belum didasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target nasional (Kepmenpanrb nomor 182 Tahun 2024). Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama. Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran..
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	100	5.44		
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penederhanaan Birokrasi	3	5	3		sudah sangat baik
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	3.13	2.5	1. sebagian besar sasaran program dan kegiatan belum menggambarkan substansi program dan kegiatan; 2. penetapan indikator kinerja sasaran pemda, sasaran OPD, program, ataupun kegiatan belum didukung dengan pertimbangan yang terukur bagaimana sasaran/program/kegiatan dapat dicapai; 3. terdapat indikator kinerja sasaran strategis belum ditetapkan dengan tepat dan target kinerja belum memperhatikan target kinerja diatasnya baik di dokumen perencanaan pemda maupun OPD 4. Belum terdapat pengomunikasian hasil proses penilaian risiko	1. Memformulasikan substansi sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah yang tepat serta menetapkan indikator kinerja yang cukup, tepat, dan terukur sesuai substansi yang telah diformulasikan; 2. Menetapkan target yang tepat, mendukung target perencanaan level di atasnya, dan dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan capaian pada tahun-tahun sebelumnya; 3. menerapkan manajemen risiko dalam

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Inspektorat selaku PD leading berhasil melakukan penguatan pada PD Koordinator (Bappeda, BPKAD, Inspektorat) dan sinergi pada PD pendukung maturitas SPIP

Upaya penguatan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kematangan /maturitas sistem pengendalian internal pemerintah antara lain tahun 2024 :

- Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas catatan perbaikan dan rekomendasi, yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal oleh satuan kerja terkait. Implementasi rencana tindak lanjut ini wajib dilaporkan secara berkala dan terus ditingkatkan hingga mencapai Level yang lebih tinggi;
- Meningkatkan peran efektif tim internal audit;
- Melakukan pendampingan kepada PD agar menyusun pengelolaan resiko serta menentukan skala resiko pada masing masing penanggung jawab sub kegiatan.

Hal yang akan dilakukan, dan merupakan rekomendasi perbaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kematangan /maturitas sistem pengendalian internal pemerintah antara lain

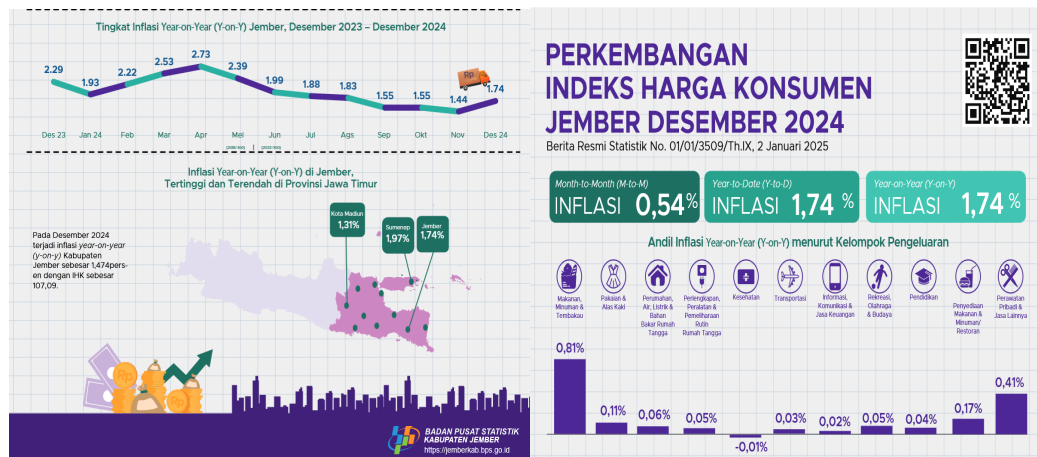
- a. Prioritas perbaikan pada perencanaan kinerja Perangkat Daerah, untuk memformulasikan substansi sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah yang tepat serta menetapkan indikator kinerja yang cukup, tepat, dan terukur sesuai substansi yang telah diformulasikan, menetapkan target yang tepat, mendukung target perencanaan level di atasnya, dan dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan capaian pada tahun-tahun sebelumnya;
- b. Menerapkan manajemen risiko dalam proses bisnis dan menggunakan hasil penilaian risiko sebagai dasar pengambilan keputusan;
- c. Pengomunikasian hasil proses penilaian risiko terhadap pihak-pihak terkait; dan
- d. Mengoptimalkan pemantauan realisasi Rencana Tindak Pengendalian maupun keterjadian risiko yang telah diidentifikasi, serta melakukan pencatatan/ pendokumentasian apabila risiko tersebut terjadi.

Sasaran ‘Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting’ dengan indikator Laju Inflasi, Laju inflasi menjadi salah satu indikator dalam RB tematik sebagaimana PermenPANRB No. 3 tahun 2023.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 01/01/3509/Th.IX, 2 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Jember, Laju Inflasi 1,74 dari target 2,5 pada tahun 2024. Realisasi ini menunjukkan capaian 130,4% dan termasuk kategori capaian kategori Sangat Tinggi. Keberhasilan mengendalikan laju inflasi pada tahun 2024, dengan laju inflasi 0,17 poin di atas Laju Inflasi Nasional yang berada di angka 1,57.



Gambar 2.2.1
Tingkat Inflasi YoY Jember Desember 2023 – Desember 2024
dan
Perkembangan Indeks Harga Konsumen Jember Desember 2024



Keberhasilan pengendalian Inflasi tahun 2024, antara lain didukung dengan pelaksanaan strategi:

- Optimalisasi koordinasi TPID melalui pelaksanaan High Level Meeting secara rutin melalui program inovasi “SI RAMBO” (Sinergi dan Kolaborasi Mingguan setiap Rabo), bersama Forkompimda Plus setiap minggunya dalam rangka memantau inflasi mingguan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Jember;
- Intervensi administered price atau Harga barang atau jasa yang diatur oleh pemerintah khususnya Pemerintah daerah seperti: Tarif Air Minum yang ditetapkan BUMD, Tarif Rumah Sakit dan Tarif Tempat Rekreasi untuk tidak naik dulu atau naik secara bertahap;
- Operasi Pasar, Pasar Murah, Sidak Distributor dan Pasar, oleh Tim Satgas Pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Forkompimda Plus;
- Pemantauan secara rutin harga Bapokting setiap hari di semua pasar Pemerintah Daerah dan publikasinya pada web resmi Pemerintah Kabupaten Jember;
- Memberikan subsidi Transportasi; dan

- Mengalokasikan anggaran BTT, yang digunakan untuk penanganan dampak Inflasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran ‘Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif dan Efisien’ dengan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Jember, menunjukkan capaian 80,89%. Capaian sasaran ini 80,89% dari target dan termasuk capaian dengan kategori Tinggi.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB no 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana Komponen nilai evaluasi SAKIP terdiri dari:

- Komponen perencanaan kinerja dengan bobot 30%;
- Komponen pengukuran kinerja dengan bobot 30%;
- Komponen pelaporan kinerja dengan bobot 15%; dan
- Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25%.

Berdasarkan Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/287/AA.05/2024 tanggal 3 September Tahun 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024, hasil evaluasi AKIP Kabupaten Jember menunjukkan predikat evaluasi kategori B/ Baik. Selama kurun waktu 2021-2024, nilai SAKIP Kabupaten Jember bertahan pada kategori Baik. Kategori Nilai evaluasi Pemkab Jember telah memenuhi target nasional nilai evaluasi AKIP untuk Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dalam RPJMN yaitu kategori Baik/B. Namun realisasi sasaran ini perlu diupayakan percepatan pencapaian dikarenakan belum memenuhi target RPJMD, dan menunjukkan realisasi dibawah angka rata rata nilai Evaluasi AKIP untuk Pemerintah Kabupaten secara nasional yaitu 64,23, menunjukkan peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun 2024 kurang signifikan dibanding peningkatan rata rata nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten.



Upaya yang dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan budaya kinerja di Lingkup Pemkab Jember, antara lain dengan menerapkan kebijakan reward and punishment terhadap hasil kinerja PD, menggunakan hasil evaluasi AKIP sebagai komponen pengurang TPP Pegawai pada tahun 2024. Peningkatan Nilai evaluasi AKIP Kabupaten Jember kurang signifikan dan stagnan pada kategori hasil evaluasi, antara lain disebabkan :

- Belum ditindaklanjutnya perubahan mendasar yang direkomendasikan terkait perbaikan perumusan kinerja di level Pemerintah Daerah dan PD agar berorientasi hasil dan memiliki indikator yang memenuhi kriteria SMART dan cukup, serta belum disusun dengan mekanisme penjenjangan kinerja yang sesuai dengan PermenPANRB nomor 89 tahun 2021. Tindaklanjut atas rekomendasi ini membutuhkan perubahan RPJMD dan Renstra yang akan dilakukan di tahun 2025 pada periode penyusunan RPJMD baru sesuai visi misi Kepala Daerah terpilih;
- Kurang optimalnya pembangunan sistem pengumpulan data dan pengukuran kinerja yang lengkap dan terintegrasi dengan pengukuran kinerja individu merupakan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, disamping catatan perbaikan mekanisme pelaporan kinerja dan evaluasi internal;
- Kurang optimalnya perbaikan pada seluruh aspek SAKIP (perencanaan, pengukuran , pelaporan dan evaluasi internal) yang membutuhkan sinergi dan komitmen Perangkat Daerah Koordinator.

Rencana perbaikan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif dan Efisien melalui SAKIP antara lain :

- Perbaikan kualitas perencanaan dan penjenjangan kinerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyusunan RPJMD dan Renstra- PD;



- Mengoptimalkan Sistem Informasi Pengumpulan data Kinerja (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah - SIPPD) yang dikelola Bappeda , tidak hanya untuk melaporkan kinerja atau realisasi program/ kegiatan/ sub kegiatan namun terutama dapat melaporkan progress pencapaian sasaran OPD sebagai bentuk pengendalian kinerja;
- Meningkatkan pemanfaatan Laporan Kinerja dalam pengendalian perencanaan kinerja di tahun berikutnya sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja serta menumbuhkan budaya kinerja ASN.

Sasaran ‘Terjaganya ketertiban umum, ketentraman Masyarakat dan Keindahan lingkungan’ yang diukur dengan tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum, ketentraman Masyarakat dan Keindahan lingkungan (K3) berdasarkan data Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember menunjukkan capaian sebesar 100% atau termasuk capaian kategori Sangat Tinggi.

Beberapa kendala antara lain terkait masih kurangnya kapasitas SDM dikarenakan tingkat permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan banyak pihak, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan perda.

Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja

- Ketersediaan anggaran dan personel yang cukup untuk mendukung kegiatan penegakan hukum dan pencegahan gangguan trantibum;
- Koordinasi antar Instansi seperti kepolisian, Satpol PP, TNI, dan instansi terkait lainnya dalam penanganan gangguan trantibum;
- Pelaksanaan sosialisasi penegakan perda yang optimal , meliputi sosialisasi tatap muka, patroli harian, melalui berbagai media visual;
- Pengembangan Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Jember , serta nomor petugas layanan untuk merespon pengaduan masyarakat;

Rencana perbaikan kedepan :

- Mengoptimalkan Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah pada masyarakat;
- Mengoptimalkan kegiatan patrol rutin oleh Pasukan Siaga Praja dan Pasukan Wanita Praja Satpol PP yang terjadwal dan terprogram, termasuk melaksanakan patrolisekitar segitiga emas dan tempat- tempat yang dianggap rawan pelanggaran Perda.
- Meningkatkan kapasitas Pasukan Siaga Praja

Sasaran ‘Meningkatnya Kualitas Administrasi Penduduk’

yang diukur dengan Indikator Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk menunjukkan capaian 99,14% termasuk dalam capaian kategori Sangat Tinggi. Target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jember melebihi target RI, dimana target nasional untuk rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk adalah 99,40%. Capaian 99,14% disebabkan masih kurangnya awareness masyarakat terhadap kepemilikan dokumen adminduk khususnya KTP, antara lain perilaku yang jamak dilakukan ketika masyarakat mengurus dokumen hanya ketika membutuhkan dokumen sebagai persyaratan melakukan aktivitas tertentu, kurangnya personil operator adminduk serta peralatan cetak KTP. Dalam rangka pemenuhan rasio penduduk berKTP, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

- Sosialisasi admindukcapil dan pelayanan jemput bola kepada masyarakat secara terus menerus dilaksanakan ke Kecamatan/ Desa, sekolah sekolah, mall, alun-alun Jember (area car free day/ CFD), pelayanan khusus Difabel dan Lansia serta anak kondisi 5 (Lima) Kelompok RANHAM;
- Karena untuk proses scan barcode yang hanya bisa dilakukan oleh petugas Disdukcapil, dapat terlebih dahulu pengajuan lewat surat oleh Instansi Pemerintah/ swasta/ sekolah ditujukan ke Disdukcapil untuk meminta pelayanan IKD di tempat;
- Program layanan khusus bagi masyarakat kelompok rentan melalui Tim Rujukan Sosial/TRS (sinergitas Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan) di 3 rumah sakit Daerah;



Rencana perbaikan kinerja kepemilikan KTP atau ratio penduduk ber-KTP antara lain :

- Memperbanyak titik-titik layanan mobile di wilayah;
- Memperbaiki kapasitas dan kualitas layanan aplikasi adminduk di kecamatan untuk mengoperasikan Aplikasi LAHBAKO dalam melayani secara langsung masyarakat yang tidak mempunyai HP Android;
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas layanan di kecamatan, serta memperbanyak publikasi dan sosialisasi.

‘Sasaran ‘Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik’ yang diukur dengan indikator Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah (SOTK, Proses Bisnis, Anjab/ABK, Evaluasi Jabatan dan SOP), menunjukkan capaian kinerja 100% dan termasuk kategori capaian Sangat Tinggi. Keberhasilan capaian dikarenakan pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dan optimalnya koordinasi antar perangkat Daerah penyusun

Ketersediaan dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah pada tahun 2024 telah tersedia sesuai dengan ketentuan perundangan , yang meliputi Dokumen kelembagaan / SOTK, dokumen analisis jabatan/dan analisi beban kerja / ABK, evaluasi jabatan dan SOP

a) Dokumen SOTK yang disusun pada tahun 2024 antara lain:

- Evaluasi SOTK berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/kota. Mengamanatkan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yang ditindaklanjuti dengan penetapan Perda Kabupaten Jember nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Perda nomor 3 tahun 2016 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang KSOTK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;



- Evaluasi SOTK berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, pembentukan, dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), yang ditindaklanjuti dengan pengusulan perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Menjadi Badan Perencanaan Dan Riset Daerah (BAPERIDA).
- b) Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan tahun 2024 telah tersusun berdasarkan ketentuan :
 - PermenPANRB no 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang mengatur tentang ketentuan umum; Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; Ketentuan Penutup Lampiran: Analisis Jabatan (Pelaksanaan analisis jabatan, Penetapan hasil analisis jabatan), Analisis Beban Kerja (Pelaksanaan analisis beban kerja, aspek-aspek dalam analisis beban kerja, teknik pelaksanaan analisis beban kerja). Beberapa perubahan berkaitan dengan pedoman analisis jabatan dan dilakukan beberapa kali penyesuaian dan revisi dokumen anjab di tahun 2024, meliputi :
 - Dalam rangka keterpaduan data kebutuhan pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, dilakukan desk kepada 50 UPTD Puskesmas, 3 RSD, dan 1006 UPTD Satuan Pendidikan SD dan SMP. Desk dilakukan untuk verifikasi data hasil Analisis Jabatan seluruh UPTD Satuan pendidikan dengan data guru dan siswa pada aplikasi DAPODIK, serta verifikasi kesesuaian penghitungan analisis jabatan pada Dinas Kesehatan dengan rencana kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan. Selanjutnya data hasil desk diinput kedalam SIASN-BKN
 - Hasil penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja menghasilkan Dokumen Evaluasi Jabatan, dimana dalam ketentuannya adalah wajib divalidasi oleh Kementerian

PANRB. Validasi tahun 2024 telah dilakukan dan telah mendapatkan rekomendasi dari kementerian PANRB. Yang selanjutnya ditetapkan secara formal dalam Peraturan Bupati Jember untuk digunakan dalam manajemen kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember,

- Dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan digunakan dalam manajemen kepegawaian, baik untuk pengusulan rencana kebutuhan pegawai, penentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menjadi dasar dalam Standar Kompetensi Jabatan , serta dasar penataan pegawai.

c) Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur

Peta proses bisnis sebagai dokumen yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi, telah disusun pada tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No 19 tahun 2018. Yang selanjutnya menjadi dasar dalam penerapan Arsitektur SPBE, dan menjadi acuan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) di setiap unit organisasi perangkat daerah.

SOP disusun berpedoman pada PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. SOP disusun untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan, dan untuk memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.

Sebagai salah satu dokumen yang wajib dipenuhi dalam standar pelayanan pada unit pelayanan publik, SOP telah disusun oleh seluruh unit pelayanan publik. Publikasi atas SOP dilakukan baik secara offline di ruang ruang pelayanan, maupun dalam Sistem



Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), serta di media sosial unit pelayanan

Rencana perbaikan adalah meningkatkan penerapan ketentuan SOP, dimana SOP perlu dievaluasi secara berkala sesuai perubahan proses bisnis di unit pelayanan masing masing. Perubahan struktur organisasi termasuk salah satu dasar perubahan peta proses bisnis pelayanan dan mempengaruhi perubahan SOP. Untuk itu kedepan akan dilaksanakan evaluasi dari peta proses bisnis dan SOP, untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur kelembagaan serta untuk mengetahui efektivitas dari SOP yang telah ditetapkan sebagai bahan penentuan kebijakan perbaikan pelayanan publik.

Sasaran ‘Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diukur dengan indikator Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)’ menunjukkan capaian kinerja 100%. Angka ini dihitung dari persentase PD pengampu urusan LPPD sebanyak 30 PD yang keseluruhan telah melaporkan data realisasi kinerja sesuai urusan pemerintahan.

Faktor utama Keberhasilan

- Penyusunan LPPD telah dilaksanakan sesuai pedoman Permendagri Nomor 18 tahun 2020 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2019;
- Peningkatan pemahaman penyusun LPPD terhadap elemen data yang dibutuhkan dalam LPPD; dan
- Terjalannya sinergi antara tim penyusun dan tim review dalam tahapan penyusunan LPPD.

Rencana perbaikan bersifat strategis untuk meningkatkan mekanisme koordinasi antara tim penyusun dan tim review LPPD, sehingga setiap PD dapat lebih meningkatkan validitas data kinerja, memperbaiki mekanisme pengumpulan data internal dan menindaklanjuti hasil review dalam proses penyusunan LPPD tahun berjalan .



Sasaran ‘Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat’ yang diukur dengan Persentase Peningkatan Kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat menunjukkan capaian 100%. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BAPPEDA Kabupaten Jember dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pada tahun 2024 terdapat 130 kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta dilaksanakan dan direalisasikan oleh perangkat daerah. Capaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selanjutnya diukur melalui Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah (SIPPD). Sehubungan terdapat refocusing pada APBD TA 2024 sehingga angka ini menurun dibandingkan jumlah kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat pada tahun 2023 yang tercatat sebanyak 184 kegiatan, namun demikian secara persentase capaian kinerja masih berada di angka 100% atau telah mencapai target.

Dalam hal pelaksanaannya, masih ditemukan kendala dalam Peningkatan Kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat antara lain dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan-kegiatan pada perangkat daerah yang memiliki IKU terkait peningkatan keterampilan masyarakat agar Perangkat Daerah mengalokasikan anggaran dan menyelaraskan perencanaan kegiatan yang memiliki output peningkatan keterampilan masyarakat, yang menunjang target IKU perangkat daerah dan sesuai prioritas daerah.

Rencana perbaikan kedepan adalah melakukan pendampingan kepada perencana perangkat daerah, pemetaan perencanaan output kegiatan pada tahapan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat daerah dan mengefektifkan evaluasi pengendalian perangkat daerah.



Sasaran ‘Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD’ yang diukur dengan Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD menunjukkan capaian 100%, Berdasarkan data dan informasi BAPPEDA Kabupaten Jember yang bersumber dari SIPD, pada tahun 2024 terdapat 100% Program Kerja DPRD dalam bentuk penyampaian pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD melalui SIPD dan telah terintegrasi di dalam RKPD Tahun 2025 tepat waktu sesuai amanat Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu seminggu sebelum Musrenbang RKPD dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Keberhasilan pengintegrasian ini karena terlaksananya tahapan-tahapan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan telah optimal memanfaatkan sistem informasi (SIPD) dalam melaksanakan dan mengawal proses perencanaan sampai dengan tahap penganggaran dan realisasi.

Rencana perbaikan kedepan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk dapat melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD di bidang perencanaan Pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, kebijakan publik dan evaluasi program.

Sasaran ‘Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah’, yang diukur dengan Persentase



Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menunjukkan capaian kinerja 100% dan termasuk capaian kategori Sangat Tinggi. Salah satu langkah terobosan meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program kolaboratif Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melibatkan Kodim 0824, Secaba Rindam V Brawijaya, Polres Jember, Satuan Polisi Pamong Praja, PPI, Universitas Jember dan Universitas Muhammadiyah untuk Program Pembentukan Kader Bela Negara dengan target peserta tahun 2024 dari unsur pelajar, dan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).

Serta serangkaian kegiatan koordinatif untuk meningkatkan stabilitas politik daerah antara lain Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Sosialisasi santri Bersinar (Bersih Narkoba) di pesantren pesantren, Jember Pluralitas Hub (JPH), Sarasehan/ Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial serta penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) diberikan kepada Tim Pelapor Desk Pilkada dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Perbaikan kedepan dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah adalah dengan memperluas cakupan pelibatan masyarakat dengan sebaran yang merata dan berbagai komponen masyarakat lainnya dalam program peningkatan wawasan kebangsaan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Sasaran ‘Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan/Atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu’ yang diukur dengan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan capaian 100%, Berdasarkan Data BAPPEDA Kabupaten Jember, pada tahun 2024 telah tersusun Dokumen Perencanaan Pembangunan pada tahun 2024 yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun



2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024, dan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 yang selaras dengan dengan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Keberhasilan penyusunan dokumen perencanaan karena terlaksananya tahapan tahapn sinkronisasi perencanaan dan pembangunan daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana perbaikan kedepan dengan meningkatkan kualitas dan informasi perencanaan Pembangunan daerah, meningkatkan koordinasi dengan stakeholder, mitra Pembangunan, dan pemangku kepentingan, peningkatkan kapasitas SDM perencana, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah.

Sasaran ‘Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah’ yang diukur dengan Persentase Realisasi Pajak Daerah menunjukkan capaian 87,38% dan termasuk kategori capaian Tinggi. Data realisasi pajak tahun 2024 berdasarkan Data Realisasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagai berikut:

KODE	PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	%
4.1.1.06	Pajak Hotel	7.000.000.000,00	6.015.370.911,00	85,93
4.1.1.07	Pajak Restoran	26.200.000.000,00	36.386.868.838,00	138,88
4.1.1.08	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	4.189.734.140,00	104,74

KODE	PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	%
4.1.1.09	Pajak Reklame	10.350.000.000,00	6.558.686.668,00	63,37
1.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	95.000.000.000,00	105.753.149.991,00	111,32
4.1.1.11	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.533.979.584,00	76,70
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	948.988.460,00	94,90
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000.000,00	7.232.583.934,00	36,16
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.000.000.000,00	55.094.481.847,00	38,87
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	100.000.000.000,00	78.231.421.434,00	78,23
	JUMLAH	345.550.000.000,00	301.945.265.807,00	87,38

Dari 10 (sepuluh) hasil pajak daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) jenis pajak yang telah melampaui target tahun yang telah ditentukan di tahun 2024, yaitu:

1. Pajak restoran dan sejenisnya mencapai 138,88%, dengan realisasi sebesar Rp. 36.386.868.838,00;
2. Pajak Tontonan Film mencapai 104,74% dengan realisasi sebesar Rp. 4.189.734.140,00; dan
3. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Sumber Lain mencapai 111,37% dengan realisasi Rp. 105.753.149.991,00.

Faktor pendorong capaian tersebut adalah :

- a. Peningkatan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan jumlah pengunjung restoran , bioskop, serta peningkatan konsumsi listrik oleh sektor industri, bisnis dan rumah tangga serta bertambahnya jumlah pelanggan listrik baik kalangan usaha maupun perumahan;
- b. Efektivitas pengawasan pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemilik usaha dalam melaporkan serta membayar pajak tepat waktu; dan
- c. Optimalisasi sistem pemungutan pajak melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak sehingga mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak.

Beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak mencapai target yang telah ditentukan, antara lain adalah :

1. Pajak Hotel mencapai 85,93% dengan realisasi sebesar Rp. 6.015.370.911,00;
2. Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron mencapai 63,37% dengan realisasi sebesar Rp. 6.558.686.668,00.
3. Pajak Parkir mencapai 76,70% dengan realisasi sebesar Rp. 1.533.949.584,00;
4. Pajak Air Tanah mencapai 94,90% dengan realisasi sebesar Rp. 948.988.460,00;
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya mencapai 36,16% dengan realisasi sebesar Rp. 7.232.583.934,00;
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai 68,87% dengan realisasi sebesar Rp. 55.094.481.847,00; dan
7. BPHTB - Pemindahan Hak mencapai 78,23% dengan realisasi sebesar Rp. 78.231.421.434,00.

Berbagai faktor penghambat yang berhasil diidentifikasi, merupakan penyebab tidak tercapainya target yang telah ditentukan adalah :

- a. Menurunnya tingkat hunian hotel, selain disebabkan faktor perekonomian masyarakat juga karena tersedianya banyak



alternatif hunian yang lebih murah selain hotel seperti apartemen sewa dan kos harian yang tidak dikenakan pajak hotel;

- b. Beralihnya strategi pemasaran ke media digital seperti media sosial dan iklan online sehingga mengurangi penggunaan reklame fisik;
- c. Perubahan pola mobilitas masyarakat seperti penggunaan transportasi online;
- d. Kurang efektivnya tata kelola dan pengendalian pemungutan , penyetoran pajak parkir;
- e. Proses administrasi PBBP2 yang kompleks dimana melibatkan Desa/Kelurahan dan Kecamatan sehingga mengurangi minat bagi sebagian wajib pajak PBBP2 untuk melaksanakan kepengurusan administrasi PBBP2;
- f. Prosedur administrasi yang kurang efisien di desa/kelurahan dan kecamatan sehingga mempengaruhi kecepatan kelancaran proses pemindahan hak dan pembayaran BPHTB;
- g. Turunnya tarif parkir dari 20% menjadi 10% berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024;
- h. Kurangnya optimalnya pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin yang tidak terdata, penggunaan air tanah tanpa izin dan tidak menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah;
- i. Kenaikan tarif NJOP yang mengakibatkan wajib pajak menunda proses administrasi pemindahan hak dan pembayaran BPHTB;

Mitigasi terhadap berbagai kendala diatas, kedepannya perlu dioptimalkan , mencakup berbagai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi antara lain dengan optimasi pendataan potensi pajak pengembangan sistem informasi , sosialisasi, dukungan kebijakan yang memuat ketentuan biaya bongkar reklame, mengoptimalkan penagihan, peningkatan koordinasi realisasi PBB di wilayah dengan para pemangku wilayah.



Sasaran ‘Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Oleh SDM Aparatur yang Kompeten’ yang diukur dengan indikator Persentase ASN Yang Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya menunjukkan capaian 101,06%. Berdasarkan Data Pengembangan Kompetensi pada BKPSDM tahun 2024, sebanyak 94,83% dari sejumlah 12.474 ASN telah memiliki kompetensi sesuai bidang/jabatannya.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Jember melalui BKPSDM telah melakukan:

- Memperluas jangkauan kegiatan pengembangan kompetensi agar ASN Kabupaten Jember mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP pertahun dengan cara menyelenggarakan pelatihan non klasikal berbasis online (webinar series "ASN JEMBER AYO NGOPI (Ngembangno Kompetensi)") secara berkala dengan tema pilihan dan narasumber yang kompeten melalui platform Zoom dan Youtube;
- Menyediakan informasi dan memfasilitasi para ASN mendapatkan informasi terkait dengan fasilitas Bea Siswa Pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Pusat baik melalui kementerian dan atau lembaga pemerintah diantaranya adalah: Bea siswa dari Bappenas, Bea Siswa Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); dan Bea siswa Kementerian Kesehatan untuk Pendidikan Dokter Spesialis dan Sumber daya manusia Kesehatan;
- Mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN pada PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember melalui analisa kebutuhan diklat;
- Membangun database pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Jember melalui aplikasi "KEMBANG KOPI" (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Terintegrasi);



- Penerapan mekanisme pengembangan kompetensi melalui pemagangan dengan inovasi "KOPI MANIS" (Kolaborasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Melalui Magang Antar Instansi) diantaranya dengan mengirimkan perawat dari puskesmas untuk magang di Rumah Sakit Daerah agar mendapatkan pengetahuan lebih luas dan pengalaman lebih banyak sesuai dengan bidang yang sedang dikerjakan.

Sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja "ASN yang memiliki Kompetensi sesuai Bidangny", rencana perbaikan kedepan adalah :

- Melakukan pengembangan kompetensi ASN dengan mendasari dengan Human Capital Development Plan (HCDP) yang berisi perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi dan dimungkinkan untuk dilaksanakan baik yang diselenggarakan oleh BKPSDM atau masing-masing PD;
- Mengimplementasikan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, kewajiban 20 JP dalam 1 tahun menjadi prasyarat untuk ASN ketika mengajukan layanan kepegawaian seperti pengajuan kenaikan pangkat, kenaikan kelas jabatan, dll;
- Penyelenggaraan assessment/uji kompetensi kepada ASN Jabatan Pelaksana Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka identifikasi dan pemetaan kompetensi, yang selanjutnya hasilnya akan digunakan dalam proses penilaian manajemen talenta dan sistem merit;
- Penyelenggaraan KOPI MANIS (Kolaborasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Melalui Magang Antar Instansi). Penyelenggaraan pengembangan kompetensi KOPI MANIS menjadi salah satu mekanisme pengembangan kompetensi yang cukup



efektif karena ASN dapat memperluas wawasan diluar lingkungan unit kerjanya dengan masalah yang lebih kompleks;

- ASN Jember Ayo Ngopi (Ngembangno Kompetensi) melalui webinar pada tahun 2024 kegiatan ini akan dikemas lebih baik dengan perbaikan dari berbagai sisi, diharapkan dapat menarik minat ASN dan memotivasi untuk mengembangkan kompetensi diri;
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pengembangan kompetensi secara periodik melalui aplikasi KEMBANG KOPI (Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Terintegrasi);
- Membangun jejaring dengan stakeholder di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, organisasi profesi, organisasi masyarakat baik milik pemerintah atau non pemerintah untuk memberikan lebih banyak alternatif serta pilihan jalur pengembangan kompetensi ASN;

Kinerja Tujuan 4 : ‘Mengentaskan kemiskinan dan pemenuhan Kebutuhan sosial dasar lainnya’ dengan indikator Angka Kemiskinan

Kinerja Tujuan 4 menunjukkan angka capaian 97,61% dengan kategori capaian kinerja Sangat Tinggi. Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 20/08/3509/Th.VIII tanggal 1 Agustus 2024 tentang Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Jember, persentase penduduk miskin pada Maret tahun 2023 sebesar 9,51 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,5 poin menjadi 9,01 persen pada bulan Maret tahun 2024. Dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 224,77 ribu jiwa, berkurang sebesar 11,69 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2023 yang berada di angka 236,46 ribu jiwa.

Namun angka tersebut masih belum mencapai target realisasi (8,80%) dikarenakan sebagian besar masyarakat miskin bekerja di sektor informal sehingga seringkali tidak memiliki pendapatan yang stabil atau pendapatannya cenderung tidak tetap. Garis Kemiskinan yang sebelumnya di tahun 2023 sebesar Rp 441.171,00 per kapita



menjadi Rp 459.043,00 per kapita. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penduduk yang berada pada atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS) atau disebut kelas marjinal (dimana penduduk tersebut dapat sewaktu-waktu berpindah dibawah garis kemiskinan) yang dipengaruhi oleh inflasi (meskipun stabil) tetapi mengalami peningkatan pada kelompok makanan.

Peningkatan harga pada kelompok makanan mempengaruhi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang merupakan komponen atas Garis Kemiskinan (GK) dimana nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari meningkat. Dalam rangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Jember,

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan kordinasi penanganan kemiskinan serta memperbaiki kualitas data dan program yang lebih tepat sasaran dengan memfungsikan peran kordinasi lintas sektoral melalui Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (di bawah wakil bupati) dalam penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim mencapai nol persen di tahun 2024.

Tindak lanjut dalam hal pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan :

1. Telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Jember sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/261/1.12/2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 sehingga menghasilkan data by name by address (BNBA) kemiskinan ekstrem sejumlah 33433 orang sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/86/1.12/2024 tentang Data Sasaran Keluarga Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Jember;
2. Tindaklanjut adanya data BNBA kemiskinan ekstrem tersebut dilaksanakan Pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti pemberian bantuan paket sembako, permakanan, alat kesehatan,



sandang, bahan bangunan rumah, obat-obatan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas sosial dengan sasaran utama yakni lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran dan kepala keluarga perempuan.

Berdasarkan cascade kinerja pada RPJMD 2021-2026, Keberhasilan capaian kinerja tujuan tersebut didukung capaian kinerja 2 (dua) sasaran, yaitu :

- Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya; dan
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Desa'

Sasaran 'Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya' dengan indikator Penurunan PMKS menunjukkan capaian 36,33%. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Jember, terdapat peningkatan PMKS, dan tidak tercapai penurunan yang ditargetkan. Dimana perentase penurunan PMKS pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,30% namun terealisasi pada tahun 2024 sebanyak 1,09%.

Program yang dilaksanakan antara lain koordinasi dan sinkronisasi data sasaran program DBHCT, verifikasi dan validasi Data DTKS bersama pihak kecamatan/ kelurahan / Desa, pemberian bantuan kebutuhan dasar, yang antara lain terdiri dari pemenuhan jaminan kesehatan melalui (PBID/PBIJKN), permakanan/paket sembako, alat kesehatan dan sandang) dan bantuan langsung tunai / BLT DBHCT, mengoptimalkan Pusat Kesejahteraan Sosial/Puskessos untuk melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas; memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program / layanan sosial di Desa/Kelurahan melalui Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpasu (SLRT) Kabupaten; membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di Desa/Kelurahan.

Dalam rangka perbaikan penanganan PMKS kedepan, Pemerintah Kabupaten Jember akan:

- Melaksanakan assesment bantuan dan pendistribusian bantuan mulai triwulan pertama;
- Proses verifikasi dan validasi data dilaksanakan lebih awal dengan tepat dan cepat untuk mendapatkan data yang akurat;
- Pemenuhan sarana dan prasarana;
- Mengoptimalkan koordinasi pada Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) dan Stakeholder/ Perangkat Daerah terkait.

Sasaran ‘Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Desa’ dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM), menunjukkan capaian 181,82% atau kategori capaian Sangat Tinggi. Capaian IDM tahun 2024 dalam upaya meningkatkan (lompatan) status desa berkembang menjadi desa mandiri melakukan upaya-upaya strategis yang terstruktur dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk secara spesifik turut serta dalam upaya peningkatan Indeks Desa Membangun dengan menyeluruh pada tiga variabel IDM yaitu IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi), IKS (Indeks Ketahanan Sosial), IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan).

Merujuk pada Penilaian Indeks Desa membangun (IDM) yang berdasarkan Keputusan Menteri Desa, PDT, Dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, IDM Kabupaten Jember tercatat mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,8411, kondisi naik sebesar 0,0187 dari tahun 2023 yang berada di angka 0,8224 dan tahun 2022 sebesar 0,7964. Dengan IDM sebesar 0,8411 tersebut Pemerintah Kabupaten Jember berhasil menambah status desa mandiri sebanyak 179 desa dan desa maju sebanyak 47 desa, serta zero atau nol (0) desa tertinggal dan berkembang.

Tabel 2.2.10
Penilaian Indeks Desa membangun (IDM)

No	Rincian Status Desa	Jumlah Desa	
		2023	2024
1	Mandiri	145	179
2	Maju	81	47
3	Berkembang	0	0
4	Tertinggal	0	0
	Jumlah	226	226

Langkah langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kemandirian desa adalah mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan , intervensi pembangunan yang tepat sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa (khususnya berkaitan dengan tipologi dan modal sosial) yaitu :

- Optimalisasi peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa merujuk pada IDM;
- Melakukan koordinasi dengan PD teknis agar dalam setiap program kegiatannya dapat melakukan intervensi langsung kepada desa yang membutuhkan; dan
- Pemerintah kabupaten Jember melalui DPMD serta PD lainnya untuk melakukan serangkaian upaya peningkatan pembangunan desa yang merujuk pada IDM, yaitu: (upaya pragmatis) dengan melakukan pemutakhiran data pada pengisian indikator IDM, validitas dan intervensi program kegiatan pada peningkatan nilai skor IDM yang lemah/kecil, serta melakukan (upaya substantif) optimalisasi potensi dan sumber daya desa serta kawasan perdesaan, pemanfaatan dan pengembangan potensi dan sumber daya dalam wujud inovasi program kegiatan.

Kinerja Tujuan 5 : ‘Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal Yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga Kerja’

Kinerja Tujuan 5 dengan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR), menunjukkan capaian 93,68% dan termasuk kategori capaian Sangat Tinggi. Komponen perhitungan ICOR adalah data realisasi investasi dan PDRB. ICOR kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 4,04, tahun 2023 sebesar 3,94. Dibanding ICOR tahun 2022 sebesar 4,22 dan ICOR tahun 2021 sebesar 4,72. Menunjukkan membaiknya tingkat efisiensi investasi di Kabupaten Jember. Sementara apabila dibandingkan dengan ICOR nasional tahun 2023 sebesar 6,23, maka realisasi tersebut jauh lebih baik dari ICOR nasional.

ICOR merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi investasi, semakin kecil nilai ICOR maka nilai investasi semakin efisien untuk menghasilkan atau memberikan dampak pada suatu output tertentu (sirusa.bps.go.id). Jika angka ICOR tinggi dapat disimpulkan bahwa pembangunan tidak efisien, yang salah satunya dapat disebabkan korupsi, dan ketidaksiapan prasarana dan sarana yang menimbulkan banyaknya biaya dari suatu investasi. Angka ICOR berkisar antara 1 hingga 10. Makin besar angka ICOR suatu wilayah berarti makin tidak efisien investasi di tempat tersebut atau makin tidak menguntungkan.

Faktor kunci keberhasilan / efisiensi investasi di Kabupaten Jember antara lain didukung kondisi sarana prasarana, infrastruktur di Kabupaten Jember semakin baik, tata kelola pemerintahan yang semakin baik, yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan perbaikan tata kelola perizinan melalui pembangunan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jember yang memberikan kemudahan layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

Strategi Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka perbaikan ICOR kedepan antara lain melalui kesiapan sarana dan



prasarananya seperti jalan, irigasi, listrik, telekomunikasi, air bersih, pasar, dan regulasi perizinan. Maka program yang dijalankan beririsan dengan program program pendukung tujuan ke-9 pada RPJMD Kab. Jember , yaitu “Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas dan Merata Serta Berperspektif Kebencanaan”. Demikian pula dengan perbaikan tata kelola perizinan juga terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui perbaikan tata laksana pelayanan publik di seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP), mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember yang didalamnya menyediakan layanan dari 20 Instansi dari Perangkat Daerah Pemkab Jember dan 7 Instansi Vertikal dengan jumlah layanan seluruhnya sebanyak 245 layanan.

Makin baik kesemuanya itu, akan makin memperkecil angka ICOR yangmana artinya investasi bisa lebih efisien dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih didorong dengan cepat.

Berdasarkan cascade kinerja pada RPJMD 2021-2026, Keberhasilan capaian kinerja tujuan tersebut didukung capaian kinerja 2 (dua) sasaran, yaitu :

- Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/PMA Berskala Nasional
- Sasaran Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Usaha Mikro

Sasaran “Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/PMA Berskala Nasional” dengan indikator Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional menunjukkan capaian 136,30% dan termasuk kategori capaian Sangat Tinggi

Berdasarkan data pada web Online Single Submission (OSS) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember, angka peningkatan investasi tahun 2024 sebesar Rp. 1.514.963.617.660 pada tahun 2024, menurun dibanding tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.616.777.000.000.

Capaian tersebut didukung komitmen Bupati Jember melalui program program sinergis antar Perangkat daerah dalam rangka



meningkatkan Investasi. Berbagai upaya di segenap jajaran Perangkat Daerah dalam menarik minat Investor berskala nasional antara lain melalui promosi investasi, menyelenggarakan event pariwisata, budaya, olahraga dan ekonomi kreatif dalam rangka menggerakkan sektor usaha mikro. Membaiknya iklim investasi di Kabupaten Jember didukung berbagai upaya perbaikan tata Kelola pemerintahan dalam rangka membangun kepercayaan investor untuk berinvestasi ke Kabupaten Jember, serta percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik dalam rangka kemudahan mekanisme perijinan-investasi, serta didukung pula dengan perbaikan infrastruktur jalan.

Perbaikan tata kelola pemerintahan terkait pencapaian Indeks Pelayanan Publik oleh KemenPANRB (peringkat ke-4 terbaik nasional), pencapaian kepatuhan pelayanan Publik oleh Ombudsman RI (peringkat 12 tingkat nasional), diharapkan memberikan citra positif Kabupaten Jember dalam meraih kepercayaan investor masuk ke Kabupaten Jember

Kendala utama dalam pengukuran indikator ini adalah rendahnya tingkat pelaporan investasi melalui aplikasi OSS. Dimana data DPMPTSP menunjukkan, jumlah investor yang melaporkan realisasi investasinya di tahun 2023 lebih kecil dari jumlah investor yang menyampaikan LKPM tahun 2024. Terkait hal tersebut rencana perbaikan kedepan, Pemerintah Kabupaten Jember melalui DPMPTSP akan mengoptimalkan pelaksanaan diseminasi informasi tentang LKPM melalui penyelenggaraan event temu investor, kebijakan pemberian pendampingan kepada pengusaha dalam penyampaian LKPM, serta penyediaan layanan konsultasi pelaporan LKPM.

Evaluasi dan perbaikan tata kelola penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jember , yang berhasil mewujudkan layanan terpadu antara layanan instansi di lingkungan Pemkab Jember, Layanan Instansi vertikal, BUMN dan BUMD dalam suatu sistem layanan terintegrasi secara offline dan online.

Sasaran “Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Usaha Mikro”
dengan Indikator Cakupan Pembinaan Usaha Mikro, menunjukkan



capaian sebesar 247,36%% termasuk dalam kategori Capaian Kinerja Sangat Tinggi. Berdasarkan Data Pembinaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, sejumlah 17.496 Usaha Mikro / UM yang dibina pada tahun 2024 melebihi target RPJMD yaitu 7.043 unit. Pemenuhan persentase pertumbuhan usaha mikro ini tak lepas dari Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Jember, antara lain :

- a) Optimalisasi pembinaan KUMKM dengan pemberian fasilitas/ pelatihan/ bimtek dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku usaha. Keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu/ PLUT-KUMKM Kabupaten Jember telah dikelola dengan cukup efektif. bahkan PLUT Kabupaten Jember pernah meraih penghargaan pada kategori konsultan PLUT terinovatif yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.
- b) Pemerintah Kabupaten Jember memberi fasilitasi pemasaran melalui even-even Kabupaten Jember maupun pameran local, regional dan nasional
- c) Melakukan program kolaborasi dengan stakeholder antara lain MOU dengan berbagai pihak dalam pengembangan usaha mikro, antara lain :
 - Kerjasama dengan Politeknik Jember Jurusan Manajemen Agribisnis dan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember untuk mengembangkan kreatifitas yang sehingga mahasiswa dapat mengeksplorasi kreasi usaha
 - Kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia dibidang Pembiayaan Koperasi dan UM
 - Kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, PT Telkom Indonesia, CV Mak Enak Indonesia dalam rangka mensukseskan Program Ekonomi Keuangan Inklusif (EKI)
 - Kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan terkait dengan jaminan ketenagakerjaan pelaku usaha pedagang kali lima



- Kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk melakukan kampanye wajib halal
- Kerjasama dengan Lembaga pendamping proses halal dari 6 (enam) Lembaga Halal di Kabupaten Jember yaitu LP3H Universitas Jember, LPH Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Soddiq Jember, PSSH Universitas Muhammadiyah Jember, Halal Center Al Falah, Halal Center Al Hidayah, LSH ISNU Jawa Timur

Rencana perbaikan kendala dalam pengembangan usaha mikro adalah

- a) Perkembangan teknologi yang memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang KUMKM
- b) Optimalisasi sosialisasi perizinan usaha
- c) Memperluas cakupan pemanfaatan J.POINT dan pendampingan untuk mengakses aplikasi J-POINT
- d) Pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha agar konsisten pada produknya, tentang pentingnya Hak Merek untuk keamanan dan perlindungan merek pelaku usaha , pelatihan dengan narasumber dari BPOM
- e) Melakukan pendampingan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi serta untuk membantu koperasi dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengurus, dan pengawas
- f) Melakukan pembubaran koperasi yang tidak aktif dan koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Kinerja Tujuan 6 : ‘Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja’ dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT

Kinerja Tujuan 6 menunjukkan capaian kinerja 128,85% atau termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran, TPT yang tinggi menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasarkerja. Berdasarkan Data BPS



Provinsi Jawa Timur (<https://jatim.bps.go.id>), TPT Kabupaten Jember terus menurun sejak tahun 2022-2024 dimana pada TPT tahun 2022 sebesar 4,06%, kemudian menjadi sebesar 4,01% di tahun 2023, dan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2024 sebesar 3,23%. Angka ini berada jauh dibawah TPT nasional yang menyentuh 4,91%. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka disebabkan investasi dan pembukaan lapangan kerja merupakan faktor penunjang capaian tersebut.

Strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mendorong penurunan angka pengangguran antara lain melalui program bidang ketenagakerjaan, yaitu peningkatan kualitas calon tenaga kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja informal, serta mengoptimalkan program penempatan tenaga kerja dan sinergitas dengan program penyediaan lapangan kerja melalui :

- program peningkatan kontribusi lapangan usaha /sektor industri pengolahan dan perdagangan besar, eceran (tujuan1 RPJMD)
- program peningkatan kontribusi lapangan usaha /sektor pertanian dan perikanan (tujuan 2 RPJMD), yang merupakan lapangan usaha terbesar di Kabupaten Jember
- program peningkatan investasi dan UMKM (tujuan 4 RPJMD)
- program pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan (tujuan 10 RPJMD)

Berdasarkan cascade kinerja pada RPJMD 2021-2026, Keberhasilan capaian kinerja tujuan tersebut didukung capaian kinerja 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya Angkatan Kerja yang Berhasil Ditempatkan.

Sasaran 'Meningkatnya Angkatan Kerja yang Berhasil Ditempatkan' dengan indikator Jumlah Pencaker yang berhasil Ditempatkan. menunjukkan capaian sebesar 616% termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi.

Berdasarkan Data Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga



Kerja Kabupaten Jember, realisasi penempatan pencaker sejumlah 6.162 orang. Realisasi ini meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebanyak 3.898 orang. Data Pencaker tersebut meliputi data penempatan Tenaga Kerja di dalam maupun di Luar Negeri.

Berbagai upaya strategis Pemerintah Kabupaten Jember yang dilaksanakan terkait peningkatan data ini merupakan kontribusi dari Program Inovasi “J-Pro Garuda (Program Gagasan dan Ruang Dialektika Jember)” . Program yang dimulai sejak tahun 2022 ini berfokus pada upaya menurunkan angka Non Prosedural PMI, memberikan informasi bekerja ke luar negeri secara prosedural. menggandeng Badan perlindungan PMI, Migrant Care, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, dan Serikat Buruh Migran Indonesia, untuk mewujudkan Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)

Berbagai upaya strategis dan sinergis dengan berbagai unsur (UPTD pendidikan SMK, Perusahaan Swasta, NGO atau pegiat sosial di bidang pekerja migran, serta instansi vertikal terkait) yang meningkatkan keberhasilan capaian kinerja di tahun 2023 adalah :

- Memperluas cakupan Job Fair/ Bursa Kerja
- Melakukan publikasi khusus lowongan pekerjaan lewat mediagram loker.disnakerjember. Akun lowongan kerja tersebut telah dipublikasikan dengan massive, dan mampu menjadi jembatan komunikasi pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia
- Memperluas cakupan Job Fair bekerjasama dengan Bursa Kerja Khusus-SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
- Dengan dibangunnya Aplikasi e-KaPeKa (Kartu Pencari Kerja elektronik) yang mampu memperluas cakupan data pencari kerja yang terdaftar dengan beragam kualifikasi dan kompetensi. Tenaga kerja yang telah terdata pada e-KaPeKa mendapatkan peluang informasi yang lebih cepat pada program Walk-in Interview yang diselenggarakan perusahaan yang membutuhkan.



Kinerja Tujuan 7 : ‘Meningkatkan Kualitas Lingkungan Yang Lestari dan Berkelanjutan’ dengan indikator IKLH

Kinerja Tujuan 7 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,54% atau capaian kinerja kategori Sangat Tinggi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Berdasarkan Data IKLH tahun 2024 yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, IKLH Kabupaten Jember sebesar 63,89 mengalami penurunan dibanding IKLH tahun 2023 yang berada di angka 67,70, dan angka ini dibawah IKLH nasional sebesar 73,57. Realisasi yang melebihi target menunjukkan bahwa langkah langkah pengelolaan lingkungan telah berjalan lebih baik yang direncanakan. Faktor ini menjadi indikasi keberhasilan dari berbagai program , kolaborasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Faktor pendorong tercapainya IKLH Kabupaten Jember yaitu adanya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas air dan udara, melalui peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan meningkatkan pelibatan masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak dari perilaku mereka terhadap lingkungan, melalui lingkungan pendidikan dengan menyelenggarakan program penghargaan Sekolah Adiwiyata dan Ecopesantren, peningkatan



tutupan lahan dan pengelolaan sampah melalui program kampung proklamasi, serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi penanaman bibit tanaman untuk menunjang peningkatan kualitas lahan

Berdasarkan cascade kinerja pada RPJMD 2021-2026, Keberhasilan capaian kinerja tujuan tersebut didukung capaian kinerja 3 (tiga) sasaran yaitu :

- Meningkatkan Kualitas Air (IKA);
- Meningkatkan Kualitas Udara (IKU); dan
- Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan (IKL)

Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara dengan indikator realisasi IKU Kabupaten Jember pada tahun 2024 telah melampaui target, namun dibandingkan IKU nasional yang dirilis KLHK, IKU Kabupaten Jember yang berada di angka 92,37 lebih baik dari IKA nasional sebesar 90,17. Realisasi IKU melebihi target karena tingkat pencemaran udara di Kabupaten Jember masih dibawah ambang batas. Hal ini tentu harus tetap dipertahankan dengan upaya menambah atau melindungi pohon ayoman di jalan yang dapat menyerap polutan dari kendaraan bermotor. Selain itu juga dengan terus melakukan pemantauan sumber pencemar udara dari asap pabrik.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dengan indikator Angka IKA Kabupaten Jember tahun 2024, telah mencapai sebesar 39,66 masih dibawah target dan IKA nasional sebesar 54,76. Realisasi IKA yang lebih kecil dari target menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sumber pencemaran, efektivitas pengelolaan, serta koordinasi antara berbagai pihak terkait. Langkah langkah perbaikan seperti peningkatan fasilitas pengelolaan limbah, penegakan regulasi dan edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan. Nilai IKA kecil karena kandungan coliform di badan air melebihi ambang batas. Sumber total coliform banyak berasal dari limbah domestik, khususnya tinja. Di Kabupaten Jember, sampai saat ini belum ada instalasi pengolahan limbah tinja. Rencana perbaikan kedepan untuk meningkatkan kualitas air dengan mewujudkan

instalasi pengolahan limbah tinja dan mengkoordinasikan penyediaan instalasi dimaksud melalui penganggaran pada PD yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lahan dengan indikator IKL Kabupaten Jember Tahun 2024, telah mencapai sebesar 52,82, masih berada di bawah target dan realisasi nasional yang berada di angka 62,25. Dari hasil analisa melalui aplikasi GIS, capaian nilai Indeks Kualitas Lahan lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi IKL sesuai rekomendasi DLH Provinsi Jawa Timur harus menggunakan nilai sedang karena luasan lahan setiap tahun berpotensi turun karena adanya alih fungsi lahan. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penanaman pohon jenis buah buahan untuk meningkatkan luas tutupan lahan. Akan tetapi belum bisa untuk deliniasi karena membutuhkan waktu minimal 5 tahun agar terdeteksi satelit karena hanya pohon yang rimbun yang dapat terdeliniasi.

Untuk meningkatkan capaian nilai indeks kualitas lahan diperlukan beberapa rencana perbaikan yaitu :

1. Mempertahankan dan meningkatkan tutupan belukar dalam kawasan melalui kolaborasi dengan instansi-instansi terkait.
2. Merumuskan inovasi program penanaman serta mengarahkan program penanaman.
3. Perlu meningkatkan upaya penyebaran informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan lahan.

Kinerja Tujuan 8 : ‘Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas SDM’

Kinerja Tujuan 8 dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia’ mencapai kinerja 102,20% kategori capaian Sangat Tinggi. Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 31/12/3509/Th. VIII tanggal 27 Desember 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember tahun 2024 mencapai 70,93, meningkat 0,51 poin) dibandingkan tahun sebelumnya (70,42). Pembangunan manusia di Jember terus



mengalami kemajuan. Mulai tahun 2023, status pembangunan manusia Jember sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2024 terus mengalami peningkatan, IPM Jember rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun, dari 67,11 pada tahun 2020 menjadi 70,93 pada tahun 2024.

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,49 menjadi 13,50 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,02 tahun, dari 6,52 tahun menjadi 6,54 tahun pada tahun 2024. Sedangkan indikator lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan. Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 4,12 persen dibanding tahun sebelumnya 4,44 persen. Sementara Umur Harapan Hidup (UHH) juga mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 0,20 persen dibanding tahun sebelumnya 0,31 persen pertumbuhannya melambat dari 0,35 persen menjadi 0,31 persen. Indikator Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan melambat dari 4,57 persen menjadi 4,44 persen.

Berdasarkan cascade kinerja pada RPJMD 2021-2026, Keberhasilan capaian kinerja tujuan Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas SDM’ didukung capaian kinerja 4 (empat) sasaran yaitu:

- Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
- Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
- Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat
- Meningkatnya Kualitas Kesenjangan Gender Dalam Masyarakat’

Sasaran ‘Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat’ dengan indikator Indeks Pendidikan, Indeks Pendidikan diukur berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS). Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 31/12/3509/Th. VIII tanggal 27 Desember 2024, HLS tahun 2024 sebesar 13,50 tahun meningkat dibandingkan HLS tahun



2023 sebesar 13,49 tahun. Namun HLS Kabupaten Jember melampaui capaian HLS penduduk RI tahun 2024 yang telah mencapai 13,21 tahun. Peningkatan HLS mengindikasikan bahwa pembangunan di Kabupaten Jember semakin baik.

Dalam upaya meningkatkan capaian, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendidikan melaksanakan program program strategis sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan , antara lain :

- MOU antara Dinas Pendidikan dan PUSDATIN untuk mengalir Data DAPODIK secara realtime, up to date, serta Dinas Pendidikan melakukan Verval data DAPODIK dengan seluruh Operator Sekolah di satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, Kesetaraan.
- Penggunaan sistem informasi mydispendik yang dapat menyajikan data titik koordinat Lembaga dan menunjukkan kondisi sarana prasarana sekolah (Gedung Sekolah Rusak, dan Sarana Lainnya) dilakukan sinkronisasi secara berkala dengan seluruh Satuan Pendidikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
- Pengalokasian anggaran perbaikan gedung sekolah rusak sebanyak 30 lembaga 80 Ruang Sekolah.
- Pemenuhan sarana penunjang Pembelajaran Teknologi Ilmu Komputer (TIK) untuk satuan Pendidikan SD, SMP
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, berupa pemberian Reward uang pembinaan, trophy, dan sertifikat bagi siswa, guru, Lembaga sekolah yang berprestasi dari jenjang Pendidikan PAUD/IGRA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan Pondok Pesatren dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
- Pemberian Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Jember diberikan kepada mahasiswa yang berdomisili di Jember sebanyak 5.313 Mahasiswa di 44 Perguruan Tinggi.

- Pemantauan Pengelolaan Dana BOSP PAUD, BOSP SD, BOSP SMP, BOSP Kesetaraan.
 - Verval Data Anak Tidak Sekolah /ATS dengan 4001 Mahasiswa KKN Kolaboratif untuk mengidentifikasi kategori ATS di dashboard ATS Kemendikbudristek RI/ PUSDATIN serta melakukan Kegiatan Rekonfirmasi di 3 Kecamatan sebagai Upaya penanganan ATS masuk sesuai minat dan bakat bagi ATS di Kabupaten Jember.
 - Pemberian Bekal Kemandirian untuk ATS berupa pengembangan Keterampilan Vokasi membatik/Batik Jumputan dengan bahan baku warna alam/daun.
 - Peningkatan kompetensi Guru PAUD, SD, SMP Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sebanyak 6.108 guru PAUD.
2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan antara lain melalui peningkatan kompetensi tenaga Pendidikan untuk 500 orang, penganggaran honorarium 4.037 GTT dan PTT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pembinaan disiplin Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk 250 orang

Beberapa upaya perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain :

- Mengembangkan sistem perencanaan berbasis data yang terintegrasi
- Penguatan perencanaan berbasis data di setiap satuan pendidikan untuk memastikan program yang terarah dan terukur.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung manajemen pendidikan yang lebih efektif
- Peningkatan layanan pendidikan dengan mengembangkan platform mydispendik yang menawarkan sarana verval data, update data realtime layanan bermutu dan berkualitas.
- Pemetaan dan analisis kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang lebih terarah serta komprehensif berdasarkan data akurat untuk mendukung proses distribusi yang lebih merata.



- Memperkuat pelatihan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- Pelibatan lebih aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan pendidikan.

Sasaran ‘Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat’

dengan indikator Indeks Kesehatan menunjukkan capaian 104,17% pada tahun 2024 menunjukkan realisasi melampaui target, dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Indeks Kesehatan diukur berdasarkan Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 31/12/3509/Th. VIII tanggal 27 Desember 2024, UHH tahun 2024 sebesar 74,17 tahun meningkat 0,15 persen dibandingkan UHH tahun 2023 sebesar 74,02 tahun. UHH Kabupaten Jember berada di atas capaian UHH penduduk RI tahun 2024 yaitu 74,15 tahun. Peningkatan UHH mengindikasikan bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Jember semakin baik.

Beberapa indikator pendukung yang menunjukkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat adalah :

- Penurunan Angka Kematian Ibu /AKI: cenderung menurun setiap tahun dengan AKI sebesar 111,37 pada tahun 2024
- Penurunan Angka Kematian Bayi /AKB: cenderung menurun setiap tahun dengan AKB sebesar 6,52 pada tahun 2024
- Persentase Balita Stunting : cenderung menurun setiap tahun dengan % balita stunting sebesar 7,42% pada tahun 2024
- Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebesar 87,68% pada tahun 2024

Capaian tersebut didukung pelaksanaan program pembangunan di sektor kesehatan yang mendukung capaian tersebut antara lain melalui

- Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Kualitas Kesehatan Keluarga, Gizi Masyarakat dan Menurunnya



Angka Kesakitan, Kematian, Kecacatan Penyakit Menular dan Tidak Menular,

- Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
- Pemenuhan SDM Kesehatan
- Upaya Pemerintah Kabupaten Jember untuk terus memastikan peningkatan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024 mampu menembus 98,36%, serta cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2024 sekitar 2.558.034 jiwa dengan keaktifan 55,96%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan cakupan UHC yang sangat pesat pada tahun 2024 Kabupaten Jember berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage kategori pertama. Meskipun demikian, angka keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu harus mencapai minimal 85% sehingga perlu upaya lebih lanjut dalam mengatasi hal tersebut.
- Program khusus pelayanan kesehatan gratis J-Pasti Kueren di Kabupaten Jember pada tahun 2024 digunakan oleh sejumlah 103.110 jiwa pengguna. Program pelayanan kesehatan gratis kelas 3 J-Pasti Kueren mendapatkan respon positif dari penduduk Kabupaten Jember karena sangat membantu khususnya untuk penduduk yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional dalam mendapatkan layanan kesehatan sesuai praktik pelayanan klinis (PPK).

Berkaitan dengan kendala yang ada, rencana aksi perbaikan dalam mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat:

- Pencapaian kinerja di bidang kesehatan memerlukan kolaborasi dan kerjasama yang berkesinambungan antar lintas sektor terkait kesehatan serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan masih terkendala dengan efisiensi dan keterbatasan pagu anggaran. Dan sebagaimana halnya upaya Pemerintah Kabupaten Jember



untuk terus memastikan peningkatan UHC di Kabupaten Jember. Untuk ini perlu adanya kolaborasi lintas PD dan BPJS Kesehatan.

- Perbaikan kebijakan dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan proses bisnis pelaksanaan program J-Pasti Kueren

Sasaran ‘Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat’

dengan indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun memperoleh capaian kinerja 101,19% pada tahun 2024, mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dimana realisasi tahun 2023 terdapat 80.313 orang pengunjung perpustakaan dan meningkat di tahun 2024 menjadi 88.733 orang, dengan kategori capaian Sangat Tinggi. Hal ini didorong berbagai pengembangan dan pengelolaan kegiatan yaitu :

- Pembudayaan Gemar Membaca melalui Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
- Pelaksanaan kegiatan gelar pustaka perpustakaan keliling dengan lokus Lembaga Sekolah mulai dari TK/KB, SD, MI, MTS, SMP, SMK, SMA, MA dan Pondok Pesantren yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat khususnya pelajar, wali murid dan guru sekolah di Kabupaten Jember
- Meningkatkan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten

Dalam rangka mewujudkan Sasaran pembangunan ‘Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat’ terdapat indikator lain yang perlu menjadi perhatian bersama semua pihak, yaitu rendahnya nilai IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) dari Perpustakaan Nasional tahun 2024 sebesar 37,67 dengan kategori rendah. IPLM tersebut terdiri dari 7 UPLM (Unsur Pembangun Literasi Masyarakat) . Kendala yang dihadapi dalam kerangka meningkatkan tingkat literasi Masyarakat Jember, salah satunya adalah Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM 2) dengan Interpretasi standar pencapaian koleksi perpustakaan adalah 2 x jumlah



penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Jember pada Tahun 2022 berdasarkan data BPS adalah 2.567.720 jiwa, sedangkan jumlah koleksi perpustakaan baik fisik maupun digital di berbagai Lembaga perpustakaan Kabupaten Jember sejumlah 2.111.689 eksemplar sehingga kekuarangan koleksi perpustakaan untuk memenuhi standar UPLM 2 adalah sebanyak 3.023.751 eksemplar. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka untuk memenuhi ketercukupan koleksi perpustakaan, terdapat kendala utama terkait keterbatasan anggaran , dimana kedepan membutuhkan komitmen untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Jember.

Sasaran 'Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat' dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan capaian 99,43% termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Berkaitan dengan belum dirilisnya data Indeks Pembangunan Gender 2024 oleh Kementerian PPA, maka data yang digunakan masih menggunakan data tahun 2023 yaitu 85,31, dimana indeks tersebut meningkat dibandingkan IPG tahun 2022 sebesar 84,82. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ada kenaikan pada pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Keadaan ini di sangat dipengaruhi oleh meningkatnya pembangunan responsif gender dimana anggaran yang sudah Responsif Gender pada 2023 adalah 4,33 %, naik dari tahun 2022 sebesar 0,53 %. Dan sudah seluruh PD telah dilatih penganggaran responsif gender pada tahun 2023.

Rencana aksi efektif di tahun 2024 mendorong 226 Desa untuk melakukan perencanaan Anggaran Responsif Gender, dan meningkatkan pengendalian Anggaran Responsive Gender PD melalui monitoring dan evaluasi terhadap penerapannya di PD mitra Bappeda.

Kinerja Tujuan 9 : 'Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas dan Merata serta Berperspektif Kebencanaan' dengan indikator Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur disusun untuk mengetahui keberhasilan pembangunan infrastruktur, yang dihitung dari komponen penilaian berupa: Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;



Penyediaan transportasi, Penyediaan infrastruktur air bersih; Penyediaan infrastruktur drainase.

Berdasarkan data olahan bidang infrastruktur pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tahun 2024, Indeks Infrastruktur tahun 2024 sebesar 69,46 menunjukkan capaian 81,44% dari target yang ditetapkan dan termasuk dalam kategori capaian Tinggi. Namun terdapat penurunan dibanding indeks infrastruktur tahun 2023 yang berada pada angka 79,24. Penurunan pada komponen pembentuk indeks, sangat berpengaruh pada capaian indeks infrastruktur, terutama rendahnya capaian di bidang perhubungan. Kedepan perlu ditingkatkan koordinasi terutama dalam perencanaan dan alokasi anggaran penyediaan sarana dan fasilitas perhubungan sesuai dengan hasil inventarisasi dan urgensi kelayakan sarana dan fasilitas perhubungan

Berdasarkan cascade kinerja pada RPJMD 2021-2026, Keberhasilan capaian kinerja tujuan tersebut didukung capaian kinerja 5 (lima) sasaran yaitu :

- Meningkatkan Prasarana Jalan Kabupaten yang Berkualitas dan Merata
- Meningkatkan Sarana Pemukiman Masyarakat yang Berkualitas dan Merata
- Meningkatkan Utilitas Permukiman Masyarakat Berkualitas dan Merata
- Meningkatkan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik, dan
- Meningkatkan Kapasitas Penanganan Bencana Daerah

Sasaran ‘ Meningkatkan Prasarana Jalan Kabupaten yang Berkualitas dan Merata’ dengan indikator Jalan Kabupaten Kondisi Baik menunjukkan capaian 99,74% dan termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Berdasarkan data Bidang Jalan pada Dinas PUBM dan SDA, Jalan Kabupaten Kondisi Baik, ditargetkan panjang jalan dalam kondisi baik adalah sebesar 86% dan terealisasi 85,78%



Capaian target untuk Jalan dan Jembatan berkat dukungan Anggaran Kegiatan pembangunan jalan dengan mekanisme anggaran multiyears yang dilaksanakan pada periode tahun anggaran 2022 s.d. 2023 yang dilanjutkan dengan Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Kendala dalam tidak tercapainya target tersebut yaitu :

- Kondisi Cuaca
Cuaca buruk seperti hujan deras atau musim dingin yang keras dapat menghambat atau memperlambat proyek perbaikan jalan. Cuaca yang tidak mendukung dapat membuat sulitnya pelaksanaan proyek dan memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Kurangnya tenaga kerja juga dapat menghambat perbaikan jalan. Keterbatasan sumber daya manusia dapat memperlambat progres proyek perbaikan jalan atau bahkan membuatnya terhenti sama sekali.
- Masalah Sosial dan Politik
Konflik sosial atau politik di sekitar proyek perbaikan jalan juga dapat menghambat atau bahkan menghentikan prosesnya. Pertentangan kepentingan antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat setempat dapat memperlambat atau menghambat pelaksanaan proyek.

Dalam rangka mengatasi kendala tersebut kedepan adalah:

- Perencanaan yang Tepat
Perencanaan proyek perbaikan jalan harus memperhitungkan faktor cuaca dan kondisi tanah. Penjadwalan proyek harus disesuaikan dengan musim dan kondisi lingkungan sekitarnya untuk mengurangi dampak dari cuaca buruk.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia
Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja dalam bidang konstruksi jalan dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan.



- Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek perbaikan jalan dapat membantu mengurangi konflik sosial dan politik. Komunikasi terbuka dan partisipasi aktif masyarakat dapat membantu meminimalkan hambatan yang disebabkan oleh pertentangan kepentingan

Sasaran ‘Meningkatnya Sarana Pemukiman Masyarakat yang Berkualitas dan Merata’ dengan indikator Rumah Tangga Bersanitasi Aman Berdasarkan data pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, Persentase RT bersanitasi aman 84,19% melampaui target 86%, menunjukkan capaian 97,89% dan termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi.

Beberapa kendala yang masih ditemukan adalah belum optimalnya sarana dan prasarana sanitasi yang aman dan sehat dan masih adanya masyarakat yang masih memiliki habit / Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), untuk itu kedepan dilaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana sanitasi yang aman dan sehat dan meningkatkan pelibatan masyarakat melalui pemangku wilayah, Kecamatan dan berkolaborasi dengan program promosi kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas terkait dalam mengedukasi masyarakat tentang perilaku hidup sehat.

Sasaran ‘Meningkatnya Utilitas Permukiman Masyarakat Berkualitas dan Merata’ dengan indikator Rumah Tangga Berakses Air Minum. Berdasarkan data pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, Persentase RT Berakses Air Minum 97,3% melampaui target 84%, menunjukkan capaian 115,83% dan termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Beberapa kendala yang masih ditemukan adalah masih kurangnya sarana prasarana air bersih dilingkungan permukiman dan semakin berkurangnya debit mata air yang ada.

Terkait hal tersebut kedepan Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta



Karya dengan melaksanakan program peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air minum di lingkungan masyarakat, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan peran serta seluruh stake holder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum di perkotaan dan di perdesaan, mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber air baku.

Sasaran ‘Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik’ dengan indikator Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik, menunjukkan capaian 58,6% dan termasuk kategori Rendah. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Jember pada tahun 2024, rendahnya persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik disebabkan tidak terdapat penambahan anggaran pemeliharaan/perawatan dan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan.

Capaian ini relatif lebih rendah atau menurun dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan capaian pada indikator “Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dalam Kondisi Baik” disebabkan berkurangnya alokasi anggaran pemeliharaan. Jenis prasarana perhubungan antara lain meliputi Center line, Zebra Cross, Lajur Sepeda, Rambu Standart, VMS Portabel, Cermin Tikungan, Pagar Portabel, Rambu Portabel, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), Warming Light, Pelican Crossing. Terhadap permasalahan tersebut, akan dilakukan langkah optimalisasi anggaran pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia.

Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah” dengan indikator Indeks Resiko Bencana (IRB) menunjukkan capaian 105,54% dan termasuk kategori capaian Sangat Tinggi. Pengukuran kinerja tahun 2024 menggunakan Data IRB yang dirilis oleh BNPB tahun 2023 (<https://inarisk.bnpb.go.id>) sebesar 148,78



dan termasuk kategori resiko bencana sedang. Data IRB ini masih menggunakan data tahun 2023 dikarenakan belum ada rilis data terbaru atas Indeks Resiko Bencana Tahun 2024 pada website resmi inaRISK BNPB.

Paradigma penanggulangan bencana yang sudah bergeser menimbulkan persepsi atas cara preventif penanggulangan bencana, aksi-aksi terkait mitigasi dan adaptasi bencana maupun bagaimana mengelola resiko bencana. Kabupaten Jember menjadi daerah yang geografisnya multi ancaman terhadap bencana alam, untuk itu diperlukan perubahan perilaku dari para warganya menuju budaya aman bencana sehingga terwujud satu wilayah yang akan tangguh bencana

Beberapa upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jember melalui BPBD adalah:

- Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta mempererat koordinasi dan komunikasi dengan PD terkait agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan optimal yang tidak hanya dilakukan dalam tahap tanggap darurat saja, namun juga tahap pra bencana termasuk pengurangan risiko bencana.
- Pembentukan Desa Tangguh Bencana di kawasan rawan bencana sebagai upaya peningkatan kapasitas
- Sosialisasi Keluarga Tangguh Bencana, dan pelatihan tanggap bencana
- Pemasangan rambu bencana sesuai dengan jenis bencana yang ada di kawasan rawan
- Penyusunan rencana kontinjensi terhadap bahaya prioritas ,
- Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) untuk mewujudkan mitigasi bencana yang tepat dan cepat, mengurangi risiko bencana dan mempercepat penanganan bencana. Forum PRB adalah perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerahnya, di antaranya dari unsur



lembaga usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, donor, organisasi profesi/keahlian, legislative, yudikatif, dan organisasi perangkat daerah, serta relawan penanggulangan bencana.

Salah satu permasalahan terkait peningkatan kapasitas penanganan bencana daerah di Kabupaten Jember adalah belum tersedianya kebijakan daerah (Peraturan Daerah) sebagai pedoman pengelolaan bencana daerah, dan merupakan dokumen utama dari 71 indikator Penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD).

Rekomendasi perbaikan dalam permasalahan ini adalah penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan mengkoordinasikan upaya percepatan penetapannya.

Kinerja Tujuan 10 : “Mengembangkan Pariwisata Daerah Yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal”

PAD Bidang Pariwisata. Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah dan Laporan Data Retribusi dari sektor pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menunjukkan target PAD Bidang Pariwisata tahun 2024 sebesar 4,50% terealisasi 0,37%. Capaian sebesar 8% dari target, termasuk kategori capaian Sangat Rendah

PAD Bidang Pariwisata tahun 2024 menurun drastis dibanding tahun 2023 (6,53%), Kendala yang dihadapi dalam mencapai target PAD Bidang Pariwisata yaitu minimnya kualitas sarana prasarana pada destinasi wisata di Kabupaten Jember dan kurang optimalnya promosi wisata melalui media sosial.

Rencana aksi kedepan untuk meningkatkan pencapaian target :

- Meningkatkan promosi pariwisata melalui berbagai media dengan menggunakan materi promosi yang kreatif
- Penyediaan sarana prasarana pariwisata yang layak di seluruh destinasi wisata lokal Jember
- Meningkatkan SDM/Pelaku Usaha Pariwisata



Berdasarkan cascade kinerja pada RPJMD 2021-2026, Keberhasilan capaian kinerja tujuan tersebut didukung capaian kinerja 2 (dua) sasaran yaitu :

- Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata
- Meningkatkan Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah dan Pelestarian Kearifan Lokal

Sasaran ‘Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata’ dengan indikator Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata menunjukkan capaian 597% dan termasuk kategori capaian Sangat Tinggi. Berdasarkan data kunjungan wisatawan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dari target 137.300 kunjungan wisatawan terealisasi sejumlah 707.504 kunjungan wisatawan. Angka kunjungan wisatawan tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 858.890 kunjungan wisatawan. Namun demikian jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan dan melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, terhitung sejak tahun 2022. Bertumbuhnya destinasi baru berkontribusi terhadap peningkatan jumlah wisatawan tersebut, yang mana hal ini dihasilkan dari proses pelibatan masyarakat. Penurunan tahun 2024 disebabkan oleh kurangnya SDM pariwisata dan pengembangan destinasi yang baru maupun yang lama berjalan lambat bahkan stagnan, serta kurangnya kualitas sarpras pariwisata.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan kedepan adalah dengan memperkuat sinergi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten, hingga perangkat daerah terkait dan Pemerintah Desa untuk dapat mewujudkan agenda kegiatan tahunan. Meningkatkan strategis kreativitas materi publikasi dan promosi melalui berbagai media (web resmi Pemkab Jember (ppid.jemberkab.go.id) serta media sosial yang ada).

Sasaran “Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah dan Pelestarian Kearifan Lokal”, dengan Indikator Organisasi Kepemudaan yang Aktif, menunjukkan capaian kinerja 100% dan termasuk kategori capaian Sangat Tinggi.



Berdasarkan Data Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2024 terdapat sebanyak 36 Organisasi Kepemudaan (OKP) yang terdaftar dan sebanyak 27 OKP yang aktif. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Jember menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Selain itu, dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa kendala/hambatan yang dihadapi :

- Maraknya perkembangan IT dan internet di satu sisi mempengaruhi pengembangan karakter dan jati diri sebagian besar pemuda yang menyebabkan menurunnya minat berekspresi, beraktifitas dan berorganisasi bagi pemuda.
- Masih dominannya pola pikir/mindset di kalangan pemuda untuk mencari kerja dibanding berwira usaha

Salah satu pembangunan di bidang olahraga yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember adalah melalui pembinaan dan pemasyarakatan olahraga yang ditujukan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan anak didik mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi, mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakekat dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup, meningkatkan kegiatan olahraga termasuk olahraga masyarakat dan olahraga tradisional,

Sinergi dan dukungan stakeholder seperti Kwarcab Gerakan Pramuka Jember, KONI, KORMI, NPCI, PAMI dan Persaid, merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024.

Rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan ke depan sebagai berikut:



- Pengintegrasian jadwal kegiatan kepemudaan dan olah raga yang lebih komprehensif dengan seluruh stakeholder terkait, untuk meningkatkan cakupan partisipasi pemuda.
- Penguatan data base organisasi kepemudaan dalam rangka perumusan kebijakan kepemudaan yang lebih efektif
- Penguatan Pramuka produktif melalui pengembangan gugus depan

G. Analisis Efisiensi

Salah satu analisis capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja sasaran adalah dengan analisis efisiensi.

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya pada laporan ini didasarkan pada perbandingan persentase capaian kinerja dan persentase serapan anggaran pada masing-masing sasaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dinilai tingkat efisiensinya apabila sasaran dapat dicapai atau dengan tingkat capaian minimal 100%.

Tabel 2.2.11
Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran
Tahun 2024

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024	Capaian Anggaran 2024	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	97,68%	46,31%	Efisien
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	95,55%	90,30%	Efisien
3	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian	105,46%	39,62%	Efisien

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024	Capaian Anggaran 2024	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	Kontribusi PDRB Kategori Perikanan	96%**	97,29%	Inefisien
5	Terjaganya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Keindahan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3)	100%	66,77%	Efisien
6	Meningkatnya Kualitas Administrasi Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	99,14%	81,41%	Efisien
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	147,50%	84,41%	Efisien
8	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	102,21%	91,54%	Efisien
9	Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah (SOTK, Proses Bisnis, Anjab/ABK, Evaluasi Jabatan dan SOP)	100%	42,51%	Efisien
10	Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	Laju Inflasi	130,40%	42,83%	Efisien
11	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	100%	19,03%	Efisien
12	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kegiatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat	100%	32,26%	Efisien
13	Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	Tingkat Integrasi Program Kerja DPRD Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	100%	90,74%	Efisien
14	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100%	92,44%	Efisien



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024	Capaian Anggaran 2024	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku	Tingkat Maturitas SPIP	100%**	95,61%	Efisien
16	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan/Atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	61,37%	Efisien
17	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Kabupaten Jember	80,89%	95,70%	Inefisien
18	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	87,38%	60,02%	Efisien
19	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Oleh SDM Aparatur yang Kompeten	ASN Yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya	101,06%	61,57%	Efisien
20	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya	Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	36,33%	81,76%	Inefisien
21	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	181,82%	79,41%	Efisien
22	Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/PMA Berskala Nasional	Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional	124%	42,54%	Efisien
23	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Usaha Mikro	Cakupan Pembinaan Usaha Mikro	1.567%	65,97%	Efisien
24	Meningkatnya Angkatan Kerja yang Berhasil Ditempatkan	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	616%	78,39%	Efisien
25	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	73,87%	93,37%	Inefisien
26	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	119,36%	93,37%	Efisien
27	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	96,26%	97,38%	inEfisien
28	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	104,17%	87,29%	Efisien



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024	Capaian Anggaran 2024	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	88,82%	91,43%	Inefisien
30	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,43%**	82,60%	Efisien
31	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	101,19%	29,32%	Efisien
32	Meningkatnya Prasarana Jalan Kabupaten yang Berkualitas dan Merata	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	99,74%	77,87%	Efisien
33	Meningkatnya Sarana Pemukiman Masyarakat yang Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Bersanitasi Aman	97,89%	80,90%	Efisien
34	Meningkatnya Utilitas Permukiman Masyarakat Berkualitas dan Merata	Rumah Tangga Berakses Air Minum	115,83%	88,84%	Efisien
35	Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik	58,6%	89,07%	Inefisien
36	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	105,24%**	85,12%	Efisien
37	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	597%	95,04%	Efisien
38	Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah dan Pelestarian Kearifan Lokal	Organisasi Kepemudaan yang Aktif	100%	69,64%	Efisien

Keterangan : ** pengukuran capaian menggunakan data tahun 2023 yang dirilis pada tahun 2024

Jika output yang dihasilkan entitas lebih besar dibandingkan dengan input yang diterima entitas, maka entitas tersebut dikatakan efisien. Makin besar output yang dihasilkan dibanding dengan input yang digunakan, maka semakin efisien suatu entitas. Efisiensi artinya menggunakan sumber daya yang minimal menghasilkan output yang maksimal yang merupakan perbandingan antara input dan output.



(Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta: 168)

Analisis efisiensi dilakukan melalui analisis perbandingan antara capaian kinerja sasaran dengan capaian anggaran program pendukung sasaran . Dari 38 Indikator sasaran , terdapat 32 sasaran yang dalam pencapaian kinerjanya tergolong efisien dalam penggunaan anggaran yaitu sasaran dengan realisasi kinerja melebihi realisasi anggaran. dn 7 sasaran tidak efisien / inefisien dalam pencapaian kinerjanya.

Sasaran yang tergolong inefisien dalam pencapaian kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perikanan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96%, dan tingkat serapan anggaran sebesar 97,29%.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif dan Efisien, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 80,89%, dan tingkat serapan anggaran sebesar 95,71%.
3. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 36,33% dan tingkat serapan anggaran sebesar 88,47%.
4. Meningkatnya Kualitas Air dengan tingkat capaian kinerja sebesar 73,87% dan tingkat serapan anggaran sebesar 78,18%.
5. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,26% dan tingkat serapan anggaran sebesar 97,38%.
6. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88,82% dan tingkat serapan anggaran sebesar 91,43%.
7. Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik dengan tingkat capaian kinerja sebesar 58,6% dan tingkat serapan anggaran sebesar 91,60%.



Sedangkan Analisis efisiensi untuk 10 kinerja tujuan, dilakukan dengan menyimpulkan rata rata efisiensi dari sasaran pendukung tujuan, sebagai berikut :

Kinerja Tujuan 1: “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berbasis Potensi Wilayah”, berdasarkan analisis efisiensi dari kinerja sasarannya dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan 1 tergolong efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran, karena 2 sasaran pendukungnya termasuk dalam kategori efisien

Kinerja Tujuan 2 : “Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak”, berdasarkan analisis efisiensi dari kinerja sasarannya dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan 2 tergolong kurang efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran, karena 1 dari 2 sasaran pendukungnya termasuk dalam kategori inefisien

Kinerja Tujuan 3 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”, diukur dengan 1 indikator tujuan (Indeks RB) dan 15 indikator sasaran. berdasarkan analisis efisiensi dari kinerja sasarannya dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan 3 tergolong efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran, karena sebagian besar sasaran efisien, yaitu 1 sasaran tidak efisien dari 14 sasaran pendukungnya termasuk dalam kategori efisien

Kinerja Tujuan 4 : “Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya”. Diukur dengan 1 indikator tujuan (angka kemiskinan) dan 2 indikator sasaran (Penurunan PMKS dan IDM), berdasarkan analisis efisiensi dari kinerja sasarannya dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan 4 tergolong kurang efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran, karena 1 dari 2 sasaran pendukungnya termasuk dalam kategori inefisien

Kinerja tujuan 5 : “Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdampak Pada Penyerapan Tenaga

Kerja” berdasarkan analisis efisiensi dari kinerja sasaranannya dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan 5 tergolong efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran, karena 2 sasaran pendukungnya termasuk dalam kategori efisien

Kinerja tujuan 6 : “Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja”, diukur dengan 1 indikator tujuan (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan 1 indikator sasaran (Pencari Kerja Yang Ditempatkan) berdasarkan analisis efisiensi dari kinerja sasaranannya dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan 6 tergolong efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran, karena sasaran pendukungnya termasuk dalam kategori efisien

Kinerja tujuan 7 : “Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Berkelanjutan” diukur dengan 1 indikator tujuan (IKLH) dan 3 indikator sasaran (IKA, IKU, IKL), berdasarkan analisis efisiensi dari kinerja sasaranannya dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan 7 tergolong efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran, karena sebagian sasaran efisien, yaitu 2 sasaran tidak efisien dari 2 sasaran pendukungnya termasuk dalam kategori efisien

Kinerja tujuan 8 : “Meningkatkan Kesenjangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia” diukur dengan 1 indikator tujuan (IPM) dan 4 indikator sasaran (Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, IPG, Jumlah Pengunjung Perpustakaan berdasarkan analisis efisiensi dari kinerja sasaranannya dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan 8 tergolong efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran, karena sebagian besar sasaran efisien, yaitu 1 sasaran tidak efisien dari 3 sasaran pendukungnya termasuk dalam kategori efisien

Kinerja tujuan 9 : “Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas dan Merata Serta Berperspektif Kebencanaan” berdasarkan analisis efisiensi dari kinerja sasaranannya dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan 9 tergolong efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran, karena sebagian besar sasaran efisien, yaitu 1 sasaran tidak efisien dari 4 sasaran pendukungnya termasuk dalam kategori efisien



Kinerja tujuan 10 : “Mengembangkan Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal” diukur dengan 1 indikator tujuan (PAD Bidang Pariwisata) dan 2 indikator sasaran (Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata dan Organisasi Kepemudaan Yang Aktif), berdasarkan analisis efisiensi dari kinerja sasarnya dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan 10 tergolong efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran, karena 2 sasaran pendukungnya termasuk dalam kategori efisien

H. Program Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja

Salah satu analisis capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja sasaran adalah dengan menguraikan program kegiatan pendukung sasaran untuk mendapatkan informasi efektivitas strategi instansi pemerintah dalam rangka pencapaian kinerja.

1) Sasaran Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Perekonomian dan SDA.

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.003.587.282	2.531.524.085	63,23%
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.584.515.500	519.143.425	20,09%
	Jumlah	6.588.102.782	3.050.667.510	46,31%

2) Sasaran Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Sekretariat Daerah	111.003.400	45.755.157	41,22%
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan	47.940.000	30.400.000	63,41%
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.628.413.600	1.336.999.100	82,10%
	Jumlah	4.621.749.500	4.173.699.319	90,30%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

3) Sasaran Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Pertanian

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas PU Bina Marga dan SDA

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	2.449.580.000	446.524.960	18,22%
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	5.694.981.800	5.554.225.600	97,52%
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	2.330.973.000	2.222.492.681	95,34%
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas TPHP	7.970.552.600	3.350.000	0,042%

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas TPHP	17.371.955.200	1.687.114.834	9,71%
7	Program Penyuluhan Pertanian Dinas TPHP	2.569.962.700	618.684.800	24,07%
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PU Bina Marga dan SDA	10.143.004.700	8.696.342.057	85,73%
	Jumlah	48.531.010.000	19.228.734.932	39,62%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

4) Sasaran Meningkatnya Kontribusi PDRB Kategori Perikanan

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perikanan

No.	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan	157.721.796	140.577.200	89,12%
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dinas Perikanan	292.820.804	279.945.000	95,60%
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan	1.800.000.000	1.768.988.000	98,27%
	Jumlah	2.250.542.600	2.189.510.200	97,29%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

5) Sasaran Terjaganya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Keindahan Lingkungan

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja	13.159.964.050	7.048.619.770	53,56%
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada 30 Kecamatan	9.754.106.984	8.252.223.188	84,60%
	Jumlah	22.914.071.034	15.300.842.958	66,77%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)



6) Sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Penduduk

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	172.600.000	122.392.500	70,91%
2	Program Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	135.420.000	126.365.000	93,31%
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	336.537.500	251.802.500	74,82%
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	257.800.000	234.118.400	90,81%
	Jumlah	902.357.500	734.678.400	81,41%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

7) Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.441.878.400	5.138.439.875	94,42%
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor Dinas Komunikasi Dan Informatika	63.400.000	61.748.000	97,39%
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Dinas Komunikasi Dan Informatika	55.718.300	45.597.940	81,83%
	Jumlah	17.177.230.600	14.500.614.915	84,41%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)



8) Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Kecamatan, Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Dinas Komunikasi dan Informatika.

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada 30 Kecamatan	26.898.299.900	26.377.434.576	98,06%
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada PD-Kecamatan	785.039.200	761.834.400	97,04%
3	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	953.594.400	453.670.470	47,57%
4	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	11.616.233.900	9.254.829.100	79,67%
	Jumlah	40.253.167.400	36.847.768.546	91,54%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

9) Sasaran Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab	487.277.800	158.853.416	32,60%
2.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penataan Organisasi	953.594.400	453.670.470	47,57%



No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
	Sub Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
	Jumlah	1.440.872.200	612.523.886	42,51%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

10) Sasaran Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bagian Perekonomian

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.030.000.000	1.029.097.500	99,91%
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.584.515.500	519.143.425	20,09%
	Jumlah	3.614.515.500	1.548.240.925	42,83%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

11) Sasaran Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Organisasi)

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	162.443.490	53.989.000	33,23%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan RB	508.004.000	73.565.350	14,48%
	Jumlah	670.447.490	127.554.350	19,03%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)



12) Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Tata Pemerintahan)

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	3.416.837.600	1.317.839.000	38,56%
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	682.606.400	263.795.700	38,64%
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	2.542.846.960	789.572.871	31,05%
4	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	1.090.591.625	87.002.750	7,97%
5	Program Penanganan Kerawanan Pangan	49.404.100	46.489.000	94,10%
6	Program Pengawasan Keamanan Pangan	9.164.400	8.951.500	97,68%
	Jumlah	7.791.451.085	2.513.650.821	32,26%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

13) Sasaran Terintegrasinya Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran Dalam Dokumen RPJMD dan RKPD

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD dan Bappeda

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.960.914.020	21.743.712.935	90,74%
	Jumlah	23.960.914.020	21.743.712.935	90,74%



14) Sasaran Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.683.370.800	938.888.260	55,77%
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	91.183.809.853	87.314.499.200	95,75%
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	89.741.700	0	0%
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	568.286.100	471.255.250	82,92%
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.781.286.400	11.396.912.500	77,10%
	Jumlah	108.306.494.853	100.121.555.210	92,44%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

15) Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Inspektorat, BPKAD, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, dan Bagian PBJ Setda



No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat	1.397.620.000	717.613.406	51,35%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Inspektorat	1.506.400.000	1.301.091.816	86,37%
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	558.528.653.880	539.393.576.931	96,57%
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.540.942.646	3.718.128.908	43,53%
5.	Program Perekonomian dan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan	459.380.000	330.333.050	71,91%
6.	Program Perekonomian dan Pembangunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.495.271.000	1.337.659.130	89,46%
	Jumlah	571.928.267.526	546.798.403.241	95,61%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

16) Sasaran Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menengah dan/Atau Tahunan yang Akurat dan Tepat Waktu

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	3.464.209.200	2.127.896.063	61,42%
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	3.438.390.180	2.527.591.823	73,51%
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	2.142.181.000	895.376.684	41,79%
	Jumlah	9.044.780.380	5.550.864.570	61,37%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)



17) Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Efektif dan Efisien

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) BPKAD dan Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	558.528.653.880	539.393.576.931	96,57%
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	8.540.942.646	3.718.128.908	43,53%
3	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan RB	508.004.000	73.565.350	14,48%
Jumlah		567.577.600.526	543.185.271.189	95,70%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

18) Sasaran Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Badan Pendapatan Daerah

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pendapatan Daerah	160.620.000	123.501.000	76,89%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah	8.328.250.420	4.972.128.190	59,70%
	Jumlah	8.488.870.420	5.095.629.190	60,02%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

19) Sasaran Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Oleh SDM Aparatur yang Kompeten

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM



No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	3.687.102.140	2.223.657.065	60,30%
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	178.429.000	156.480.877	87,69%
	Jumlah	3.865.531.140	2.380.137.942	61,57%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

20) Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial dan Dinas PPPAKB

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial	820.205.000	749.503.800	91,38%
2	Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	2.755.653.000	2.355.480.070	85,47%
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial	33.101.881.700	30.406.874.104	91,85%
4	Program Penanganan Bencana Dinas Sosial	12.000.000.000	9.554.787.779	79,62%
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dinas Sosial	216.838.000	193.054.000	89,03%
6	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	52.233.233.000	37.387.528.400	71,57%
7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - DPPPAB	11.606.003.000	11.525.474.791	99,30%
	Jumlah	112.733.813.700	92.172.702.944	81,76%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

21) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Desa

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.397.346.077	4.842.271.500	89,71%
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.199.177.520	3.126.134.062	74,44%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada 31 Kecamatan	7.334.699.190	5.477.022.960	74,67%
	Jumlah	16.931.222.787	13.445.428.522	79,41%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

22) Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/PMA Berskala Nasional

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	420.325.550	132.900.929	31,62%
2	Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	847.755.500	429.007.621	50,61%
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	193.193.000	59.783.600	30,95%
	Jumlah	1.461.274.050	621.692.150	42,54%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)



23) Sasaran Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Usaha Mikro

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan UM	84.261.000	80.196.728	95,18%
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Dinas Koperasi dan UM	391.996.000	374.923.972	95,64%
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UM	161.643.500	159.791.150	98,85%
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkh) Dinas Koperasi dan UM	1.875.329.900	897.258.277	47,85%
5.	Program Pengembangan UMKH Dinas Koperasi dan UM	1.052.546.000	840.041.166	79,81%
	Jumlah	3.565.776.400	2.352.211.293	65,97%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

24) Sasaran Meningkatnya Angkatan Kerja Yang Berhasil Ditempatkan

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Tenaga Kerja

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja	3.765.494.000	3.541.247.600	94,04%
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja	2.869.125.199	1.473.738.696	51,37%
3.	Program Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja	2.361.513.000	2.054.505.640	86,99%
4.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	150.000.000	99.850.000	66,57%
	Jumlah	9.146.132.199	7.169.341.936	78,39%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

25) Sasaran Meningkatnya Kualitas Air

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	170.603.700	88.759.000	52,02%
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	777.821.500	715.686.866	92,01%
3.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup	225.683.500	121.261.800	53,73%
4.	Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup	10.720.942.800	10.704.864.821	99,85%
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.000.000	20.000.000	100%
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	203.712.800	149.524.200	73,40%
	Jumlah	12.118.764.300	11.800.096.687	93,37%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

26) Sasaran Meningkatnya Kualitas Udara

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	170.603.700	88.759.000	52,02%
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	777.821.500	715.686.866	92,01%



No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
3.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup	225.683.500	121.261.800	53,73%
4.	Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup	10.720.942.800	10.704.864.821	99,85%
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.000.000	20.000.000	100%
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	203.712.800	149.524.200	73,40%
	Jumlah	12.118.764.300	11.800.096.687	93,37%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

27) Sasaran Meningkatnya Kualitas Lahan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	170.603.700	88.759.000	52,02%
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	777.821.500	715.686.866	92,01%
3.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup	225.683.500	121.261.800	53,73%
4.	Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup	10.720.942.800	10.704.864.821	99,85%
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.000.000	20.000.000	100%
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	203.712.800	149.524.200	73,40%

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
7.	Program Penatagunaan Tanah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	86.929.230	85.976.084	98,90%
	Jumlah	12.205.693.530	11.886.072.771	97,38%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

28) Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Kesehatan, Dinas PPPAKB, dan RSD

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	224.493.739.543	198.637.193.542	88,48%
2	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	12.247.897.990	9.884.133.225	80,70%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	405.198.200	306.042.500	75,52%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	51.237.473.600	48.795.298.951	95,23%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rumah Sakit Daerah (RSD) KALISAT - BLUD	42.231.827.000	31.552.787.774	74,71%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi - BLUD	246.600.000.000	222.291.985.704	90,14%
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rumah Sakit Daerah (RSD) BALUNG - BLUD	79.490.880.000	61.484.732.663	77,35%
8	Program Pengendalian Penduduk - DPPPAB	727.197.500	668.928.000	91,98%
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - DPPPAB	11.887.419.389	10.651.224.274	89,60%
	Jumlah	669.321.633.222	584.272.326.633	87,29%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)



29) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan	444.018.972.747	414.625.007.478	93,38%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan	93.872.025.100	77.183.085.870	82,22%
	Jumlah	537.890.997.847	491.808.093.348	91,43%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

30) Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesenjangan Gender dalam Masyarakat

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan- DPPPAB	130.051.100	124.278.190	95,56%
2	Program Perlindungan Perempuan - DPPPAB	220.190.800	148.201.481	67,30%
3	Program Perlindungan Khusus Anak- DPPPAB	352.549.800	308.003.515	87,36%
	Jumlah	702.791.700	580.483.186	82,60%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

31) Sasaran Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	281.398.800	59.040.000	20,98%
2	Program Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	134.456.200	62.880.000	46,76%
	Jumlah	415.855.000	121.920.000	29,32%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)



32) Sasaran Meningkatnya Prasarana Jalan Kabupaten yang Berkualitas dan Merata

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dinas PU Bina Marga dan SDA	14.883.843.276	12.896.246.321	86,64%
2.	Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PU Bina Marga dan SDA	105.206.720.029	80.623.984.300	76,63%
	Jumlah	120.090.563.305	93.520.230.621	77,87%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

33) Sasaran Meningkatnya Sarana Pemukiman Masyarakat yang Berkualitas dan Merata

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	8.880.323.656	7.657.150.036	86,27%
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	8.566.928.170	7.976.440.025	93,10%
3.	Program Penataan Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	12.150.302.000	7.806.060.645	64,24%

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
4.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	961.620.770	886.855.596	92,22%
5.	Program Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	500.000.000	56.480.000	11,29%
6.	Program Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5.470.407.000	5.167.320.153	94,45%
	Jumlah	36.529.581.596	29.550.306.455	80,90%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

34) Sasaran Meningkatnya Utilitas Permukiman Masyarakat Berkualitas dan Merata

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	103.847.775.816	92.258.826.592	88,84%
	Jumlah	103.847.775.816	92.258.826.592	88,84%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

35) Sasaran Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Perhubungan

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan	9.085.342.600	8.377.714.440	92,21%



No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
3.	Program Pengelolaan Penerbangan Dinas Perhubungan	218.882.600	140.422.600	64,15%
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian Dinas Perhubungan	95.000.000	91.419.500	96,23%
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	103.847.775.816	92.258.826.592	88,84%
	Jumlah	113.247.001.016	100.868.383.132	89,07%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

36) Sasaran Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.484.679.004	3.760.863.714	83,86%
2.	Program Penanggulangan Bencana Satuan Polisi Pamong Praja	56.556.000	45.000.000	79,56%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja	456.045.800	448.032.124	98,24%
	Jumlah	4.997.280.804	4.253.895.838	85,12%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

37) Sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.176.625.000	2.883.446.330	90,77%
2.	Program Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.114.940.000	1.088.284.190	97,60%
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.666.360.000	2.640.913.090	99,04%
	Jumlah	6.957.925.000	6.612.643.610	95,04%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember (UnAudited)

38) Sasaran Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah dan Pelestarian Kearifan Lokal

Program utama yang mendukung pencapaian sasaran antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

No	Program	Anggaran 2024	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	6.228.050.000	6.105.481.700	98,03%
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	11.849.070.100	5.947.928.145	50,19%
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	101.729.341	100.031.253	98,33%
4	Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.079.734.000	1.909.149.100	91,79%
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	404.809.000	328.009.163	81,02%
	Jumlah	20.663.392.441	14.390.599.361	69,64%



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Mempedomani ketentuan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah “Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekosentrasi sehingga pemberian tugas pembantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum serta ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Laporan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana sistematis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya dan tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya. Namun demikian, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Jember tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta tidak memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Jember sehingga laporan mengenai



capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dari tingkatan pemerintahan di atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya adalah **Nihil**.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh secara minimal oleh setiap warga negara. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan yang sebagian substansi pelayanan dasarnya telah ditetapkan sebagai SPM yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial.

Selanjutnya penerapan SPM yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4.1 Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dituangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan oleh Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah. Pelayanan Pendidikan Dasar juga meliputi pelayanan pendidikan dasar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.

Pemerataan pelayanan pendidikan dapat ditunjang beberapa indikator, diantaranya adalah jumlah lembaga pendidikan dan tenaga pengajar. Kecukupan lembaga pendidikan untuk mencakup jumlah siswa menjadi hal yang penting mengingat besarnya luas wilayah



Kabupaten Jember. Selain itu, kecukupan tenaga pengajar juga dapat berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Berikut perkembangan perkembangan jumlah lembaga pendidikan dan tenaga pendidik pada tiga jenjang pendidikan antara lain PAUD, setara SD, dan setara SMP serta jumlah guru di Kabupaten Jember selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 4.1.1
Perkembangan Jumlah Lembaga Pendidikan Dan Jumlah Guru
Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Jumlah Lembaga					Jumlah Guru				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD	1.860	1.878	1.883	1.914	1.824	4.374	4.724	4.529	4.380	4.379
TK	931	942	951	963	959	2.704	2.908	2.805	2.722	2.695
TPA	21	23	20	22	15	37	42	36	35	35
KB	542	547	549	563	516	964	1.053	988	951	969
SPS	366	366	363	366	334	669	721	700	672	680
SD/SDLB/MI	1.448	1.455	1.475	1.478	1.478	13.487	12.020	12.835	12.692	12.301
SD	1.038	1.036	1.042	1.051	1.051	8.738	7.755	8.658	8.245	7.854
SDLB										
MI	410	419	433	427	427	4.749	4.265	4.177	4.447	4.447
SMP/SMPLB/MTs	600	592	602	611	611	8.115	7.601	7.363	7.422	7.371
SMP	359	344	346	357	344	4.300	4.126	4.253	4.233	4.170
SMPLB										
MTs	230	236	246	244	244	3.723	3.350	2.997	3.078	3.078
SLB	11	12	10	10	10	92	125	113	111	123

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2025

Jenis Pelayanan Dasar urusan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 meliputi:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator pencapaian Pendidikan Anak Usia Dini yakni jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dengan indikator kinerja meliputi:



1. Angka partisipasi sekolah
2. Angka partisipasi murni
3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
4. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/D IV
5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD
6. Kecukupan formasi guru ASN
7. Indeks distribusi guru
8. Proporsi PTK bersertifikat
9. Proporsi PTK penggerak

b. Pendidikan Dasar

Indikator pencapaian pendidikan dasar yakni jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS) dengan indikator kinerja meliputi:

1. Angka partisipasi kasar
2. Angka partisipasi sekolah
3. Kemampuan literasi
4. Kemampuan numerasi
5. Perbedaan skor literasi
6. Perbedaan skor numerasi
7. Indeks iklim keamanan
8. Indeks iklim kebhinekaan
9. Indeks iklim inklusivitas
10. Kecukupan formasi guru ASN
11. Indeks distribusi guru
12. Proporsi PTK bersertifikat
13. Proporsi PTK penggerak

c. Pendidikan Kesetaraan

Indikator pencapaian pendidikan kesetaraan yakni jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan indikator kinerja meliputi:



1. Angka partisipasi kasar
2. Angka partisipasi sekolah
3. Kemampuan literasi
4. Kemampuan numerasi
5. Perbedaan skor literasi
6. Perbedaan skor numerasi
7. Indeks iklim keamanan
8. Indeks iklim kebhinekaan
9. Indeks iklim inklusivitas
10. Kecukupan formasi guru ASN
11. Indeks distribusi guru
12. Proporsi PTK bersertifikat
13. Proporsi PTK penggerak

4.1.2 Target Pencapaian

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai SPM pada tahun 2024 termasuk perhitungan pembiayaannya sebagaimana termaktub dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD maupun RKPD. Secara rinci, target capaian penerapan SPM bidang Pendidikan tahun 2024 Kabupaten Jember berdasarkan jenis pelayanan dasar yang meliputi Pendidikan Dasar Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.2
Target SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Jember

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	74254 (100%)	1 Tahun				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PAUD			Angka partisipasi sekolah	90	1 Tahun	
					Angka partisipasi murni	90		
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	78		
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	78		
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3.5		
					Kecukupan formasi guru ASN	100		
					Indeks distribusi guru	0.41		
					Proporsi PTK bersertifikat	45		
					Proporsi PTK penggerak	1		
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	352404 (100%)					
		SD			Angka partisipasi kasar	95		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Angka partisipasi sekolah	95		
					Kemampuan literasi	60		
					Kemampuan numerasi	45		
					Perbedaan Skor Literasi	60.08		
					Perbedaan Skor numerasi	44.42		
					Indeks iklim keamanan	70		
					Indeks iklim kebinekaan	68		
					Indeks iklim inklusivitas	54.6		
					Kecukupan formasi guru ASN	32.5		
					Indeks distribusi guru	0.72		
					Proporsi PTK bersertifikat	43.57		
					Proporsi PTK penggerak	0.71		
		SMP			Angka partisipasi kasar	90		
					Angka partisipasi sekolah	90		
					Kemampuan literasi	65		
					Kemampuan numerasi	50		
					Perbedaan Skor Literasi	63.74		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Perbedaan Skor numerasi	44.39		
					Indeks iklim keamanan	65		
					Indeks iklim kebinekaan	65		
					Indeks iklim inklusivitas	55		
					Kecukupan formasi guru ASN	41.5		
					Indeks distribusi guru	0.31		
					Proporsi PTK bersertifikat	90.59		
					Proporsi PTK penggerak	0.16		
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	6762 (100%)		Angka partisipasi kasar	10		
					Angka partisipasi sekolah	10		
					Kemampuan literasi	150		
					Kemampuan numerasi	155		
					Perbedaan skor literasi	149.43		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Perbedaan skor numerasi	127.78		
					Indeks iklim keamanan	186		
					Indeks iklim kebinekaan	173		
					Indeks iklim inklusivitas	160		
					Kecukupan formasi guru ASN	1		
					Indeks distribusi guru	1		
					Proporsi PTK bersertifikat	1		
					Proporsi PTK penggerak	1		

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2025

4.1.3 Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun baik dari anggaran maupun penerima layanan.

a. Realisasi Anggaran

Adapun Realisasi Anggaran pada bidang Pendidikan Kabupaten Jember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.3
Realisasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Jember

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	79.077.060.200	74.208.079.800	93.84
2	Pendidikan Sekolah Dasar	204.231.835.847	200.476.995.967	98.16
3	Pendidikan Sekolah Menengah	157,856,286,700	137.706.968.762	87.24
4	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.853.790.000	2.191.702.950	76.80

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2025

b. Realisasi Layanan

Pencapaian SPM bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2024 telah tercapai dengan TUNTAS UTAMA dan memenuhi standar mutu layanan sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pencapaian mutu layanan dasar SPM bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.4
Realisasi Pelayanan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Jember

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			97%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini					99.87%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	74254	76505	-2251	100%

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			(20%)		19.87%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/Terpenuhi	99.33%
	1. Angka partisipasi sekolah	%	90	91.34	-1.3400	100%
	2. Angka partisipasi murni	%	90	91.34	-1.3400	100%
	3 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi	%	78	77.11	0.8900	98.86%
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1) Diploma empat (D-IV)	%	-78	77.97	0.0300	99.96%
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	-3.5	3.33	0.1700	95.14%
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0.000	100%
	7. Indeks distribusi guru	%	0.41	0.44	-0.0300	100%
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	45	53.96	-8.9600	100%
	9. Proporsi PTK Penggerak	%	1	4.12	-3.1200	100%
2.	Pendidikan Dasar					91.48%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			(80%)		73.97%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	352404	325837	26567	92.46%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			(20%)		17.51%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/Terpenuhi	87.55%

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
SD						87.66%
	1. Angka Partisipasi kasar	%	95	94.1	0.9000	99.05%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	95	94.1	0.9000	99.05%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	60	72.09	-12.0900	100%
	4. Kemamuan Numerasi	Nilai	45	63.42	-18.4200	100%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	60.08	72.09	-12.0100	100%
	6.Perbedaan skor numerasi	Nilai	44.42	63.42	-19.000	100%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	70	70.14	-0.1400	100%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	68	71.95	-3.9500	100%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54.6	53.64	0.9600	98.24%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	32.5	0.24	-32.2600	0.74%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.72	0.59	0.1300	81.94%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	43.57	94.5	-50.9300	100%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0.71	0.43	0.2800	60.56%
	SMP					87.44%
	1. Angka Partisipasi kasar	%	90	89.29	0.7100	99.21%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	90	89.29	0.7100	99.21%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	65	67.28	-2.2800	100%
	4. Kemamuan Numerasi	Nilai	50	63.5	-13.5000	100%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	63.74	67.2	-3.4600	100%
	6.Perbedaan skor numerasi	Nilai	44.39	63.53	-19.1400	100%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	65	66.25	-1.2500	100%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	65	70.65	-5.6500	100%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55	53.9	1.1000	98.24%

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	41.5	0.58	40.9200	1.40%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.31	0.34	-0.0300	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	90.59	35.23	55.3600	38.89%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0.16	0.16	0.0000	100%
3.	Pendidikan Kesenjangan					99.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	6762	6809	-47	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.67%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/ Dipenuhi					98.34%
	1. Angka Partisipasi kasar	%	10	12.86	-2.8600	100%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	10	12.86	-2.8600	100%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	150	155.24	-5.2400	100%
	4. Kemampuan Numerasi	Nilai	155	160.37	-5.3700	100%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	149.43	155.24	-5.8100	100%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	127.78	160.37	-32.5900	100%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	186	173.53	12.4700	93.30%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	173	166.48	6.5200	96.23%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	160	142.22	17.7800	88.89%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	1	1	0.0000	100%
	11. Indeks distribusi guru	%	1	1	0.0000	100%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	1	1	0.0000	100%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	1	1	0.0000	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2025

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh OPD baik yang bersumber dari APBD APBN dan Sumber dana lain yang sah.

Adapun rincian Alokasi Anggaran yang menunjang penyelenggaraan pelayanan SPM urusan Pendidikan di Kabupaten Jember tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.5
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Jember

No	Jenis Pelayanan	Alokasi Anggaran		
		APBD	APBN	Lain ²
1	Pendidikan Anak Usia Dini	79,077,060,200	-	-
2	Pendidikan Sekolah Dasar	204,231,835,847	-	-
3	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	157,856,286,700	-	-
4	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.853.790.000	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2025

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada tahun 2024 didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.6
Dukungan Personil pada bidang Pendidikan
Kabupaten Jember 2024

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil
1	Pendidikan Anak Usia Dini	- 10 Pegawai - 2 Pengawas PAUD
2	Pendidikan Dasar	- 22 Pegawai - 26 Pegawai SD - 18 Pegawai SMP
3	Pendidikan Kesetaraan	- 10 Pegawai - 16 Pemilik Luar Sekolah

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2025

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Permasalahan dan solusi dalam SPM bidang pendidikan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.7
Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Jember

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1. Masih banyak Tenaga Pendidikan PAUD belum berijazah S1.	1. Pemetaan Data Guru yang belum berijazah S1 2. Penerimaan Beasiswa Guru yang belum S1
2	Pendidikan Sekolah Dasar	1. Kurangnya Penguatan terhadap Satuan Pendidikan SD yang memiliki keunggulan dalam bidang akademik dan non akademik untuk menuju Indonesia Emas 2045. 2. Masih rendahnya karakter peserta didik, sehingga marak bullying, perundungan, kekerasan pada anak yang dilakukan disekolah/lingkungan belajar 3. Rendahnya Angka Capaian Literasi dan Numerasi di Kabupaten Jember	1. Pembinaan terhadap Satuan Pendidikan SD yang memiliki banyak prestasi dengan melibatkan Pengawas Sekolah, komite sekolah, peran serta masyarakat, Dunia Usaha dan Industri, untuk bisa berkembang secara mandiri 2. Pemberlakuan Surat keputusan menteri pendidikan tentang kekerasan anak di sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023. Permendikbudristek ini mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan, penekanan karakter melalui kedisiplinan yang diterapkan pada

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
			guru/anak di setiap satuan Pendidikan, Gerakan cepat tanggap terhadap siswa yang memiliki gejala frustrasi di sekolah dengan penanganan Health Education 3. Pengembangan Kompetensi Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia 4. Menyelenggarakan ajang Lomba menulis untuk siswa dan guru
3	Pendidikan Sekolah Menengah	1. Kurangnya Penguatan terhadap Satuan Pendidikan SMP yang memiliki keunggulan dalam bidang akademik dan non akademik untuk menuju Indonesia Emas 2045. 2. Belum tercapainya wajib belajar 13 tahun serta pemerataan kesempatan dalam memperoleh Pendidikan dengan Tingginya Angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Jember. 3. Masih rendahnya karakter peserta didik, seningga marak bullying, perundungan, kekerasan pada anak yang dilakukan disekolah/lingkungan belajar 4. Rendahnya Angka Capaian Literasi dan Numerasi di Kabupaten Jember 5. Tingginya Data ATS mempengaruhi capaian Peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jember	1. Pembinaan terhadap Satuan Pendidikan SMP yang memiliki banyak prestasi dengan melibatkan Pengawas Sekolah, komite sekolah, peran serta masyarakat, Dunia Usaha dan Industri, untuk bisa berkembang secara mandiri 2. Perbaikan Data DAPODIK melalui Verval Data untuk menurunkan Residu Peserta Didik, Sinergi dan Kolaborasi dengan seluruh perangkat Desa/Kecamatan untuk menanggulangi munculnya anak tidak sekolah di usia sekolah, mencari solusi pembelajaran kejar paket A/B/C bagi anak tidak sekolah didaerah pesisir/perkebunan/pabrik yang tidak mau kembali ke sekolah formal dengan membebaskan biaya sekolah dan pemberian uang saku/uang transport, pendirian PKBM di Setiap Kecamatan minimal 1 PKBM. 3. Pemberlakuan Surat keputusan menteri pendidikan tentang kekerasan anak di sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023. Permendikbudristek ini mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan, penekanan karakter melalui kedisiplinan yang diterapkan pada guru/anak di setiap satuan Pendidikan, Gerakan cepat tanggap terhadap siswa yang memiliki gejala frustrasi di sekolah dengan penanganan Health Education

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
			4. Pengembangan Kompetensi Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia 5. Menyelenggarakan ajang Lomba menulis untuk siswa dan guru 6. Beasiswa Mahasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berdomisili di Jember
4	Pendidikan Sekolah Non Formal	1. Belum tercapainya wajib belajar 13 tahun serta pemerataan kesempatan dalam memperoleh Pendidikan dengan Tingginya Angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Jember. 2. Tingginya Data ATS mempengaruhi capaian Peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jember	1. Perbaiki Data DAPODIK melalui Verval Data untuk menurunkan Residu Peserta Didik, Sinergi dan Kolaborasi dengan seluruh perangkat Desa/Kecamatan untuk menanggulangi munculnya anak tidak sekolah di usia sekolah, mencari solusi pembelajaran kejar paket A/B/C bagi anak tidak sekolah di daerah pesisir/perkebunan/pabrik yang tidak mau kembali ke sekolah formal dengan membebaskan biaya sekolah dan pemberian uang saku/uang transport, pendirian PKBM di Setiap Kecamatan minimal 1 PKBM. 2. Beasiswa Mahasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berdomisili di Jember

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2025

4.2 Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan dituangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, secara garis besar capaian kinerja SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 meliputi:



a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan dengan indikator kinerja meliputi:

1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)
2. Tablet Tambah Darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)
3. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil:
 - Tes Kehamilan
 - Pemeriksaan HB
 - Pemeriksaan Golongan Darah
 - Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)
 - Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV
4. Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu
5. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
6. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
7. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)
8. Tenaga Medis:
 - Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
9. Tenaga Kesehatan:
 - Perawat,
 - Bidan,
 - Tenaga Kefarmasian, dan
 - Tenaga Gizi.
10. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)
(Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga).

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan indikator pencapaian yakni Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan dengan indikator kinerja meliputi:



1. Formulir Fotograf
2. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)
3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak KIA (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)
4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
5. Tenaga Medis:
 - Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
6. Tenaga Kesehatan
 - Bidan
 - Perawat
 - Tenaga Kefarmasian
 - Tenaga Gizi

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan indikator pencapaian yakni Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan dengan indikator kinerja meliputi:

1. Vaksin Hepatitis BO
2. Vitamin K1 Injeksi
3. Salep/Tetes Mata Antibiotik
4. Formulir Bayi Baru Lahir
5. Formulir MTBM
6. Buku KIA
7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
8. Tenaga Medis:
 - Dokter/Dokter Spesialis Anak
9. Tenaga Kesehatan:
 - Bidan
 - Perawat
 - Tenaga Kefarmasian
 - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
 - Tenaga Gizi
10. Kader Kesehatan

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan Balita dengan indikator pencapaian yakni jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan dengan indikator kinerja meliputi:

1. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
2. Formulir DDTK
3. Buku KIA
4. Vitamin A Biru
5. Vitamin A Merah
6. Vaksin Imunisasi Dasar yaitu:
 - BCG
 - Polio Tetes
 - IPV
 - DPT-HB-Hib
 - Campak Rubella
7. Vaksin Imunisasi Lanjutan yaitu:
 - DPT-HB-Hib
 - Campak Rubella
8. Jarum suntik dan BHP
9. Peralatan Anafilaktik
10. Formula Terapi Gizi Buruk
11. Tenaga Medis:
 - Dokter
12. Tenaga Kesehatan:
 - Bidan
 - Perawat
 - Tenaga Gizi
13. Guru PAUD

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dengan indikator kinerja meliputi:

1. Buku Rapor Kesehatanku



2. Buku Pemantauan Kesehatan
3. Kuesioner Skrining Kesehatan
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah
5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah
6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah
7. Alat Pemeriksaan Hb
8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7
9. Media promosi kesehatan
10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
11. Tenaga Medis:
 - Dokter/Dokter Gigi
12. Tenaga Kesehatan:
 - Bidan
 - Perawat
 - Tenaga Gizi
 - Tenaga Kefarmasian
 - Tenaga Kesehatan Masyarakat
13. Tenaga Non-Kesehatan:
 - Guru
14. Kader Kesehatan/Dokter Kecil/Peer Conselor

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dengan indikator kinerja meliputi:

1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
2. Alat
 - Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)
 - Tensimeter
 - Glukometer
 - Alat Pemeriksa Hb



- Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol
- KIT IVA Tes
- 3. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb
- 4. Kit Ophthalmologi Komunitas
- 5. Kuesioner PUMA
- 6. Alat Pelayanan KB
- 7. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
- 8. Vaksin Tetanus Difteri (td)
- 9. Tenaga Medis:
 - Dokter
- 10. Tenaga Kesehatan:
 - Bidan
 - Perawat
 - Tenaga Gizi
 - Tenaga Kesehatan Masyarakat
- 11. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut dengan indikator kinerja meliputi:

1. Alat pemeriksaan deteksi dini
 - Alat ukur berat badan
 - Alat ukur tinggi badan
 - Alat ukur lingkar perut
 - Lingkar lengan atas, dan
 - Tensimeter
2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah
3. Alat pemeriksaan kolesterol
4. Bahan medis Habis Pakai, Strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, Lancet, Kapas alkohol
5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/Activity Daily Living (ADL Barthel)



6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya
7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
8. Tenaga Medis:
 - Dokter
9. Tenaga Kesehatan
 - Bidan
 - Perawat
 - Tenaga Gizi
 - Tenaga Kesehatan Masyarakat
10. Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan indikator kinerja meliputi:

1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
2. Obat Hipertensi
3. Tensimeter
4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)
5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
6. Tenaga Medis:
 - Dokter
7. Tenaga Kesehatan:
 - Bidan
 - Perawat
 - Tenaga Gizi
 - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
 - Tenaga Kefarmasian
 - Tenaga Kesehatan Masyarakat

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dengan indikator kinerja meliputi:

1. Obat Diabetes Melitus



2. Fotometer atau Glukometer
3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet
4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)
5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
6. Tenaga Medis:
 - Dokter
7. Tenaga Kesehatan:
 - Bidan
 - Perawat
 - Tenaga Kefarmasian
 - Tenaga Kesehatan Masyarakat
 - Tenaga Gizi
 - Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dengan indikator kinerja meliputi:

1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)
2. Penyediaan Psikofarmaka
3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi
4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan
5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
6. Tenaga Kesehatan:
 - Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
7. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa
8. Tenaga profesional lainnya

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan indikator kinerja meliputi:

1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
2. Reagen Zn TB
3. Masker bedah dan Masker N95
4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering
5. Katrid tes cepat molekuler
6. Formulir pencatatan dan pelaporan
7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)
8. Tuberkulin
9. Tenaga Medis:
 - Dokter
 - Dokter Spesialis Penyakit Dalam
 - Dokter Spesialis Paru
10. Tenaga Kesehatan:
 - Perawat
 - Tenaga Kefarmasian
 - Tenaga Kesehatan Masyarakat
 - Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
 - Radiografer
11. Kader Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) dengan indikator kinerja meliputi:

1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama

3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai
4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK
5. Tenaga Medis:
 - Dokter
 - Dokter Spesialis Penyakit Dalam
 - Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
6. Tenaga Kesehatan:
 - Bidan
 - Perawat
 - Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)
 - Tenaga kesehatan masyarakat
7. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Mutu oleh Daerah

Dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai target dalam penanganan kesehatan. Target pencapaian ini adalah target yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menunjang pencapaian SPM termasuk perhitungan pembiayaannya yang berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah baik RPJMD maupun RKPD. Adapun target pencapaian SPM urusan kesehatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.1
Target Capaian Urusan Kesehatan Kabupaten Jember

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan	40641 (59.04 %)		1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	40.819	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
		pelayanan kesehatan					
					2. Tablet tambah darah	12.2457	
					3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	9.102	
					4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	9.102	
					5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	9.102	
					6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	900	
					7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	9.102	
					8. Kartu ibu/rekam medis ibu	9.102	
					9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9.102	
					10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	9.102	
					11. Gel USG	15	
					12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	98	
					13. Tenaga kesehatan : Perawat	4993	
					14. Tenaga kesehatan : Bidan	3245	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	387	
					16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	449	
					17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	511	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	40641 (73.36 %)		1. Formulir partograf	40.641	
					2. Kartu ibu/rekam medis ibu	40.641	
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	40.641	
					4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	248	
					5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	98	
					6. Tenaga kesehatan : Bidan	4.993	
					7. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	387	
					8. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	449	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	38611 (75.82 %)		1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	38.611	
					2. Vitamin K1 injeksi	38.611	
					3. Salep/tetes mata antibiotik	38.611	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					4. Formulir bayi baru lahir	38.611	
					5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	38.611	
					6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	38.611	
					7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	248	
					8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	84	
					9. Tenaga kesehatan : Bidan	3.245	
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	4.993	
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	387	
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	449	
					13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	449	
					14. Kader Kesehatan	14.380	
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	142887 (80.82%)		1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	42.632	
					2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	42.632	
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	30.418	
					4. Vitamin A Biru	38.703	
					5. Vitamin A Merah	38.703	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	8.274	
					7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	8.277	
					8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	8.277	
					9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	8.277	
					10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	8.277	
					11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	8.419	
					12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	100	
					13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	100	
					14. Peralatan Anafilaktik	100	
					15. Formula Terapi Gizi Buruk	100	
					16. Tenaga medis : Dokter	84	
					17. Tenaga kesehatan : Bidan	3.245	
					18. Tenaga kesehatan : Perawat	4.993	
					19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	449	
					20. Guru PAUD	0	
					21. Kader Kesehatan	14.380	
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	313727 (87.01%)		1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	2.926	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	2.926	
					3. Kuesioner skrining kesehatan	2.926	
					4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	248	
					5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	248	
					6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	248	
					7. Alat Pemeriksaan Hb	248	
					8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	248	
					9. Media promosi kesehatan	248	
					10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	50	
					11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	349	
					12. Tenaga kesehatan : Bidan	3245	
					13. Tenaga kesehatan : Perawat	4.993	
					14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	449	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	50	
					16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	449	
					17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	0	
					18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	14.380	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1682170 (87.19%)		1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	248	
					2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	248	
					3. Alat : Tensimeter	248	
					4. Alat : Glukometer	248	
					5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	248	
					6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	248	
					7. Alat : KIT IVA Tes	248	
					8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	248	
					9. Kit Ophthalmologi Komunitas	248	
					10. Kuesioner PUMA	100	
					11. Alat Pelayanan KB	0	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	248	
					13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	248	
					14. Tenaga medis : Dokter	1.248	
					15. Tenaga kesehatan : Bidan	3.245	
					16. Tenaga kesehatan : Perawat	4.993	
					17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	449	
					18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	449	
					19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	14.380	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	389488 (100%)		1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	248	
					2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	248	
					3. Alat pemeriksaan kolesterol	248	
					4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	248	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/Activity Daily Living (ADL Barthel)	248	
					6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	248	
					7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	248	
					8. Tenaga medis : Dokter	1.248	
					9. Tenaga kesehatan : Bidan	3.245	
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	4.993	
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	449	
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	449	
					13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	14.380	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayan kesehatan	163869 (90.10%)		1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	248	
					2. Obat Hipertensi	248	
					3. Tensimeter	248	
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi	248	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sehat Indonesiaku (ASIK)		
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	248	
					6. Tenaga medis : Dokter	1248	
					7. Tenaga kesehatan : Bidan	3.245	
					8. Tenaga kesehatan : Perawat	4.993	
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	449	
					10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	449	
					11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	387	
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	14.380	
9.	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah warga negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan pelayanan kesehatan	38947 (94.74%)		1. Obat Diabetes Melitus	100	
					2. Fotometer atau Glukometer	248	
					3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	100	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	248	
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	248	
					6. Tenaga medis : Dokter	1.248	
					7. Tenaga kesehatan : Bidan	3.245	
					8. Tenaga kesehatan : Perawat	4.993	
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	387	
					10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	449	
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	449	
					12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	135	
10.	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4947 (70.04%)		1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	50	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Penyediaan Psikofarmaka	50	
					3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	50	
					4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	50	
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	50	
					6. Tenaga kesehatan : Dokter	50	
					7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	50	
					8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	50	
					9. Tenaga profesional lainnya	1	
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	31459 (100%)		1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	248	
					2. Reagen Zn TB	291	
					3. Masker bedah dan Masker N95	49.462	
					4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu	248	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering		
					5. Katrid tes cepat molekuler	9.125	
					6. Formulir pencatatan dan pelaporan	248	
					7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	50	
					8. Tuberkulin	248	
					9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	6	
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	135	
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	387	
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	449	
					13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	135	
					14. Tenaga kesehatan : Radiografer	100	
					15. Kader Kesehatan	14.380	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang	44037 (94.42%)		1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	248	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Targe t	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	Immunodeficiency Virus)	mendapatkan pelayanan kesehatan					
					2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	9.283	
					3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	50	
					4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	50	
					5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	36	
					6. Tenaga kesehatan : Bidan	3.245	
					7. Tenaga kesehatan : Perawat	4.993	
					8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	135	
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	449	
					10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai	50	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2025

4.2.3 Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

a. Realisasi Anggaran

Adapun Realisasi Anggaran pada bidang Kesehatan Kabupaten Jember tahun 2024 dapat dilihat sebagai tabel berikut

Tabel 4.2.2
Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.421.194.600,00	7.172.417.500,00	96,65%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	71.820.000,00	45.000.000,00	62,66%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	
4	Pelayanan kesehatan balita	-	-	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	762.300.000,00	762.300.000,00	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	116.686.000,00	114.995.800,00	98,55%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	-	-	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	-	-	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	1.598.900.000,00	1.517.200.000,00	94,89%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	8.000.000,00	8.000.000,00	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	570.200.000,00	524.600.000,00	92%
112	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	452.000.000,00	320.700.000,00	70,95%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2025

b. Realisasi Pelayanan

Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Jember mendapat indikator TUNTAS MADYA dan telah memenuhi standar mutu layanan sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 4.2.3
Realisasi Pelayanan Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM	Indikator Pencapaian/Output				Total Pencapaian
1	2	3				4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA				86,89%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					67,05%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			80%		47,23%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	4061	23994	16647	59,04%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19,82%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					99,11%
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	40.819	38.122	2697	100%
	2. Tablet tambah darah	Tablet	122.457	12.057	10400	100%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Tes Kehamilan	Orang	9.102	9.102	0	98,86%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	9.102	9.102	0	99,96%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	9.102	9.102	0	95,14%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	900	900	0	100%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	9.102	9.102	0	100%
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	9.102	9.102	0	100%
	9. Buku kesehatan/rekam medis ibu	Buku	9.102	9.102	0	100%
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9.102	9.102	0	100%
	11. Gel USG	Botol	15	15	0	100%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	12. Tenaga medis : Dokter/	Orang	98	98	0	100%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	4.993	4.993	0	100%
	14. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	3.245	3.245	0	100%
	15. Tenaga kesehatan : Kefarmasian	Orang	387	387	0	100%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	449	449	0	100%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	511	511	0	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					77,18%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	58,69%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	40.461	29.815	10.826	92,46%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	18,49%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					92,43%
	1. Formulir partograf	Formulir	40.641	31.411	9230	77,29%
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	40.641	31.411	9230	77,29%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	40.641	31.411	9230	77.29%
	4. Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	Paket	248	248	0	100%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	5. Tenaga Medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	98	98	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	3.245	3.245	0	100%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	4.993	4.993	0	100%
	8. Tenaga Kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	387	387	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	449	449	0	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					79,08%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	58,69%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	38.611	29.273	9338	75,82%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	18,43%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					92,15%
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	38.611	31.543	7068	81,69%
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	38.611	31.543	7068	81,69%
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	38.611	31.543	7068	81,69%
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	38.611	31.543	7068	81,69%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	38.611	31.543	7068	81,69%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	38.611	31.543	7068	81,69%
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	248	248	0	100%
	8. Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis	Orang	84	84	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	3.245	3.245	0	100%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	4.993	4.993	0	100%
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	387	387	0	100%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	449	449	0	100%
	13. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	449	449	0	100%
	14. Kader Kesehatan	Orang	14.380	14.380	0	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita					83,41%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	64,66%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	142.887	115.483	27404	80,82%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	18,75%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					98,34%
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen	Dokumen	42.632	31.543	11089	73,99%

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	standar lain yang berlaku					
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	42.632	31.543	11089	73,99%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	30.418	31.543	-1125	100%
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	38.703	31.543	7160	81,50%
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	38.703	31.543	7160	81,50%
	6. Vaksin imunisasi dasar : BCG	Vaksin	8.274	7.721	553	93,32%
	7. Vaksin imunisasi dasar : Polio Tetes	Vaksin	8.277	7.721	556	93,28%
	8. Vaksin imunisasi dasar : IPV	Vaksin	8.277	7.721	556	93,28%
	9. Vaksin imunisasi dasar : DPT-HB-Hib	Vaksin	8.277	7.721	556	93,28%
	10. Vaksin imunisasi dasar : Campak – Rubella	Vaksin	8.277	7.721	556	93,28%
	11. Vaksin imunisasi dasar : DPT-HB-Hib	Vaksin	8.419	7.721	698	91,71%
	12. Vaksin imunisasi dasar : Campak – Rubella	Vaksin	100	100	0	100%
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	100	100	0	100%
	14. Peralatan Anafilatik	Paket	100	100	0	100%
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	100	100	0	100%
	16. Tenaga Medis : Dokter	Orang	84	84	0	100%
	17. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	3.245	3.245	0	100%
	18. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	4.993	4.993	0	100%
	19. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	449	449	0	100%
	20. Guru Paud	Orang	0	0	0	100%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					89,24%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	69,61%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	313.727	272.968	40759	87,01%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19,63%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					98,15%
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	2.926	2.601	325	88,89%
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	2.926	2.601	325	88,89%
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	2.926	2.601	325	88,89%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	248	248	0	100%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	248	248	0	100%
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan	Tablet	248	248	0	100%

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	usia 12-17 tahun diluar sekolah					
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Alat	248	248	0	100%
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7		248	248	0	100%
	9. Media promosi kesehatan	Paket	248	248	0	100%
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	50	50	0	100%
	11. Tenaga Medis : Dokter	Orang	349	349	0	100%
	12. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	3.245	3.245	0	100%
	13. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	4.993	4.993	0	100%
	14. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	449	449	0	100%
	15. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	50	50	0	100%
	16. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100%
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	0	0	0	100%
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	14.380	14.380	0	100%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					88,70%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	69,75%
			Jumlah Total Yang	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
			Harus Dilayani			
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	313.727	272.968	40759	87,19%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	18,95%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					94,74%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	248	248	0	100%
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	248	248	0	100%
	3. Alat : Tensimeter	Unit	248	248	0	100%
	4. Alat : Glukometer	Unit	248	248	0	100%
	5. Alat : Lat Pemeriksa HB	Unit	248	248	0	100%
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, kapas alkohol	Unit	248	248	0	100%
	7. Alat : KIT IVA tes	Unit	248	248	0	100%
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	100	100	0	100%
	9. Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	248	248	0	100%
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	100	100	0	100%
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	0	0	0	0%
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	0	0	0	0%
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan	Unit	0	0	0	0%
	c. Vasectomi Set	Unit	0	0	0	0%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen				
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	248	248	0	100%
	14. Tenaga Medis : Dokter	Orang	1.248	1.248	0	100%
	15. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	3.245	3.245	0	100%
	16. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	4.993	4.993	0	100%
	17. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	449	449	0	100%
	18. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100%
	19. Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	14.380	14.380	0	100%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	389.488	463.857	-74369	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					100%

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	248	248	0	100%
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	248	248	0	100%
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	248	248	0	100%
	4. Bahan medis habis pakai : strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	248	248	0	100%
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	248	248	0	100%
	6. Buku Kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	248	248	0	100%
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE)	Paket	248	248	0	100%
	8. Tenaga medis : Dokter	Orang	1.248	1.248	0	100%
	9. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	3.245	3.245	0	100%
	10. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	4.993	4.993	0	100%
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	449	449	0	100%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100%
	13. Kader kesehatan terlatih dan	Orang	14.380	14.380	0	100%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	mempunyai kualifikasi tertentu					
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					92,08%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	72,08%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	163.869	147.654	16215	90,10%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					100%
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edekasi (KIE)	Paket	248	248	0	100%
	2. Obat hipertensi	Paket	248	248	0	100%
	3. Tensimeter	Unit	248	248	0	100%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	248	248	0	100%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	248	248	0	100%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	1248	1.248	0	100%
	7. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	3.245	3.245	0	100%
	8. Tenga Kesehatan : Perawat	Orang	4.993	4.993	0	100%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	449	449	0	100%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan ilmu perilaku	Orang	449	449	0	100%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	387	387	0	100%
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	14.380	14.380	0	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes					92,08%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	72,08%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	38.947	36.900	2047	90,10%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	18,66%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					93,32%
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	100	100	0	100%
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	248	248	0	100%
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukos atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	100	100	0	100%
	4. Formulir pencatatan dan	Formulir	248	248	0	100%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	pelaporan SI PTM (sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), Simpus (sistem Informasi Manajemen Puskesmas)					
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	248	248	0	100%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	1.248	248	1000	19,87%
	7. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	3.245	3.245	0	100%
	8. Tenga Kesehatan : Perawat	Orang	4.993	4.993	0	100%
	9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	387	387	0	100%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan ilmu perilaku	Orang	449	449	0	100%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	449	449	0	100%
	12. Tenaga Kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	135	135	0	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)					76,03%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	56,03%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	4.947	3.465	1482	70,04%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah Mutu	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang belum Terlayani/Terpenuhi	



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
			Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Terlayani/ Dipenuhi		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					100%
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	50	50	0	100%
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	50	50	0	100%
	3. Penyediaan formulir skrinning kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	50	50	0	100%
	4. Penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	50	50	0	100%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	50	50	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	50	50	0	100%
	7. Tenaga Kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	50	50	0	100%
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	50	50	0	100%
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	31.459	32.081	-622	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					100%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	248	248	0	100%
	2. Reagen Zn TB	Kit	291	291	0	100%
	3. Masker bedah dan Masker N95	paket	49.462	49.462	0	100%
	4. Pot dahak, kaca Slide, Bahan Habis Pakai (oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi) Rak pengering	Paket	248	248	0	100%
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	9125	9.125	0	100%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	248	248	0	100%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	50	50	0	100%
	8. Tuberkuilin	Vial	248	248	0	100%
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	6	6	0	100%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	10. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	135	135	0	100%
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	387	387	0	100%
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	449	449	0	100%
	13. Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	135	135	0	100%
	14. Tenaga Kesehatan : Radiografer	Orang	100	100	0	100%
	15. Kader Kesehatan	Orang	14.380	14.380	0	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					95,47%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	75,53%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	44.037	4.1578	2459	94,42%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19,94%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/ Dipenuhi					99,69%
	1. Media promosi Komunikasi dan Edukasi (KIE)	Paket	248	248	0	100%

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	9.283	8.994	289	96,89%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	50	50	0	100%
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	50	50	0	100%
	5. Tenaga Medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	36	3.650	0	100%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	3.245	3.245	0	100%
	7. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	4.993	4.993	0	100%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	135	135	0	100%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	449	449	0	100%
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan	Orang	50	50	0	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2025



4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah baik yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber Dana Lain Yang Sah.

Adapun alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.2.4
Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Alokasi Anggaran		
		APBD	APBN	Lain ²
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7.421.194.600	-	-
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	71.820.000	-	-
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0	-	-
4	Pelayanan Kesehatan Balita	0	-	-
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	762.300.000	-	-
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	116.686.000	-	-
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	0	-	-
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	-	-
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.598.900.000	-	-
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	8.000.000	-	-
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	570.200.000	-	-
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	452.000.000	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2025



4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil merupakan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan Personil dalam pelaksanaan SPM bidang Kesehatan sesuai jenis tenaga kesehatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.5
Dukungan Personil pada bidang Kesehatan
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Dokter Spesialis Kandungan = 98 orang 2. Bidan = 3245 orang 3. Perawat = 4993 orang 4. Kefarmasian = 387 orang 5. Gizi = 449 orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Dokter Spesialis Kandungan = 98 orang 2. Bidan = 3245 orang 3. Perawat = 4993 orang 4. Kefarmasian = 387 orang 5. Gizi = 449 orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1. Dokter Spesialis Anak = 84 orang 2. Bidan = 3245 orang 3. Perawat = 4993 orang 4. Kefarmasian = 387 orang 5. Gizi = 449 orang 6. Promkes = 449 orang
4	Pelayanan kesehatan balita	1. Dokter Spesialis Anak = 84 orang 2. Bidan = 3245 orang 3. Perawat = 4993 orang 4. Kefarmasian = 387 orang 5. Gizi = 449 orang
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1. Dokter Gigi = 349 orang 2. Bidan = 3245 orang 3. Perawat = 4993 orang 4. Kefarmasian : 387 orang 5. Gizi = 449 orang 6. Kesmas = 449 orang
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1. Dokter = 1248 orang 2. Bidan = 3245 orang 3. Perawat = 4993 orang 4. Gizi = 449 orang 5. Kesmas = 449 orang
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1. Dokter = 1248 orang 2. Bidan = 3245 orang 3. Perawat = 4993 orang 4. Gizi = 449 orang 5. Kesmas = 449 orang

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	1. Dokter = 1248 orang 2. Bidan = 3245 orang 3. Perawat = 4993 orang 4. Gizi = 449 orang 5. Kesmas = 449 orang
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	1. Dokter = 1248 orang 2. Bidan = 3245 orang 3. Perawat = 4993 orang 4. Ahli Gizi = 449 orang
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	1. Dokter = 1248 orang 2. Perawat terlatih jiwa = 50 orang
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	1. Dokter Spesialis Paru = 6 orang 2. Perawat = 4993 orang 3. Ahli Teknik Lab Medik = 135 orang 4. Penata Rontgen = 100 orang 5. Kesehatan Masyarakat = 449 orang 6. Kader Kesehatan = 14.380 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	2. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin = 36 orang 3. Perawat = 4993 orang 4. Bidan = 3245 orang 5. Ahli Teknik Lab Medik = 135 orang 6. Kesehatan Masyarakat = 449 orang 7. Kader Kesehatan = 14.380 orang

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2025

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penerapan SPM bidang Kesehatan tahun 2024 dan aksi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mulai dari tahapan Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, Perencanaan Penganggaran sampai dengan Pelaksanaan berdasarkan jenis layanannya antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2.6
Permasalahan dan Solusi
Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Skrining ibu hamil kurang optimal 2. Banyaknya kasus kehamilan tidak di inginkan 3. Masih adanya kasus persalinan kebrojolan dirumah dan di dukun	1. Pendampingan Puskesmas dan FKTP dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, dan sistem rujukan maternal dan neonatal. 2. Update ilmu pelayanan ANC, persalinan, dan nifas pada bidan.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
4	Pelayanan kesehatan balita	4. Petugas kurang patuh SOP / ANC tidak berkualitas 5. Sasaran supas lebih tinggi dari sasaran riil	3. Praktek kalakarya MTBS ditingkat puskesmas dan OJT ke RS untuk pemantauan tumbuh kembang balita 4. Untuk sasaran supas sudah dilakukan koordinasi dengan bidang terkait
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pelaksanaan penjarangan kesekolah ada beberapa siswa yang tidak masuk dikarenakan sakit ataupun ijin, dan beberapa sekolah madrasah menolak dilakukan skrining kesehatan	Melakukan kunjungan ulang bagi siswa yang belum dilakukan skrining kesehatan, pendekatan pada guru/sekolah yang tidak mau dilakukan skrining kesehatan bawasannya pentingnya skring kesehatan pada usia pendidikan dasar untuk mendeteksi penyakit kesehatan pada siswa
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1. Rendahnya capaian skrining usia produktif disebabkan pemeriksaan yang meliputi TB, BB, lingkar perut, tekanan darah, dan gula darah belum semuanya lengkap dilakukan pada setiap peserta skrining. 2. Pencatatan dan pelaporan di ASIK belum maksimal karena kendala keterbatasan tenaga entry 3. Pandu PTM belum aktif dilakukan setiap hari di semua FKTP 4. Integrasikan dengan program lainnya seperti UKS, GERMAS, posyandu balita, lansia, Kespro dan deteksi dini faktor risiko PTM lainnya belum maksimal. 5. Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin 6. Adanya petugas PTM yang resign, mutasi maupun rolling berpengaruh terhadap layanan dan pelaporan program PTM	1. Pembentukan tim di Puskesmas untuk melakukan pelayanan PTM dan entry data baik kegiatan didalam gedung maupun diluar gedung 2. Melakukan monitoring validasi data setiap 3 bulan sekali 3. Memberikan himbauan kepada seluruh Puskesmas untuk melakukan Pandu PTM bersama dengan pelayanan BP di Puskesmas serta membuat SK Pandu PTM 4. Meningkatkan integrasi yang komprehensif antar program di puskesmas maupun dengan lintas sektor dalam hal pencegahan PTM dan deteksi dini Faktor Risiko PTM 5. Sosialisasi yang optimal kepada para pemangku kepentingan lintas sektor untuk mendukung upaya perubahan perilaku masyarakat 6. Melakukan OJT Program khusus bagi Petugas baru

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
			dan Puskesmas dengan capaian yang rendah.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	-	-
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1. Rendahnya penemuan kasus Hipertensi di wilayah 2. Ketersediaan obat-obatan untuk pelayanan penderita Hipertensi terbatas 3. Pencatatan dan pelaporan di ASIK belum maksimal karena kendala keterbatasan tenaga entry 4. Pandu PTM belum aktif dilakukan setiap hari di semua FKTP 5. Integrasikan dengan program lainnya seperti UKS, GERMAS, posyandu balita, lansia, Kespro dan deteksi dini faktor risiko PTM lainnya belum maksimal. 6. Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin karena merasa sehat dan beraktifitas normal meskipun mempunyai hasil pemeriksaan yang berisiko tinggi 7. Adanya petugas PTM yang resign, mutasi maupun rolling berpengaruh terhadap layanan dan pelaporan program PTM	1. Peningkatan cakupan layanan skrining di seluruh wilayah Puskesmas, dengan memeriksa masyarakat baik yang sehat maupun yang bergejala/ berisiko 2. Memprioritaskan pemenuhan obat-obatan sesuai dengan sasaran penderita Hipertensi 3. Pembentukan tim di Puskesmas untuk melakukan pelayanan PTM dan entry data baik kegiatan didalam gedung maupun diluar gedung 4. Memberikan himbauan kepada seluruh Puskesmas untuk melakukan Pandu PTM bersama dengan pelayanan BP di Puskesmas serta membuat SK Pandu PTM 5. Meningkatkan integrasi yang komprehensif antar program di puskesmas maupun dengan lintas sektor dalam hal pencegahan PTM dan deteksi dini Faktor Risiko PTM 6. Sosialisasi yang optimal kepada para pemangku kepentingan lintas sektor untuk mendukung upaya perubahan perilaku masyarakat 7. Melakukan Bimtek Program khususnya bagi Puskesmas dengan PJ yang baru maupun Puskesmas dengan capaian yang rendah.
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	1. Pencatatan dan pelaporan di ASIK belum maksimal karena kendala keterbatasan tenaga entry 2. Adanya petugas PTM yang resign, mutasi maupun rolling berpengaruh terhadap	1. Pembentukan tim di Puskesmas untuk melakukan pelayanan PTM dan entry data baik kegiatan didalam gedung maupun diluar gedung 2. Melakukan Bimtek Program khususnya bagi Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
		layanan dan pelaporan program PTM	dengan PJ yang baru maupun Puskesmas dengan capaian yang rendah.
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1. SDM Kesehatan Jiwa (double burden) 2. Rendahnya capaian penemuan kasus jiwa 3. Kurang adanya pengawasan pasien dalam kepatuhan minum obat 4. Stigma & Diskriminasi dari Masyarakat, keengganan masyarakat membawa Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mencari pengobatan medik, (malu bila ada keluarganya mengalami gangguan jiwa) 5. Ketersediaan obat terbatas (Kecukupan Obat 54%) 6. Masih rendahnya angka skrining Kesehatan Jiwa (Tercapai 66%) 7. Akses dan mutu layanan dan terbatasnya fasilitas pelayanan Keswa, menyebabkan masyarakat sulit dalam mengakses pelayanan Keswa. Selain itu, mutu pelayanan Keswa di fasilitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. 8. Sistem pelaporan yang belum Optimal 9. Koordinasi dan Kerjasama lintas program maupun lintas sektoral belum optimal	1. Membuat perencanaan obat jiwa dan melakukan pengadaan obat keswa sesuai dengan kebutuhan Puskesmas di wilayah Kab Jember 2. Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat serta peran kader dalam Upaya pelayanan Kesehatan jiwa berbasis Masyarakat, seperti kunjungan rumah, pelaporan kasus jiwa, rujukan kasus pasien jiwa serta pencatatan dan pelaporan perkembangan pasien. 3. Meningkatkan temuan kasus Kesehatan jiwa dengan melakukan Upaya skrining di tempat risiko masalah kesehatan jiwa (Sekolah, Tempat Kerja) menggunakan questioner SRQ 20 dan Qusioner MINI. 4. Melakukan Sosialisasi, Pengembangan dan Penguatan pada Programmer keswa terkait pelaporan dengan optimalisasi system informasi dan pelaporan kohort pasien ODGJ. 5. Pengembangan Peta Jalan (ROAD MAP) program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada program Keswa. 6. Peningkatan jejaring kemitraan masalah Keswa dan NAPZA dengan lintas program dan lintas sektor; 8. Peningkatan peran serta komunitas, masyarakat, mitra dan multisektor lainnya dalam pencegahan masalah Keswa.
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	-	

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1. Belum semua populasi kunci bersedia dilakukan testing HIV; 2. Belum semua layanan tes siap untuk melakukan mobile VCT populasi kunci; 3. Masih tingginya ODHIV mangkir (LFU); 4. Belum semua faskes swasta menjadi layanan testing HIV; 5. Pergantian Pengelola Program HIV di puskesmas yang terlalu sering sehingga menghambat kegiatan karena transfer informasi tidak berjalan dengan baik karena pengelola program yang baru tidak memahami kegiatan-kegiatan dalam program HIV ; 6. Kurangnya koordinasi faskes dengan LSM Mitra dalam hal penjangkauan populasi kunci dan pendampingan pasien;	1. Skrining masiv HIV melalui kegiatan mobile VCT populasi kunci bersama LSM Mitra; 2. Mengadakan pertemuan koordinasi LSM Mitra secara rutin bersama layanan; 3. Menambah layanan testing dan layanan PDP (tahun 2023 sudah bertambah menjadi 65 layanan testing yang semula 63 faskes, dan 30 layanan PDP yang semula 18 layanan saja); 4. Melakukan bimbingan teknis ke faskes utamanya faskes layanan testing maupun PDP baru.; 5. Melakukan pertemuan validasi data secara berkala bersama LSM Mitra dan layanan untuk memastikan jumlah capaian.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2025

4.3 Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dituangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksanaan SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 secara garis besar tersaji sebagai berikut:

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Jenis pelayanan dasar ini dicapai melalui indikator mutu layanan sebagai berikut:

- Jaringan perpipaan kuantitas Air Minum dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM
- Jaringan perpipaan kualitas Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau
- Bukan jaringan perpipaan kuantitas Air Minum dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM
- Bukan jaringan perpipaan kualitas Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik ditunjang oleh indikator mutu layanan sebagai berikut:

- Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik
- Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T

- Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Mutu oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu 100% setiap tahunnya. Adapun target warga negara yang seharusnya memperoleh pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3.1
Target pencapaian SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang menerima pelayanan dasar	2.736 (100%)					
		Jaringan Perpipaan			1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60	684		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM			
					2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	684		
		Bukan Jaringan Perpipaan			3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	0		
					4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air	0		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau			
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang menerima pelayanan dasar	1.400 (100%)		1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	350		
					2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja	350		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T			
					3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	350		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2025

4.3.3 Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Hasil capaian penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada bidang Pekerjaan Umum dalam SPM Kabupaten Jember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.3.2
Realisasi Anggaran SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	8.880.323.656	7.566.484.586	85,20 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	8.566.928.170	7.808.930.437	91,15 %

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya
Kabupaten Jember, 2025

b. Realisasi Pelayanan

Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 Kabupaten Jember telah mencapai TUNTAS PARIPURNA dan memenuhi standar mutu layanan sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.3.3
Realisasi Pelayanan SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2.736	2.736	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%
	JARINGAN PERPIPAAN					
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	684	684	0	100%
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	684	684	0	100%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai	Rumah Tangga	0	0	0	100%

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM					
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	100%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1.400	1.400	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	350	350	0	100%
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	350	350	0	100%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Jember, 2025

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan



pencapaian SPM oleh OPD baik yang bersumber dari APBD APBN dan Sumber dana lain yang sah.

Adapun Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.3.4
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Alokasi Anggaran		
		APBD	APBN	Lain ²
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.891.679.656	3.652.258.800 (DAK)	-
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	4.914.669.370	1.988.644.000 (DAK)	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya
Kabupaten Jember, 2025

4.3.5 Dukungan Personil

Secara singkat, berikut sejumlah dukungan yang melaksanakan penerapan SPM di lingkungan Kabupaten Jember yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.5
Dukungan Personil pada Bidang Pekerjaan Umum dalam SPM
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	9 Personil
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	20 Personil

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya
Kabupaten Jember, 2025

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Jember tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 4.3.6
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan
SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Semakin terbatasnya sumber mata air baku yang tersedia serta berkurangnya debit air pada sumber mata air	Menerapkan kebijakan konservasi air dan perlindungan daerah resapan air untuk memastikan ketersediaan air di masa depan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Subsidi untuk layanan sanitasi masih tidak merata dan belum menjangkau masyarakat miskin secara efektif	

*Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya
Kabupaten Jember, 2025*

4.4 Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang Perumahan Rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah

Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni.

4.4.2 Target Pencapaian

Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu sebesar 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapatkan pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar yakni:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota

Adapun jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.1
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah/Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	40 (80%)	1 Tahun	-			
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	-		-			

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Jember, 2025



4.4.3 Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

a. Realisasi Anggaran

Adapun Realisasi Anggaran bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jember tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.2
Realisasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000	56.480.000	11,29%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Jember, 2025

b. Realisasi Pelayanan

Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jember Tahun 2024 telah tercapai dengan predikat TUNTAS PARIPURNA dan memenuhi standar mutu layanan sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 telah terealisasi 100% untuk jenis layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.4.3
Realisasi Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	Aksi
1	2	3	4	5	6	7	8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota				-100%	100%	
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						3509
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%		
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	40	0	40		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA /SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100%	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Jember, 2025

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan



pencapaian SPM oleh OPD, baik yang bersumber dari APBD APBN dan Sumber dana lain yang sah.

Adapun Alokasi Anggaran untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Jember Tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4.4
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Alokasi Anggaran		
		APBD	APBN	Lain ²
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000,-	-	-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-

Sumber: Dinas Peruamahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Jember, 2025

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dalam menerapkan standar pelayanan minimal bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Jember pada tahun 2024 didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4.5
Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil
1	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 Orang



No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Jember, 2025

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM baik eksternal maupun internal. Meskipun capaian kinerja SPM dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Jember adalah 100% pada kedua jenis layanan dasar yang menjadi urusannya, namun dalam proses pelaksanaannya ternyata masih terdapat permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan yang ada dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Jember dalam melaksanakan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.6
Permasalahan dan Solusi
Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jember
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tidak adanya SK Penerima Bantuan RTLH bencana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Untuk realisasi anggaran terserap hanya pada kegiatan pendataan rumah di kawasan rawan banjir	Akan di ditetapkan SK peneriman bantuan RTLH bencana padata tahun berikutnya
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Di Kabupaten jember tidak ada Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Jember, 2025



4.5 Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelaksanaan SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) dibagi menjadi 3 (tiga) sub urusan yaitu: Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bencana, dan Kebakaran.

Adapun sebagai pedoman teknis SPM bidang Trantibum Linmas berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota serta Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mempedomani ketentuan tersebut jenis layanan urusan Trantibum Linmas meliputi:

- Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada;
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuai Korban Bencana dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga negara

yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

- Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan indikator pencapaian yakni jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian

Target pencapaian SPM Bidang Trantibum Linmas yaitu sebesar 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapat pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar, yakni:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, dan
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Target pencapaian penerapan SPM bidang trantibum linmas tahun 2024 termasuk perhitungan pembiayaannya tertuang dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD maupun RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5.1
Target Pencapaian Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	30 (100%)		Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	15		
					Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam	7		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					rangka penegakan perda dan perkada			
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	110		
					Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	0		
					Warga negara yang memperoleh	0		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pelayanan kerugian materil			
					Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	0		
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.915.122 (100%)		Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1		
					Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0		
					Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	1.000		
					Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	56		
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.202.465 (100%)		Sarana prasarana penanggulangan bencana	40		
					Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	40		
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	40 (100%)		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	40		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(KEBENCANAAN)	dan evakuasi korban bencana						
					Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	40		
					Melakukan respon cepat darurat bencana	40		
					Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	0		
					Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	40		
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	30 (100%)		Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	35		
					Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1		
					Sarana prasarana pemadam kebakaran	385		
					Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	69		
					Pelayanan pemadaman,	6		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran			
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	5		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, 2025

4.5.3 Realisasi

Hasil capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2024 merupakan realisasi dari target yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

a. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 4.5.2
Realisasi Anggaran Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	4.491.624.550	1.284.198.635	28,59%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	261.300.000	247.600.000	95%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.122.099.004	884.807.214	79%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuai korban bencana	384.450.000	263.533.500	69%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	456.045.800	448.032.124	98,24%

b. Realisasi Pelayanan

Hasil Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat tercapai TUNTAS UTAMA dan dalam Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.5.3
Realisasi Pelayanan Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output/			Total Pencapaian
1	2		3			4
KATEGORI PENCAPAIAN TRAMTIBUNLIMAS						
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			96,67%
1.	Pelayanan Ketentraman dsn Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					96.67%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	80%
	A.		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	30	75	-45	100%
	PERSETASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	16.67%
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/SDM		Jumlah Mutu	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang belum Terlayani/Terpenuhi	83.33%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output/			Total Pencapaian
1	2		3			4
	yang harus Dilayani/Dipenuhi		Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Terlayani/ Dipenuhi		
	1. Standar sarana dan prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda perkara	Unit	15	15	0	100.00%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara	Dokumen	7	7	0	100.00%
	3 Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan Satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	110	110	0	100.00%
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mebidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) pelayanan dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	-	-	-	-
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	-	-	-	-



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output/			Total Pencapaian
1	2		3			4
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	-	-	-	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM BENCANA						
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					95%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1.915.122	1.915.122	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	15%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/Terpenuhi	
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1	1	0	100%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	0	0	0	
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	1000	1000	0	100%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	56	56	0	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan					100%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output/			Total Pencapaian
1	2		3			4
	Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1.202.465	1.202.465	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					100%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	unit	40	40	0	100%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	40	40	0	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					80%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	78.23%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	40	40	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	16%
			Jumlah Mutu	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi/	



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output/			Total Pencapaian
1	2		3			4
			Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Terlayani/ Dipenuhi		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					80%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	40	40	0	100%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	40	40	0	100%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	40	40	0	100%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	layanan	0	0	0	0%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	40	40	0	100%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran (DAMKAR)					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	30	162	-132	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/Terpenuhi	

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output/			Total Pencapaian
1	2		3			4
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100%
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	35	97	-62	100%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	1	1	0	100%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	385	385	0	
	4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	69	75	-6	100%
	5. Pelayanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	6	6	0	100%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	5	5	0	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, 2025

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM baik yang bersumber dari APBD, APBN, dan Sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran bidang trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.5.4
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Alokasi Anggaran		
		APBD	APBN	Lain ²
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	6.376.247.350	-	6.840.272.700 (Dana Bagi Hasil)
2	Pelayanan informasi rawan bencana	261.300.000	-	-
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.122.099.004	-	-
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuai korban bencana	384.450.000	-	-
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	512.601.800	-	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, 2025

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang mendukung proses penerapan dan pencapaian SPM bidang trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5.5
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	1 regu terdiri dari 7 personil
2	Pelayanan informasi rawan bencana	40 Personil
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	40 Personil
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuai korban bencana	40 Personil
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 armada terdiri dari 6-8 personil

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, 2025

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Perangkat Daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, baik permasalahan eksternal maupun internal, beserta solusinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.6
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM
Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal 2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) 3. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat) - Anggaran tidak teralokasikan pada mutu layanan tersebut	Akan dialokasikan anggaran di tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
		- Belum ada korban terkena dampak dari penegakan perda	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	-	-
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1. Terbatasnya armada/mobil damkar, sarana prasarana, sistem proteksi pemadam kebakaran di Kabupaten Jember 2. Terbatasnya posko pemadam kebakaran dan penyelamatan di wilayah Kab. Jember agar tercapainya respontime <15 menit. 3. Belum terbentuknya REDKAR (Relawan Pemadam Kebaran) di Kel./Desa agar penanganan kebakaran lebih segera teratasi.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, 2025

4.6 Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang telah ditetapkan SPM oleh Pemerintah. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah dan di Daerah Kabupaten/Kota ditentukan bahwa penerima pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:



- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti dengan indikator pencapaian yakni persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
- Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti dengan indikator pencapaian yakni persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti dengan indikator pencapaian yakni persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti dengan indikator pencapaian yakni persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
- Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator pencapaian yakni persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Mutu oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan sosial Kabupaten Jember pada tahun 2024 termasuk perhitungan pembiayaannya tertuang dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD maupun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.6.1
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Jember
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Jumlah warga negara yang memperoleh	797 (100%)		Layanan data dan pengaduan	257		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlantar di Luar Panti Sosial	layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada						
					Penyediaan permakanaan	500		
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	150		
					Penyediaan sandang	25		
					Penyediaan alat bantu	5		
					Penyediaan perbekalan kesehatan	8		
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	7		
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	7		
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	3		
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8		
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	6		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6		
					Layanan rujukan	4		
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1000 (99.40%)		Layanan data dan pengaduan	500		
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	122		
					Penyediaan permakanan	200		
					Penyediaan sandang	150		
					Penyediaan perbekalan kesehatan	5		
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5		
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	4		
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar penyelamatan/Sumber Daya Manusia	4		
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti	3		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					keberadaan keluarga			
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3		
					Layanan rujukan	4		
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	18714 (97.78%)		Layanan data dan pengaduan	17.145		
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	180		
					Penyediaan permakanan	200		
					Penyediaan sandang	1000		
					Penyediaan alat bantu	159		
					Penyediaan perbekalan kesehatan	8		
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	35		
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	35		
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/B	7		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ukti kepemilikan NIK			
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	35		
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	7		
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	14		
					Layanan rujukan	8		
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	69 (100%)		Layanan data dan pengaduan	18		
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	17		
					Penyediaan permakanan	69		
					Penyediaan sandang	69		
					Penyediaan perbekalan kesehatan	69		
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	69		
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga	69		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					gelandangan dan pengemis			
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	11		
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	69		
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	23		
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	56		
					Layanan rujukan	44		
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/ Kota	2000 (76%)		Penyediaan permakanaan	2000		
					Penyediaan sandang	1000		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan tempat penampungan pengungsi	5		
					Penanganan khusus bagi kelompok rentan	614		
					Pelayanan dukungan Psikososial	83		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2025

4.6.3 Realisasi

Hasil capaian penerapan SPM bidang Sosial merupakan realisasi dari target yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagai pengampu urusan selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

a. Realisasi Anggaran

Adapun Realisasi Anggaran pada bidang Sosial Kabupaten Jember tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6.2
Realisasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	422.880.000	365.791.200	86.50
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar Panti	336.900.000	276.285.000	82.35
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	142.080.000	122.849.200	86.50
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	1.208.573.000	1.110.601.070	91.89



No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	2.825.318.000	2.769.282.500	98.02

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2025

b. Realisasi Pelayanan

Realisasi Pelayanan SPM Bidang Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024 telah tercapai dengan TUNTAS UTAMA dan memenuhi standar mutu layanan sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Jember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6.3
Realisasi Pelayanan Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			95.49%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		(80%)			80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	797	797	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
			Dilayani/ Dipenuhi			
	1. Layanan data pengaduan bagi Disabilitas	Orang	257	257	0	100%
	2. Penyediaan permakanan	Orang	500	500	0	100%
	3. Penyediaan layanan kedarurat/layanan reaksi cepat	Orang	150	150	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	3	3	0	100%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	144	144	0	100%
	6. Penyediaan Perbekalan kesehatan	Orang	3	3	0	100%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	3	3	0	100%
	8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	3	3	0	100%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	0	100%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4	4	0	100%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	3	3	0	100%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100
	13. Layanan rujukan	Orang	3	3	0	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					99.44%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	79.52%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1000	994	6	99.40%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.92%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/SDM yang harus Dilayani/ Dipenuhi					99.60%
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	500	476	24	95.20%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	150	150	0	100%
	3. Penyediaan permakanaan	Orang	200	200	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	150	150	0	100%
	5. Penyediaan Perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0	100%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	5	5	0	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	4	4	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	4	4	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4	4	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran	Orang	3	3	0	100%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	keluarga/Bukti keberadaan keluarga					
	11.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100%
	12. Layanan rujukan	Orang	4	4	0	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					97.97%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	78.23%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	18.714	18.299	415	99.40%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.92%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					98.72%
	1. Layanan data pengaduan bagi Disabilitas	Orang	17.145	17.145	0	100%
	2. Penyediaan permakanan	Orang	180	150	30	83.33%
	3. Penyediaan layanan kedarurat/layanan reaksi cepat	Orang	200	200	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	1000	1000	0	100%
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	159	159	0	100%
	6. Penyediaan Perbekalan kesehatan	Orang	8	8	0	100%

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	35	35	0	100%
	8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	35	35	0	100%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	35	35	0	100%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	7	7	0	100%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	14	14	0	100%
	13. Layanan rujukan	Orang	5	5	0	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	78.23%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	69	69	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20%
			Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	

No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
			Dilayani/ Dipenuhi			
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang harus Dilayani/Dipenuhi					100%
	1. Layanan data pengaduan	Orang	18	18		100%
	2. Penyediaan layanan kedarurat/layanan reaksi cepat	Orang	17	17		100%
	3. Penyediaan permakanan	Orang	69	69	0	100%
	4. Penyediaan sandang	Orang	69	69	0	100%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	69	69	0	100%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	69	69	0	100%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	69	69	0	100%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	Orang	11	11	0	100%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	69	69	0	100%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaab keluarga	Orang	23	23	0	100%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	56	56	0	100%
	12. Layanan rujukan	Orang	44	44	0	100%



No	Indikator Kinerja/jenis layanan SPM		Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
1	2		3			4
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100%
	PERSETASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	67.40%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2.000	1.685	3.150	84.25%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.37%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Dipenuhi	Mutu Yang belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/SDM yang harus Dilayani/ Dipenuhi					96.85%
	1. Penyediaan Permakanan	Orang	2.000	1.685	315	84.25%
	2. Penyediaan sandang	Orang	1.000	1.000	0	100%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	5	5	0	100%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	614	614	0	100%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	83	83	0	100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2025

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan



pencapaian SPM oleh OPD, yang bersumber baik dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran yang menunjang pencapaian SPM urusan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.4
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten
Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Alokasi Anggaran		
		APBD	APBN	Lain ²
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	422.880.000	-	-
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar Panti	336.900.000	-	-
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	142.080.000	-	-
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	1.208.573.000	-	-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska bencana Bagi Korban bencana Kabupaten/Kota	2.825.318.000	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2025

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan sosial terinci sebagai berikut:

Tabel 4.6.5
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten
Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	12 personil
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	12 personil
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	12 personil
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	12 personil



No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7 personil bidang Bencana dan 87 anggota TAGANA

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2025

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dan tantangan dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Sosial, baik internal maupun permasalahan eksternal beserta solusinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.6.6
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
1.	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	1. Anggaran pelayanan dan bantuan pada disabilitas kurang mencukupi, sehingga bantuan yang diberikan belum maksimal 2. Keakuratan data disabilitas calon penerima bantuan	1. Pengajuan penambahan anggaran, menyiapkan alternative sumber anggaran Non APBD dengan penunjang penanganan disabilitas melalui APBD II dan APBN serta CSR 2. Assesmen data calon penerima bantuan oleh petugas/pendamping disabilitas
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	1. Anggaran pelayanan dan bantuan pada anak terlantar di luar panti kurang mencukupi, sehingga bantuan yang diberikan belum maksimal 2. Keakuratan data calon penerima bantuan	1. Pengajuan penambahan anggaran, menyiapkan alternative sumber anggaran Non APBD dengan pengajuan dana penunjang penanganan disabilitas melalui APBD II dan APBN serta dana CSR 2. Assesmen data calon penerima bantuan oleh petugas/pendamping anak terlantar
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	1. Anggaran pelayanan dan bantuan pada lanjut usia terlantar kurang mencukupi, sehingga bantuan yang diberikan belum maksimal 2. Keakuratan data calon penerima bantuan	1. Pengajuan penambahan anggaran, menyiapkan alternative sumber anggaran Non APBD dengan pengajuan dana penunjang penanganan disabilitas melalui APBD II dan APBN serta Dana CSR 2. Assesmen data Calon penerima bantuan oleh petugas/pendamping lanjut usia terlantar

No	Jenis Pelayanan	Permasalahan	Solusi
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Anggaran pelayanan dan bantuan pada gelandangan pengemis yang ditampung kurang mencukupi, sehingga sarana prasarana kurang memadai dan pemberian bantuan dan pelayanan yang diberikan belum maksimal	Pengajuan penambahan anggaran, menyiapkan alternative sumber anggaran Non APBD dengan pengajuan dana penunjang penanganan disabilitas melalui APBD II dan APBN serta Dana CSR
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban	Perlunya ditingkatkan SDM personil dalam melaksanakan pelayanan dan bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana pada masyarakat korban/ terdampak bencana alam dan sosial	Bimbingan Teknis/Pelatihan keterampilan personil guna peningkatan SDM

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2025

4.7 Program Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di 6 (enam) bidang Urusan Pemerintahan di Kabupaten Jember pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 4.7.1
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 4. Pengadaan Mebel PAUD 5. Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD 6. Pengadaan Perlengkapan PAUD 7. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 9. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 10. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 11. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 13. Pengelolaan Dana BOP PAUD 14. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 15. Pemeliharaan Mebel Sekolah 16. Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 17. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 18. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 19. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 20. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 21. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 22. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 23. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 24. Pembangunan Ruang Kelas Baru 25. Penyediaan infrastruktur TIK 26. Penataan Ruang/Sudut Baca 27. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 28. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				29. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 30. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 31. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 32. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 33. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 34. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 35. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 36. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 9. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 10. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 11. Pengadaan Mebel Sekolah 12. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				13. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 14. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 15. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 16. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 17. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 18. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 19. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 20. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 21. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 22. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 23. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 24. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 25. Pemeliharaan Mebel Sekolah 26. Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar 27. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 28. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 29. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 30. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 31. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				32. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 33. Penyediaan infrastruktur TIK 34. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 35. Penataan Ruang/Sudut Baca 36. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 37. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 38. Pembangunan Ruang Kelas Baru 39. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 40. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 41. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 42. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
3	Pendidikan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 5. Pembangunan Laboratorium 6. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 7. Pembangunan Asrama Sekolah 8. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 9. Pembangunan Fasilitas Parkir 10. Pembangunan Kantin Sekolah

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				11. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 12. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 13. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 14. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 15. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 16. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 17. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 18. Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 19. Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 20. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 21. Pengadaan Mebel Sekolah 22. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 23. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 24. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 25. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 26. Perlengkapan Belajar Peserta Didik 27. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 28. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 29. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 30. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 31. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				32. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 33. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 34. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 35. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 36. Pemeliharaan Mebel Sekolah 37. Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama 38. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 39. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 40. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 41. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 42. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 43. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 44. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 45. Penataan Ruang/Sudut Baca 46. Penyediaan infrastruktur TIK 47. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 48. Pembangunan Ruang Kelas Baru 49. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				50. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 51. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 52. Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 53. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4	Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 7. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 8. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 9. Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 10. Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 11. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 12. Pengembangan konten digital untuk pendidikan

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				13. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 14. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 15. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 16. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 18. Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 19. Penyediaan infrastruktur TIK 20. Penataan Ruang/Sudut Baca 21. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 22. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 23. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 24. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 25. Pembangunan Ruang Kelas Baru 26. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 27. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 28. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 29. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium 30. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 31. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				32. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 33. Pembangunan Ruang Laboratorium 34. Pengadaan Mebel Sekolah 35. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 36. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2025

4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan

Tabel 4.7.2
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2025

4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 4.7.3
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di	1. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan



No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan 3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan 4. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 2. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 3. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah (SPALD) Setempat

Sumber: Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya Kabupaten Jember, 2025

4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.7.4
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena	-	-	-



No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten			

Sumber: Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya
Kabupaten Jember, 2025

4.7.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 4.7.5
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum 2. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 2. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5	Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, 2025

4.7.6 Bidang Urusan Sosial

Tabel 4.7.6
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, seta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, seta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, seta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	1. Penyedia alat bantu 2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada kelaurga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,

No	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			seta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	lansia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, seta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Fisik, mental, Spiritual dan Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Program Penanganan Bencana	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Penanganan khusus bagi kelompok rentan

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2025

BAB V PENUTUP

Demikian gambaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Jember selama kurun waktu satu tahun yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024 ini dapat kami sampaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember tahun 2024 menunjukkan upaya komprehensif pemerintah lokal dalam meningkatkan penyampaian layanan publik, pengembangan infrastruktur dan tata kelola secara keseluruhan. Melalui perencanaan dan eksekusi strategis, dokumen ini menguraikan pencapaian di berbagai sektor termasuk urusan layanan dasar yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan

Berkomitmen pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, maka besar harapan kami bahwa LPPD Kabupaten Jember Tahun 2024 ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan otonomi daerah di masa yang akan datang.

Tidak lupa kepada seluruh komponen Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja kerasnya dalam mengemban kepercayaan dari Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jember demi terwujudnya Jember yang lebih baik.

Namun demikian tidak ada gading yang tak retak, oleh sebab itu Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangsempurnaan dalam pelaksanaan tugas selama kurun waktu tahun 2024 yang tentu saja akan terus Kami upayakan usaha-usaha perbaikan pada tahun berikutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada Bangsa dan Negara.





Lampiran

Lampiran 1.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

NO	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
2	Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
4	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
5	Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan
6	Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Dinas Pendidikan
7	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
9	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
10	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
11	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Dan Sumber Daya Air
12	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya
13	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya
14	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Dan Sumber Daya Air
15	Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya
16	Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya
17	Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Dan Sumber Daya Air
18	Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya
19	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya
20	Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya
21	Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya
22	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya
23	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja



NO	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
24	Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
26	Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
28	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
29	Penanganan Bencana	Dinas Sosial
30	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
31	Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
32	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
33	Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
34	Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
35	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
36	Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
37	Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
38	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
39	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
40	Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
41	Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
42	Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
43	Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Cipta Karya
44	Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
45	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
46	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
47	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup
48	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
49	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
50	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
51	Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup



NO	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
52	Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
53	Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
54	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
55	Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
56	Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
57	Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
58	Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
59	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
60	Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
61	Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
62	Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
63	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana
64	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Dinas Perhubungan
65	Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
66	Pengelolaan Penerbangan	Dinas Perhubungan
67	Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
68	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
69	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
70	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
71	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
72	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
73	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
74	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
75	Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
76	Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
77	Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
78	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



NO	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
79	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
80	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
81	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
82	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi Dan Informatika
83	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
84	Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
85	Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
86	Pembinaan Sejarah	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
87	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
88	Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
89	Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
90	Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
91	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
92	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
93	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
94	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
95	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
96	Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
97	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
98	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
99	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
100	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
101	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
102	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
103	Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
104	Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
105	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
106	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
107	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
108	Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
109	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan



NO	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
110	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
111	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
112	Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
113	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
114	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Setda Bagian Tata Pemerintahan
115	Perekonomian Dan Pembangunan	Setda Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
116	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
117	Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
118	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
119	Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
120	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
121	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
122	Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
123	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
124	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
125	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
126	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	Inspektorat Daerah
127	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
128	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
129	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan
130	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
131	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
132	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
133	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
134	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
135	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Lampiran 1.2 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Rkpd
Kabupaten Jember Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pendidikan
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan
18	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
20	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan
21	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
22	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
23	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
24	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
25	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
26	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
27	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
28	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kencong
29	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Cakru
30	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Gumukmas
31	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Tembokrejo
32	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Puger
33	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kasiyan
34	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Wuluhan
35	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Lojejer
36	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Ambulu
37	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sabrang
38	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Andongsari
39	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Tempurejo
40	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Curahnongko
41	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Silo I
42	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Silo li
43	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Mayang
44	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Mumbulsari
45	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Jenggawah
46	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kemuningsari
47	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Ajung
48	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Karangduren
49	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Rambipuji
50	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Balung
51	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Nogosari
52	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Umbulsari

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
53	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Paleran
54	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Semboro
55	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Jombang
56	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sumberbaru
57	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Rowotengah
58	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Tanggul
59	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Klatakan
60	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Bangsalsari
61	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sukorejo
62	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Panti
63	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sukorambi
64	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Arjasa
65	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pakusari
66	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kalisat
67	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Ledokombo
68	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sumberjambe
69	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sukowono
70	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Jelbuk
71	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kaliwates
72	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Mangli
73	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Jemberkidul
74	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sumbersari
75	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Gladakpakem
76	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Patrang
77	Peningkatan Pelayanan BLUD	Puskesmas Banjarsengon
78	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud
79	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat - Blud
80	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air
81	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
82	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air
83	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air
84	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air
85	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air
86	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air
87	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air
88	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air
89	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air
90	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air
91	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
92	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
93	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
94	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
95	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
96	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
97	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
98	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
99	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
100	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
101	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
102	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
103	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
104	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
105	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
106	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
107	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
108	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
109	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
110	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
111	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
112	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya
113	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
114	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
115	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
116	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
117	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
118	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
119	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
120	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
121	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja
122	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
123	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
124	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
125	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
126	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
127	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
128	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
129	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
130	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
131	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
132	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
133	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
134	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial
135	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
136	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial
137	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial
138	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial
139	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial
140	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
141	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
142	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
143	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial
144	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
145	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
146	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
147	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
148	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
149	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
150	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
151	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Tenaga Kerja
152	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja
153	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja
154	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja
155	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
156	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga Kerja
157	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
158	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Dinas Tenaga Kerja
159	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
160	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
161	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja
162	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
163	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
164	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
165	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
166	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
167	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
168	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
169	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
170	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
171	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
172	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
173	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
174	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
175	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
		Anak Dan Keluarga Berencana
176	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
177	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
178	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
179	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
180	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
181	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
182	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
183	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
184	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
185	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
186	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
187	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
		Anak Dan Keluarga Berencana
188	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
189	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
190	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
191	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
192	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
193	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
194	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
195	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
196	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
197	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
198	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
199	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
200	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
201	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
202	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
203	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
204	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
205	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
206	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
207	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
208	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
209	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
210	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
211	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
212	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
213	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
214	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
215	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
216	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
217	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
218	Penyimpanan sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
219	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
220	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
221	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
222	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
223	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
224	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
225	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
226	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
227	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
228	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
229	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
230	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
231	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
232	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
233	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
234	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
235	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
236	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
237	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
238	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
239	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
240	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
241	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
242	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
243	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
244	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
245	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
246	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
247	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
248	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
249	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
251	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan
252	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan
253	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
254	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
255	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan
256	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
257	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
258	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
259	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
260	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
261	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dinas Perhubungan
262	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Dinas Perhubungan
263	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
264	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
265	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
266	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
267	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
268	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
269	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
270	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi Dan Informatika
271	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi Dan Informatika
272	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi Dan Informatika
273	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi Dan Informatika
274	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi Dan Informatika
275	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
276	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
277	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
278	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
279	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
280	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
281	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
282	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
283	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
284	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
285	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
286	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
287	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
288	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
289	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
290	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
291	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
292	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
293	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
294	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
295	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
296	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
297	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
298	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
299	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
300	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
301	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
302	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
303	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
304	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
305	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
306	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
307	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
308	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
309	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
310	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
311	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
312	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
313	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
314	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
315	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
316	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
317	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
318	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
319	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
320	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
321	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
322	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
323	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
324	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
325	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
326	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
327	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
328	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
329	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
330	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
331	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
332	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
333	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
334	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
335	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
336	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan
337	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
338	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perikanan
339	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan
340	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan
341	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan
342	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
343	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
344	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
345	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan
346	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
347	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan
348	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
349	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
350	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
351	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
352	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
353	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
354	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
355	Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
356	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
357	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
358	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
359	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
360	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
361	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
362	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
363	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
364	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
365	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
366	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
367	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
368	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
369	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
370	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
371	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
372	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
373	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
374	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
375	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum
376	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Hukum
377	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Hukum
378	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Hukum
379	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Hukum



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
380	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Hukum
381	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum
382	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
383	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
384	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
385	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
386	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan
387	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
388	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
389	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
390	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
391	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
392	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
393	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
394	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat
395	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat
396	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
397	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
398	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
399	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Organisasi
400	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
401	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
402	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
403	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
404	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
405	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
406	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Umum
407	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bagian Umum
408	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Umum
409	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Umum
410	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum
411	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum
412	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum
413	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bagian Umum
414	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
415	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
416	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
417	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
418	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
419	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
420	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
421	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
422	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
423	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
424	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
425	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
426	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
427	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Tata Pemerintahan

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
428	Penataan Organisasi	Bagian Tata Pemerintahan
429	Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
430	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
431	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
432	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
433	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
434	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
435	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
436	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
437	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
438	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
439	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
440	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
441	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
442	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
443	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
444	Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
445	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
446	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
447	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
448	Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
449	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
450	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
451	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
452	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
453	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
454	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
455	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
456	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
457	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
458	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
459	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
460	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
461	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
462	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
463	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
464	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
465	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
466	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
467	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
468	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd
469	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd
470	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd

NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
471	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd
472	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd
473	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd
474	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd
475	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd
476	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd
477	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd
478	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd
479	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
480	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
481	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
482	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
483	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
484	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
485	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
486	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
487	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
488	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
489	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
490	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
491	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
492	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
493	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
494	Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
495	Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
496	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
497	Pengembangan Kompetensi Teknis	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
498	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm
499	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat
500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat
501	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat
502	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat
503	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
504	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
505	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
506	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
507	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat
508	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
509	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ajung
510	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ajung
511	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ajung
512	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ajung
513	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ajung
514	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ajung
515	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Ajung
516	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Ajung



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
517	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ambulu
518	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ambulu
519	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ambulu
520	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ambulu
521	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ambulu
522	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Ambulu
523	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Ambulu
524	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Ambulu
525	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Arjasa
526	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Arjasa
527	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Arjasa
528	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Arjasa
529	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Arjasa
530	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Arjasa
531	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Arjasa
532	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Arjasa
533	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balung
534	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balung
535	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balung
536	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balung
537	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balung
538	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balung
539	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balung
540	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Balung
541	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balung
542	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Balung
543	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bangsalsari



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
544	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Bangsalsari
545	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bangsalsari
546	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bangsalsari
547	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bangsalsari
548	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Bangsalsari
549	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bangsalsari
550	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Bangsalsari
551	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bangsalsari
552	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gumukmas
553	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gumukmas
554	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gumukmas
555	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gumukmas
556	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gumukmas
557	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gumukmas
558	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gumukmas
559	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gumukmas
560	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gumukmas
561	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Gumukmas
562	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Gumukmas
563	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gumukmas
564	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Gumukmas
565	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Gumukmas
566	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jelbuk
567	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jelbuk
568	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jelbuk



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
569	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jelbuk
570	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jelbuk
571	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Jelbuk
572	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Jelbuk
573	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Jelbuk
574	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jenggawah
575	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jenggawah
576	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jenggawah
577	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jenggawah
578	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jenggawah
579	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jenggawah
580	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Jenggawah
581	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Jenggawah
582	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Jenggawah
583	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang
584	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang
585	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jombang
586	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jombang
587	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jombang
588	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jombang
589	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jombang
590	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Jombang
591	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Jombang
592	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Jombang
593	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jombang



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
594	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Jombang
595	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Jombang
596	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kalisat
597	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kalisat
598	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kalisat
599	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kalisat
600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kalisat
601	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kalisat
602	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Kalisat
603	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kalisat
604	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Kalisat
605	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwates
606	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwates
607	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kaliwates
608	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kaliwates
609	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kaliwates
610	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kaliwates
611	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kaliwates
612	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kaliwates
613	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kaliwates
614	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Kaliwates
615	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Kaliwates
616	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kaliwates
617	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kencong
618	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kencong
619	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kencong



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
620	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kencong
621	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kencong
622	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kencong
623	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kencong
624	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kencong
625	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ledokombo
626	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ledokombo
627	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ledokombo
628	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ledokombo
629	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ledokombo
630	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Ledokombo
631	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Ledokombo
632	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mayang
633	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mayang
634	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mayang
635	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mayang
636	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mayang
637	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Mayang
638	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Mayang
639	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mayang
640	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mumbulsari
641	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mumbulsari
642	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mumbulsari
643	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mumbulsari
644	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mumbulsari
645	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mumbulsari



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
646	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mumbulsari
647	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Mumbulsari
648	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Mumbulsari
649	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mumbulsari
650	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pakusari
651	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pakusari
652	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pakusari
653	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pakusari
654	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pakusari
655	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pakusari
656	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pakusari
657	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pakusari
658	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pakusari
659	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Patrang
660	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Patrang
661	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Patrang
662	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Patrang
663	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Patrang
664	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Patrang
665	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Patrang
666	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Patrang
667	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Patrang
668	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Patrang
669	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Puger
670	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Puger
671	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Puger
672	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Puger



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
673	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puger
674	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puger
675	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Puger
676	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Puger
677	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Puger
678	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Puger
679	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Puger
680	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Puger
681	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Puger
682	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Rambipuji
683	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Rambipuji
684	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Rambipuji
685	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Rambipuji
686	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rambipuji
687	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rambipuji
688	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Rambipuji
689	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Rambipuji
690	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Rambipuji
691	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rambipuji
692	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semboro
693	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semboro
694	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Semboro
695	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semboro
696	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semboro
697	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semboro
698	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semboro



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
699	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semboro
700	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Semboro
701	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Semboro
702	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Silo
703	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Silo
704	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Silo
705	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Silo
706	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Silo
707	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Silo
708	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Silo
709	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Silo
710	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Silo
711	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Silo
712	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sukorambi
713	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sukorambi
714	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sukorambi
715	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sukorambi
716	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sukorambi
717	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sukorambi
718	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sukorambi
719	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sukorambi
720	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sukowono
721	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sukowono
722	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sukowono
723	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sukowono
724	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sukowono
725	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sukowono



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
726	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sukowono
727	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sukowono
728	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sukowono
729	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sukowono
730	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sukowono
731	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sukowono
732	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sumberbaru
733	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sumberbaru
734	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sumberbaru
735	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sumberbaru
736	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumberbaru
737	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumberbaru
738	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sumberbaru
739	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sumberbaru
740	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sumberbaru
741	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sumberbaru
742	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sumberjambe
743	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sumberjambe
744	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sumberjambe
745	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumberjambe
746	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumberjambe
747	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sumberjambe
748	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sumberjambe
749	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sumberjambe
750	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sumberjambe
751	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Summersari



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
752	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbersari
753	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbersari
754	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sumbersari
755	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sumbersari
756	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumbersari
757	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sumbersari
758	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sumbersari
759	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sumbersari
760	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sumbersari
761	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sumbersari
762	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sumbersari
763	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tanggul
764	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tanggul
765	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tanggul
766	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tanggul
767	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tanggul
768	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tanggul
769	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tanggul
770	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Tanggul
771	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Tanggul
772	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Tanggul
773	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tempurejo
774	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tempurejo
775	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tempurejo
776	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tempurejo
777	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tempurejo



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
778	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Tempurejo
779	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Tempurejo
780	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Umbulsari
781	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Umbulsari
782	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Umbulsari
783	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Umbulsari
784	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Umbulsari
785	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Umbulsari
786	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Umbulsari
787	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wuluhan
788	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wuluhan
789	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wuluhan
790	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wuluhan
791	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wuluhan
792	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wuluhan
793	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Wuluhan
794	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wuluhan
795	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Wuluhan
796	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Panti
797	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Panti
798	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Panti
799	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Panti
800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Panti
801	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Panti
802	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Panti
803	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Panti



NO	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
804	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Panti
805	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
806	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
807	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
808	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
809	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
810	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
811	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
812	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
813	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
814	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
815	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
816	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik